



**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga  
melayani  
bangsa**

# LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

## PENGADILAN TINGGI BANTEN TAHUN 2023



JL. RAYA PANDEGLANG KM. 6,6 SERANG - BANTEN

TELP. (0254) 250002, FAX (0254) 250001

WEBSITE : [www.pt-banten.go.id](http://www.pt-banten.go.id) EMAIL : [humas@pt-banten.go.id](mailto:humas@pt-banten.go.id)

SERANG - 42126

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkah dan rahmatNya Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 Pengadilan Tinggi Banten dapat kami sajikan.

Laporan pelaksanaan kegiatan tahun 2023 ini disusun sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban Pengadilan Tinggi Banten dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama tahun 2023.

Secara keseluruhan, laporan ini menggambarkan kegiatan Pengadilan Tinggi Banten dan Pengadilan Negeri sewilayah Banten dalam mengemban tugas sesuai arahan dan kerangka kerja yang telah ditetapkan Mahkamah Agung sebagai instansi vertikal di atasnya.

Jajaran Pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banten senantiasa meningkatkan pelayanan kepada para pencari keadilan sehingga dapat memberikan pelayanan prima. Berbagai program telah dijalankan untuk meningkatkan kepercayaan publik, diantaranya berbagai aplikasi yang menjadi unggulan utama Mahkamah Agung yaitu SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara), Siwas, E-court, E-litigasi dan E-Berpadu.

Dalam menjamin pelaksanaan operasional yang transparan dan akuntabel pun, Pengadilan Tinggi Banten dan jajaran Pengadilan di bawahnya berusaha mempertahankan dan meningkatkan perannya melalui program akreditasi penjaminan mutu, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Pembangunan Zona Integritas dan langkah-langkah menuju pencapaian WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani).

Akhirnya, kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh jajaran Pengadilan Tinggi Banten dan Pengadilan Negeri sewilayah Banten atas segala dedikasi dan partisipasi aktifnya. Semoga hasil kerja keras ini dapat memberikan manfaat dan informasi yang berguna. Kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan demi peningkatan kualitas dan kinerja Pengadilan Tinggi Banten.

Serang, 25 Januari 2024

Ketua,



Dr. ANDRIANI NURDIN, S.H., M.H.



**DAFTAR ISI**

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
<b>Bab I</b> <b>Pendahuluan</b> .....	1
<b>Bab II</b> <b>A. Keadaan Perkara di Lingkungan Pengadilan Tinggi Banten</b> .....	3
<b>B. Penyelesaian Perkara di Lingkungan Pengadilan Tinggi Banten</b> .....	15
1. Jumlah Sisa Perkara yang Diputus .....	15
2. Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu .....	16
3. Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK .....	17
4. Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil Melalui Mediasi.....	17
5. Jumlah Perkara Anak yang Berhasil Melalui Diversi .....	18
<b>C. Capaian Prioritas Nasional</b> .....	18
1. Posbakum .....	18
2. Sidang Keliling/ Pelayanan Terpadu .....	19
3. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara) .....	20
<b>Bab III</b> <b>Sumber Daya Manusia</b> .....	21
Komposisi SDM Berdasarkan Kepangkatan/ Golongan/ Pendidikan .....	21
1. Mutasi .....	22
2. Promosi .....	24
3. Pensiun .....	25
4. Diklat (SDM Teknis/ Non Teknis) .....	26
<b>Bab IV</b> <b>Pengelolaan Keuangan, Sarana &amp; Prasarana, dan Teknologi Informasi</b> ...	30
<b>A. Pengelolaan Keuangan</b> .....	30
<b>B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana</b> .....	34
<b>C. Pengelolaan Teknologi Informasi</b> .....	48
1. Implementasi <i>E-court</i> di Lingkungan Peradilan Umum .....	49
2. Implementasi SIPP di Lingkungan Peradilan Umum .....	52
3. Implementasi E-Berpadu di Lingkungan Peradilan Umum.....	53
<b>Bab V</b> <b>Peningkatan Pelayanan Publik</b> .....	55
<b>A. Pembangunan Zona Integritas</b> .....	55
<b>B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu</b> .....	66
<b>C. Inovasi Pelayanan Publik</b> .....	73
<b>Bab VI</b> <b>Pengawasan</b> .....	79
<b>A. Internal</b> .....	79
<b>B. Evaluasi</b> .....	84
<b>Bab VII</b> <b>Penutup</b> .....	87
<b>A. Kesimpulan</b> .....	87
<b>B. Rekomendasi</b> .....	88
Lampiran .....	

## BAB I PENDAHULUAN

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:143/KMA/SK/VIII/ 2007 tanggal 2 November 2007 tentang Pemberlakuan Buku I pada bagian ketiga (Prosedur Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan) dan menindaklanjuti surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 4108/ SEK/OT1.6/12/2023 tanggal 19 Desember 2023 perihal Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023, Pengadilan Tinggi Banten sebagai Pengadilan Tingkat Banding pada Provinsi Banten di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan sebagai laporan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan pengelolaan administrasi Pengadilan Tinggi Banten dan jajaran Pengadilan di bawahnya karena Pengadilan Tinggi Banten selain mempunyai fungsi yudikatif atau penyelesaian perkara, juga memiliki fungsi pengawasan, mengatur dan administratif terhadap Pengadilan Tingkat Pertama di bawahnya.

Administrasi Pengadilan Tinggi Banten dibebankan menurut teknis dan non teknis yang dipisahkan penanganannya ke dalam administrasi kepaniteraan dan administrasi kesekretariatan. Sehingga kegiatan itu bisa terlaksana efisien dan efektif.

Pengadilan Tinggi Banten mempunyai visi dan misi sebagai berikut:

Visi : "Mendukung terwujudnya badan peradilan yang agung di lingkungan Pengadilan Tinggi Banten".

Misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Tinggi Banten;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan pada Pengadilan Tinggi Banten;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Tinggi Banten;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi pada Pengadilan Tinggi Banten;

Selama kurun waktu tahun 2023, Pengadilan Tinggi Banten telah melaksanakan berbagai kebijakan yang dikeluarkan Mahkamah Agung dan Direktorat Jenderal Badan peradilan Umum dalam rangka meningkatkan pelayanan publik.

Beberapa aplikasi yang telah diterapkan dan selalu berusaha untuk ditingkatkan kinerjanya yaitu :

- SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara), saat ini menggunakan SIPP versi 4.1.1
- Siwas (Aplikasi Pengawasan) versi 4.0 yang bermanfaat bagi pencari keadilan jika menemukan dugaan pelanggaran kode etik di lingkungan Pengadilan Tinggi Banten dan Pengadilan Negeri di bawahnya, maka dapat melaporkan melalui aplikasi ini.
- E-court adalah layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara



online, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran secara online, pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan persidangan yang dilakukan secara elektronik.

- E-litigasi. Dengan kehadiran e-litigasi migrasi dari sistem manual ke sistem elektronik tidak hanya dilakukan pada tataran administrasi perkara saja, namun dalam praktek persidangan. Sistem elektronik tidak hanya diberlakukan dalam pendaftaran perkara, pembayaran panjar dan panggilan para pihak, tetapi diberlakukan juga dalam pertukaran dokumen jawab-jinawab, pembuktian, dan penyampaian putusan secara elektronik.

Selanjutnya, masih dalam rangka peningkatan pelayanan publik, Pengadilan Tinggi Banten juga tetap konsisten dan senantiasa meningkatkan kinerja melalui program-program sebagai berikut :

- PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), yaitu pelayanan pengadilan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu. PTSP ditujukan untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur serta memberikan kualitas pelayanan yang prima dan akuntabel sehingga meminimalisir terjadinya pelanggaran hukum. Pedoman standar PTSP pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri diatur dalam Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM03.3/2/2018 dan Keputusan Dirjen Badilum Nomor 3239/DJU/SK/HM03.3/11/2019.
- Akreditasi Penjaminan Mutu yang merupakan program dari Dirjen Badan Peradilan Umum untuk mewujudkan kinerja peradilan Indonesia yang unggul/prima. Bahwa Pengadilan Tinggi Banten dan seluruh Pengadilan Negeri di bawahnya telah memperoleh akreditasi A dari Dirjen Badilum.
- Pembangunan Zona Integritas untuk mewujudkan WBK dan WBBM, dalam rangka pencegahan korupsi, penerapan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pengadilan Tinggi Banten dan Pengadilan Negeri sewilayah Banten senantiasa melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan predikat ini.

## BAB II PERKARA

### A. KEADAAN PERKARA DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI BANTEN

#### 1. Keadaan Perkara Secara Global

Keadaan perkara di tahun 2023 pada Pengadilan Tinggi Banten dan Pengadilan Negeri sewilayah Banten dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut :

SATKER	PERKARA	SISA THN 2022	MASUK THN 2023	PUTUS THN 2023	SISA THN 2023	
Pengadilan Tinggi Banten	Pidana	Biasa	6	178	168	16
		Anak	-	15	14	1
		Tipikor	5	44	48	1
	Perdata	Perdata	13	332	333	12
Pengadilan Negeri Tangerang	Pidana	Biasa	402	2168	2131	439
		Cepat	-	17539	17539	-
		Anak	5	98	98	5
		Pra Peradilan	2	25	22	3
	Perdata	Gugatan	546	1411	1388	569
		Permohonan	101	1478	1484	95
		Gugatan Sederhana	19	120	105	34
Pengadilan Negeri Serang	Pidana	Biasa	207	1023	1050	180
		Cepat	-	6	6	-
		Anak	5	57	60	2
		Pra Peradilan	-	16	14	2
	Perdata	Tipikor	28	45	53	20
		Gugatan	68	189	167	90
		Permohonan	18	773	758	63
		Gugatan Sederhana	7	63	63	7
		Perlawanan/Bantahan	3	9	8	4
		PHI	29	119	115	41
Pengadilan Negeri Pandeglang	Pidana	Biasa	41	274	253	62
		Cepat	-	4	4	-
		Anak	-	5	5	-
		Pra Peradilan	-	2	2	-
	Perdata	Gugatan	14	28	31	11
		Permohonan	1	37	37	1
		Gugatan Sederhana	-	12	12	-
Pengadilan Negeri Rangkasbitung	Pidana	Perlawanan/Bantahan	-	-	-	-
		Biasa	10	249	248	11
		Cepat	-	3	3	-
		Anak	-	13	12	1
	Perdata	Pra Peradilan	-	1	1	-
		Gugatan	12	25	24	13
		Permohonan	-	71	70	1
Perdata	Gugatan Sederhana	-	3	3	-	
	Perlawanan/Bantahan	-	-	-	-	



2. Data Keadaan Perkara Pidana Biasa

Pengadilan Tinggi Banten

No	Klaasifikasi	Sisa 2022	Masuk 2023	Jumlah Beban	Putus 2023	Sisa 2023
1	Informasi dan Transaksi Elektronik	1	5	6	6	-
2	Kejahatan Perjudian	-	-	-	-	-
3	Kejahatan terhadap Kesusilaan	-	1	1	1	-
4	Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum	-	1	1	1	-
5	Kejahatan terhadap Nyawa	-	-	-	-	-
6	Kejahatan yang Membahayakan Keamananan Umum Bagi Orang atau Barang	-	-	-	-	-
7	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	-	4	4	4	-
8	Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Pertambangan(Mineral,Batu Bara), Minyak dan Gas Bumi	-	1	1	1	-
9	Kesehatan	-	4	4	4	-
10	Konservasi Sumber Daya Alam	-	-	-	-	-
11	Lain-Lain	-	14	14	11	3
12	Lalu Lintas	-	1	1	1	-
13	Narkotika	4	71	75	70	5
14	Pelanggaran Kesusilaan	-	-	-	-	-
15	Pelanggaran Mengenai Tanah, Tanaman, dan Pekarangan	-	-	-	-	-
16	Pemalsuan Surat	-	6	6	4	2
17	Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	-	-	-	-	-
18	Pembunuhan	-	4	4	4	-
19	Pemerasan dan Pengancaman	-	-	-	-	-
20	Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat	-	-	-	-	-
21	Penadahan, Penerbitan, dan Pencetakan	-	3	3	3	-
22	Pencurian	-	11	11	10	1
23	Penebangan Kayu	-	-	-	-	-
24	Pengancaman	-	-	-	-	-
25	Penganiayaan	1	2	3	2	1
26	Pengeroyokan yang menyebabkan luka ringan, luka berat	-	3	3	3	-
27	Penggelapan	-	10	10	9	1
28	Penghancuran atau Perusakan Barang	-	2	2	2	-
29	Penghinaan	-	-	-	-	-
30	Penipuan	-	15	15	14	1

31	Perbuatan Curang	-	-	-	-	-
32	Perlindungan Anak	-	16	16	15	1
33	Pertambangan Mineral dan Batubara	-	-	-	-	-
34	Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan	-	1	1	1	-
35	Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan	-	1	1	-	1
36	Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajak	-	2	2	2	-
37	Tindak Pidana Senjata Api atau Benda Tajam	-	-	-	-	-
38	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	-	-	-	-	-
39	Pencemaran Nama Baik	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>6</b>	<b>178</b>	<b>184</b>	<b>168</b>	<b>16</b>

Pengadilan Negeri Tangerang

No	Klaasifikasi	Sisa 2022	Masuk 2023	Jumlah Beban	Putus 2023	Sisa 2023
1	Narkotika	158	719	877	691	186
2	Pencurian	58	458	516	440	76
3	Perlindungan Anak	22	90	112	93	19
4	Penggelapan	21	129	150	123	27
5	Penganiayaan	10	54	64	50	14
6	Penipuan	26	151	177	107	70
7	Kesehatan	7	103	110	65	45
8	Kejahatan Perjudian	23	30	53	53	-
9	Penadahan, Penerbitan, Dan Pencetakan	9	81	90	77	13
10	Tindak Pidana Senjata Api Atau Benda Tajam	11	55	66	49	17
11	Informasi Dan Transaksi Elektronik	6	10	16	12	4
12	Lalu Lintas	2	14	16	12	4
13	Pengeroyokan Yang Menyebabkan Luka Ringan, Luka Berat	8	57	57	52	5
14	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	1	18	19	16	3
15	Pembunuhan	4	13	17	13	4
16	Pemalsuan Surat	3	13	16	12	4
17	Kejahatan Terhadap Kesusilaan	4	3	7	7	-
18	Penghancuran Atau Perusakan Barang	3	2	5	5	-
19	Kejahatan Terhadap Nyawa	-	-	-	-	-
20	Pemerasan Dan Pengancaman	-	14	14	10	4



21	Penebangan Kayu	-	-	-	-	-
22	Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum	-	3	3	2	1
23	Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Pertambangan(mineral,Batu Bara), Minyak Dan Gas Bumi	-	-	-	-	-
24	Kejahatan Terhadap Keamanan Negara	-	-	-	-	-
25	Pertambangan Mineral Dan Batubara	-	-	-	-	-
26	Perbuatan Curang	-	-	-	-	-
27	Pengancaman	-	-	-	-	-
28	Kejahatan Yang Membahayakan Keamananan Umum Bagi Orang Atau Barang	-	2	2	2	-
29	Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	-	5	5	1	4
30	Pemalsuan Mata Uang Dan Uang Kertas	-	5	5	4	1
31	Pengeroyokan Yang Menyebabkan Kematian	1	6	7	6	1
32	Pelanggaran Kesusilaan	-	-	-	-	-
33	Perbuatan Tidak Menyenangkan	-	1	1	1	-
34	Konservasi Sumber Daya Alam	-	-	-	-	-
35	Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang	-	4	4	2	2
36	Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan	4	5	9	9	-
37	Lain-lain	22	93	115	100	15
<b>Jumlah</b>		<b>402</b>	<b>2138</b>	<b>2533</b>	<b>2014</b>	<b>519</b>

Pengadilan Negeri Serang

No	Klaasifikasi	Sisa 2022	Masuk 2023	Jumlah Beban	Putus 2023	Sisa 2023
1	Narkotika	64	299	363	313	50
2	Pencurian	39	223	262	225	37
3	Perlindungan Anak	13	63	76	69	7
4	Penggelapan	20	57	77	73	4
5	Penganiayaan	3	29	32	25	7
6	Penipuan	6	63	69	53	16
7	Kesehatan	18	121	139	113	26
8	Kejahatan Perjudian	14	12	26	22	4
9	Penadahan, Penerbitan, Dan Pencetakan	3	36	39	36	3
10	Tindak Pidana Senjata Api Atau Benda Tajam	3	15	18	16	2
11	Informasi Dan Transaksi Elektronik	-	8	8	5	3

12	Lalu Lintas	-	7	7	7	-
13	Pengeroyokan Yang Menyebabkan Luka Ringan, Luka Berat	5	12	17	13	4
14	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	3	5	8	8	-
15	Pembunuhan	-	7	7	5	2
16	Pemalsuan Surat	-	6	6	2	4
17	Kejahatan Terhadap Kesusilaan	-	4	4	3	1
18	Penghancuran Atau Perusakan Barang	1	-	1	1	-
19	Kejahatan Terhadap Nyawa	-	-	-	-	-
20	Pemerasan Dan Pengancaman	-	-	-	-	-
21	Penebangan Kayu	-	-	-	-	-
22	Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum	-	-	-	-	-
23	Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Pertambangan(mineral,Batu Bara), Minyak Dan Gas Bumi	-	3	3	1	2
24	Kejahatan Terhadap Keamanan Negara	-	-	-	-	-
25	Pertambangan Mineral Dan Batubara	-	2	2	2	-
26	Perbuatan Curang	-	-	-	-	-
27	Pengancaman	-	-	-	-	-
28	Kejahatan Yang Membahayakan Keamananan Umum Bagi Orang Atau Barang	3	-	3	3	-
29	Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	-	12	12	9	3
30	Pemalsuan Mata Uang Dan Uang Kertas	2	3	5	5	-
31	Pengeroyokan Yang Menyebabkan Kematian	-	-	-	-	-
32	Pelanggaran Kesusilaan	-	-	-	-	-
33	Perbuatan Tidak Menyenangkan	-	-	-	-	-
34	Konservasi Sumber Daya Alam	2	-	2	2	-
35	Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang	-	-	-	-	-
36	Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan	-	1	1	1	-
37	Lain-lain	10	29	39	36	3
<b>Jumlah</b>		<b>209</b>	<b>1017</b>	<b>1226</b>	<b>1048</b>	<b>178</b>



## Pengadilan Negeri Pandeglang

No	Klasifikasi	Sisa 2022	Masuk 2023	Jumlah Beban	Putus 2023	Sisa 2022
1	Narkotika	11	46	57	40	17
2	Pencurian	8	49	57	41	16
3	Perlindungan Anak	3	8	11	9	2
4	Penggelapan	1	3	4	3	1
5	Penganiayaan	1	6	7	7	-
6	Penipuan	3	14	17	13	4
7	Kesehatan	2	39	41	39	2
8	Kejahatan Perjudian	-	18	18	18	-
9	Penadahan, Penerbitan, Dan Pencetakan	1	16	17	13	4
10	Tindak Pidana Senjata Api Atau Benda Tajam	-	3	3	3	-
11	Informasi Dan Transaksi Elektronik	1	2	3	2	1
12	Lalu Lintas	1	1	2	2	-
13	Pengeroyokan Yang Menyebabkan Luka Ringan, Luka Berat	-	2	2	2	-
14	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	-	2	2	-	2
15	Pembunuhan	-	2	2	2	-
16	Pemalsuan Surat	1	2	3	3	-
17	Kejahatan Terhadap Kesusilaan	1	1	2	2	-
18	Penghancuran Atau Perusakan Barang	1	-	1	1	-
19	Kejahatan Terhadap Nyawa	-	-	-	-	-
20	Pemerasan Dan Pengancaman	-	-	-	-	-
21	Penebangan Kayu	-	-	-	-	-
22	Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum	-	-	-	-	-
23	Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Pertambangan(mineral,Batu Bara), Minyak Dan Gas Bumi	-	-	-	-	-
24	Kejahatan Terhadap Keamanan Negara	-	-	-	-	-
25	Pertambangan Mineral Dan Batubara	1	2	3	3	-
26	Perbuatan Curang	-	-	-	-	-
27	Pengancaman	-	-	-	-	-
28	Kejahatan Yang Membahayakan Keamananan Umum Bagi Orang Atau Barang	-	-	-	-	-
29	Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	-	-	-	-	-
30	Pemalsuan Mata Uang Dan Uang Kertas	-	4	4	-	4

31	Pengeroyokan Yang Menyebabkan Kematian	-	-	-	-	-
32	Pelanggaran Kesusilaan	-	-	-	-	-
33	Perbuatan Tidak Menyenangkan	-	-	-	-	-
34	Konservasi Sumber Daya Alam	-	1	1	1	-
35	Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang	-	-	-	-	-
36	Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan	-	2	2	2	-
37	Lain-lain	5	51	56	47	9
<b>Jumlah</b>		<b>41</b>	<b>274</b>	<b>315</b>	<b>253</b>	<b>62</b>

Pengadilan Negeri Rangkasbitung

No	Klasifikasi	Sisa 2022	Masuk 2023	Jumlah Beban	Putus 2023	Sisa 2023
1	Narkotika	2	37	39	39	-
2	Pencurian	-	79	79	78	1
3	Perlindungan Anak	-	22	22	20	2
4	Penggelapan	1	11	12	10	2
5	Penganiayaan	1	3	4	4	-
6	Penipuan	1	9	10	10	-
7	Kesehatan	-	39	39	39	-
8	Kejahatan Perjudian	-	4	4	4	-
9	Penadahan, Penerbitan, Dan Pencetakan	-	3	3	3	-
10	Tindak Pidana Senjata Api Atau Benda Tajam	-	2	2	2	-
11	Informasi Dan Transaksi Elektronik	-	1	1	1	-
12	Lalu Lintas	-	-	-	-	-
13	Pengeroyokan Yang Menyebabkan Luka Ringan, Luka Berat	-	-	-	-	-
14	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	-	2	2	2	-
15	Pembunuhan	-	1	1	-	1
16	Pemalsuan Surat	-	2	2	-	2
17	Kejahatan Terhadap Kesusilaan	-	2	2	2	-
18	Penghancuran Atau Perusakan Barang	-	-	2	2	-
19	Kejahatan Terhadap Nyawa	-	-	-	-	-
20	Pemerasan Dan Pengancaman	-	-	-	-	-
21	Penebangan Kayu	-	-	-	-	-
22	Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum	-	-	-	-	-
23	Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Pertambangan(mineral,Batu Bara), Minyak Dan Gas Bumi	3	4	7	7	-



24	Kejahatan Terhadap Keamanan Negara	-	-	-	-	-
25	Pertambangan Mineral Dan Batubara	-	12	12	12	-
26	Perbuatan Curang	-	-	-	-	-
27	Pengancaman	-	-	-	-	-
28	Kejahatan Yang Membahayakan Keamananan Umum Bagi Orang Atau Barang	-	-	-	-	-
29	Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	-	4	4	2	2
30	Pemalsuan Mata Uang Dan Uang Kertas	-	-	-	-	-
31	Pengeroyokan Yang Menyebabkan Kematian	-	3	3	3	-
32	Pelanggaran Kesusilaan	-	-	-	-	-
33	Perbuatan Tidak Menyenangkan	-	-	-	-	-
34	Konservasi Sumber Daya Alam	-	-	-	-	-
35	Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang	-	-	-	-	-
36	Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan	-	5	5	5	-
37	Lain-lain	-	4	4	3	1
<b>Jumlah</b>		<b>10</b>	<b>249</b>	<b>259</b>	<b>248</b>	<b>11</b>

3. Data Keadaan Perkara Pidana Korupsi

Pengadilan Tinggi Banten

No	Klaasifikasi	Sisa 2022	Masuk 2023	Beban	Putus 2023	Sisa 2023
1	Kerugian Keuangan Negara	5	44	49	48	1
2	Suap Menyuap	-	-	-	1	-
3	Penggelapan dalam Jabatan	-	-	-	-	-
4	Perbuatan Pemerasan	-	-	-	3	-
5	Perbuatan Curang	-	-	-	-	-
6	Benturan Kepentingan dalam Pengadaan	-	-	-	-	-
7	Gratifikasi	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>5</b>	<b>44</b>	<b>49</b>	<b>48</b>	<b>1</b>

PN Serang

No	Klaasifikasi	Sisa 2022	Masuk 2023	Beban	Putus 2023	Sisa 2023
1	Kerugian Keuangan Negara	25	35	73	53	20
2	Suap Menyuap	-	-	-	-	-
3	Penggelapan dalam Jabatan	-	-	-	-	-
4	Perbuatan Pemerasan	-	-	-	-	-
5	Perbuatan Curang	-	-	-	-	-
6	Benturan Kepentingan dalam	-	-	-	-	-

	Pengadaan					
7	Gratifikasi	3	10	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>28</b>	<b>45</b>	<b>73</b>	<b>53</b>	<b>20</b>

4. Data Keadaan Perkara Perdata

PT Banten

No	Klasifikasi	Sisa 2022	Masuk 2023	Beban Perkara	Putus 2023	Sisa 2023
1	Anjak Piutang/Cessie	-	-	-	-	-
2	Asuransi	-	-	-	-	-
3	Gadai/Hipotik/Fiducia	-	-	-	-	-
4	Ganti Rugi	-	-	-	-	-
5	Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action)	-	-	-	-	-
6	Gugatan Terhadap Aktivistik Lingkungan Hidup/Warga/Masyarakat yang memperjuangkan lingkungan hidup	-	-	-	-	-
7	Gugatan Warga Negara (Citizen Law Suit)	-	-	-	-	-
8	Hak Asuh Anak	-	1	1	1	0
9	Hak Ulayat/Persekutuan Adat	-	-	-	-	-
10	Hal-hal yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan	-	-	-	-	-
11	Harta Bersama	-	2	2	2	-
12	Hibah	-	-	-	-	-
13	Hutang Piutang	-	-	-	-	-
14	Jual Beli	-	1	1	1	-
15	Jual Beli Tanah	-	-	-	-	-
16	Jual Gadai	-	-	-	-	-
17	Kebakaran Hutan	-	-	-	-	-
18	Keberatan atas ganti kerugian pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	-	-	-	-	-
19	Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Pertambangan (Mineral, Batu Bara), Minyak dan Gas Bumi	-	-	-	-	-
20	Konservasi Sumber Daya Alam	-	-	-	-	-
21	Koperasi	-	-	-	-	-
22	Lain-Lain	2	29	31	28	3
23	Limbah Bahan Beracun Berbahaya (B3)	-	-	-	-	-



24	Objek Sengketa Bukan Tanah	-	-	-	-	-
25	Objek Sengketa Tanah	-	4	4	4	-
26	Penyalahgunaan Hak	-	-	-	-	-
27	Penyerobotan	-	-	-	-	-
28	Perbuatan Melawan Hukum	7	190	197	192	5
29	Perceraian	2	35	37	36	1
30	Perjanjian Borongan	-	-	-	-	-
31	Perlawanan	-	-	-	-	-
32	Perlawanan terhadap eksekusi	-	-	-	-	-
33	Perseroan	-	-	-	-	-
34	PPAT	-	-	-	-	-
35	Pusaka Tinggi/Pusaka Rendah	-	-	-	-	-
36	Sertifikat/Girik	-	-	-	-	-
37	Sewa Menyewa	-	-	-	-	-
38	Wanprestasi	2	69	71	68	3
39	Warisan/Wasiat	-	1	1	1	-
40	Yayasan	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>13</b>	<b>332</b>	<b>345</b>	<b>333</b>	<b>12</b>

Pengadilan Negeri Tangerang

No	Klaasifikasi	Sisa 2022	Masuk 2023	Jumlah Beban	Putus 2023	Sisa 2023
1	Jual Beli Tanah	-	12	-	3	9
2	Jual Beli	-	3	-	3	-
3	Warisan/wasiat	-	-	-	-	-
4	Perceraian	-	685	-	498	187
5	Harta Bersama	-	16	-	7	9
6	Perbuatan Melawan Hukum	3	200	3	72	128
7	Ganti Rugi	-	-	-	-	-
8	Lain-lain	3	107	3	81	26
9	Wanprestasi (Objek Sengketa Tanah)	2	156	2	70	86
10	Objek Sengketa Tanah/perbuatan Melawan Hukum	6	219	6	101	118
11	Wanprestasi (Objek Sengketa Bukan Tanah)	-	50	-	35	15
12	Sertifikat/ girik	-	-	-	-	-
13	Hak Asuh Anak	-	5	-	5	-
<b>Jumlah</b>		<b>14</b>	<b>1453</b>	<b>14</b>	<b>875</b>	<b>578</b>

PN Serang

No	Klaasifikasi	Sisa 2022	Masuk 2023	Jumlah Beban	Putus 2023	Sisa 2023
1	Jual Beli Tanah	-	-	-	-	-
2	Jual Beli	-	2	2	-	2
3	Warisan/wasiat	0	1	1	-	1
4	Perceraian	4	26	30	25	5
5	Harta Bersama	-	1	1	1	-
6	Perbuatan Melawan Hukum/Bukan Tanah	-	26	26	20	6
7	Ganti Rugi	-	-	-	-	-
8	Lain-lain	5	12	17	11	6
9	Wanprestasi (Objek Sengketa Tanah)	-	19	19	12	7
10	Objek Sengketa Tanah/perbuatan Melawan Hukum	44	85	129	75	54
11	Wanprestasi (Objek Sengketa Bukan Tanah)	18	12	30	26	4
12	Sertifikat/ girik	-	2	2	-	2
13	Hak Asuh Anak	-	-	-	-	-
14	Objek Sengketa Tanah	1	4	5	4	1
<b>Jumlah</b>		<b>72</b>	<b>190</b>	<b>262</b>	<b>174</b>	<b>88</b>

Pengadilan Negeri Pandeglang

No	Klaasifikasi	Sisa 2022	Masuk 2023	Jumlah Beban	Putus 2023	Sisa 2022
1	Jual Beli Tanah	-	-	-	-	-
2	Jual Beli	-	-	-	-	-
3	Warisan/wasiat	-	-	-	-	-
4	Perceraian	-	-	-	-	-
5	Harta Bersama	-	-	-	-	-
6	Perbuatan Melawan Hukum	5	12	17	14	3
7	Ganti Rugi	-	-	-	-	-
8	Lain-lain	-	-	-	-	-
9	Wanprestasi (Objek Sengketa Tanah)	1	1	2	2	-
10	Objek Sengketa Tanah/perbuatan Melawan Hukum	6	8	14	10	4
11	Wanprestasi (Objek Sengketa Bukan Tanah)	2	7	9	5	4
12	Sertifikat/ girik	-	-	-	-	-
13	Hak Asuh Anak	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>14</b>	<b>28</b>	<b>42</b>	<b>31</b>	<b>11</b>



Pengadilan Negeri Rangkasbitung

No	Klasifikasi	Sisa 2022	Masuk 2023	Jumlah Beban	Putus 2023	Sisa 2023
1	Jual Beli Tanah	-	-	-	-	-
2	Jual Beli	-	-	-	-	-
3	Warisan/wasiat	1	-	1	1	-
4	Perceraian	-	5	5	5	-
5	Harta Bersama	-	-	-	-	-
6	Perbuatan Melawan Hukum	-	5	5	3	2
7	Ganti Rugi	-	-	-	-	-
8	Lain-lain	-	-	-	-	-
9	Wanprestasi (Objek Sengketa Tanah)	1	1	2	1	1
10	Objek Sengketa Tanah/perbuatan Melawan Hukum	10	14	24	14	10
11	Wanprestasi (Objek Sengketa Bukan Tanah)	-	-	-	-	-
12	Sertifikat/ girik	-	-	-	-	-
13	Hak Asuh Anak	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>12</b>	<b>25</b>	<b>37</b>	<b>24</b>	<b>13</b>

5. Data Rekapitulasi Amar Putusan Pada Pengadilan Tinggi Banten

Pidana

No	Wilayah Pengadilan Tinggi	Kategori Amar Putusan				Jumlah
		Menguatkan	Memperbaiki	Membatalkan	Tidak Dapat Diterima	
1	PENGADILAN TINGGI BANTEN	96	60	12	-	168

Perdata

No	Wilayah Pengadilan Tinggi	Kategori Amar Putusan					Jumlah Lain	Jumlah
		Dikuatkan	Diperbaiki	Dibatalkan	Tidak Dapat Diterima	Dicabut		
1	PENGADILAN TINGGI BANTEN	225	28	76	3	1	-	333

**B. PENYELESAIAN PERKARA DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI BANTEN**

**1. JUMLAH SISA PERKARA YANG DIPUTUS**

Berikut ini rincian jumlah sisa perkara yang diputus di Pengadilan Tinggi Banten dan Pengadilan Negeri Sewilayah Banten di tahun 2023.

NO.	SATKER	PERKARA	SISA PERKARA TH.2022	SISA PERKARA TH.2022 YANG DIPUTUS PADA TH.2023	PERSEN-TASE (%) PENYELESAIAN SISA PERKARA	
1.	Pengadilan Tinggi Banten	Pidana	Biasa	6	6	100
			Anak	-	-	-
		Perdata	Tipikor	5	5	100
			Perdata	13	13	100
2.	Pengadilan Negeri Tangerang	Pidana	Biasa	402	402	100
			Cepat	-	-	-
			Anak	5	5	100
		Perdata	Pra Peradilan	2	2	100
			Gugatan	546	468	85.16
			Permohonan	101	94	93.07
			Gugatan Sederhana	19	10	52.63
Perlawanan/Bantahan	23	23	100			
3.	Pengadilan Negeri Serang	Pidana	Biasa	207	207	100
			Cepat	-	-	-
			Anak	5	5	100
			Pra Peradilan	-	-	-
		Perdata	Tipikor	28	28	100
			Gugatan	68	68	100
			Permohonan	18	18	100
			Gugatan Sederhana	7	7	100
Perlawanan/Bantahan	3	3	100			
PHI	29	29	100			
4.	Pengadilan Negeri Pandeglang	Pidana	Biasa	41	41	100
			Cepat	-	-	-
			Anak	-	-	-
		Perdata	Pra Peradilan	-	-	-
			Gugatan	14	14	100
			Permohonan	1	1	100
			Gugatan Sederhana	-	-	-
Perlawanan/Bantahan	-	-	-			
5.	Pengadilan Negeri Rangkasbitung	Pidana	Biasa	10	10	100
			Cepat	-	-	-
			Anak	-	-	-
			Pra Peradilan	-	-	-
		Perdata	Gugatan	12	12	100
			Permohonan	-	-	-
			Gugatan Sederhana	-	-	-
Perlawanan/Bantahan	1	1	100			



2. JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS TEPAT WAKTU

Berikut ini rincian jumlah perkara yang diputus tepat waktu di Pengadilan Tinggi Banten dan Pengadilan Negeri Sewilayah Banten pada tahun 2023.

NO.	SATKER	PERKARA	JUMLAH PERKARA PUTUS TH.2023	JUMLAH PERKARA DIPUTUS TEPAT WAKTU	JUMLAH PERKARA DIPUTUS TIDAK TEPAT WAKTU	PERSENTASE (%) PENYELESAIAN PERKARA DIPUTUS TEPAT WAKTU				
1.	Pengadilan Tinggi Banten	Pidana	Biasa	168	168	-	100			
			Anak	14	14	-	100			
			Tipikor	48	48	-	100			
		Perdata	Perdata	333	333	-	100			
2.	Pengadilan Negeri Tangerang	Pidana	Biasa	2131	2127	4	99.81			
			Cepat	17539	17539	-	100			
			Anak	98	98	-	100			
			Pra Peradilan	22	22	-	100			
		Perdata	Gugatan	1388	788	600	56.77			
			Permohonan	1484	1484	-	100			
			Gugatan Sederhana	107	107	-	100			
			Perlawanan/ Bantahan	21	21	-	100			
			3.	Pengadilan Negeri Serang	Pidana	Biasa	1050	1050	-	100
						Cepat	6	6	-	100
Anak	60	60	-	100						
Pra Peradilan	14	14	-	100						
Tipikor	53	53	-	100						
Perdata	Gugatan	167	81	86	48.50					
	Permohonan	758	758	-	100					
	Gugatan Sederhana	63	63	-	100					
	Perlawanan/ Bantahan	8	8	-	100					
	PHI	115	115	-	100					
4.	Pengadilan Negeri Pandeglang	Pidana	Biasa	253	253	-	100			
			Cepat	4	4	-	100			
			Anak	5	5	-	100			
			Pra Peradilan	2	2	-	100			
		Perdata	Gugatan	31	17	14	54.83			
			Permohonan	37	37	-	100			
			Gugatan Sederhana	12	12	-	100			
			Perlawanan/ Bantahan	-	-	-	-			
5.	Pengadilan Negeri Rangkasbitung	Pidana	Biasa	248	248	-	100			
			Cepat	3	3	-	100			
			Anak	12	12	-	100			
			Pra Peradilan	1	1	-	100			
		Perdata	Gugatan	24	11	15	45.83			
			Permohonan	70	70	-	100			
			Gugatan Sederhana	3	3	-	100			
			Perlawanan/ Bantahan	1	1	-	100			

### 3. JUMLAH PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING, KASASI DAN PK

Berikut ini rincian jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK (Peninjauan Kembali) di Pengadilan Negeri sewilayah Banten pada tahun 2023.

NO.	SATKER	PERKARA	JUMLAH PERKARA PUTUS TH. 2023	JUMLAH PERKARA PUTUS TH. 2023 TIDAK MENGAJUKAN BANDING		JUMLAH PERKARA PUTUS TH. 2023 TIDAK MENGAJUKAN KASASI		JUMLAH PERKARA PUTUS TH. 2023 TIDAK MENGAJUKAN PK	
				JUMLAH	PERSEN TASE (%)	JUMLAH	PERSEN TASE (%)	JUMLAH	PERSEN TASE (%)
1.	Pengadilan Negeri Tangerang	Pidana Biasa	2131	2030	95.26	2088	97.98	2120	99.48
		Pidana Anak	98	97	98.98	96	97.96	90	100
2.	Pengadilan Negeri Serang	Perdata Gugatan	1388	1137	81.92	1213	87.39	1347	97.05
		Pidana Biasa	1050	993	94.57	1026	97.71	1047	99.71
		Pidana Anak	60	52	86.67	56	93.33	60	100
		Pidana Tipikor	53	11	20.75	15	28.30	46	86.79
		Perdata Gugatan PHI	167	127	76.05	135	80.83	157	94.01
		Perdata Gugatan PHI	115	115	100	70	60.87	115	100
3.	Pengadilan Negeri Pandeglang	Pidana Biasa	253	234	92.88	245	96.80	253	100
		Pidana Anak	5	3	60	4	80	5	100
		Perdata Gugatan	31	24	77.41	26	83.87	30	96.77
		Pidana Biasa	248	234	94.35	244	98.39	248	100
4.	Pengadilan Negeri Rangkas-bitung	Pidana Anak	12	12	100	12	100	12	100
		Perdata Gugatan	24	19	79.17	18	75.00	23	95.83

### 4. JUMLAH PERKARA PERDATA YANG BERHASIL DIMEDIASI

Berikut ini rincian jumlah perkara perdata yang berhasil dimediasi di Pengadilan Negeri Sewilayah Banten pada tahun 2023.

NO.	SATKER	JUMLAH PERKARA PERDATA YANG DIMEDIASI DI TH. 2023	STATUS KEBERHASILAN MEDIASI			DALAM PROSES
			BERHASIL	TIDAK BERHASIL	TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN	
1.	Pengadilan Negeri Tangerang	1911	50	567	6	1288
2.	Pengadilan Negeri Serang	140	10	118	1	11
3.	Pengadilan Negeri Pandeglang	26	2	22	-	2
4.	Pengadilan Negeri Rangkas-bitung	19	1	18	-	-



**5. JUMLAH PERKARA ANAK YANG BERHASIL MELALUI DIVERSI**

Berikut ini rincian jumlah perkara pidana anak pada Pengadilan Negeri sewilayah Banten yang berhasil didiversi pada tahun 2023.

NO.	SATKER	JUMLAH PERKARA PIDANA ANAK TH.2023	JUMLAH PERKARA PIDANA ANAK YANG DIDIVERSI TH.2023	STATUS KEBERHASILAN DIVERSI			DALAM PROSES
				BERHASIL	TIDAK BERHASIL	TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN	
1.	Pengadilan Negeri Tangerang	99	46	24	22	53	-
2.	Pengadilan Negeri Serang	57	9	9	-	-	-
3.	Pengadilan Negeri Pandeglang	5	-	-	-	-	-
4.	Pengadilan Negeri Rangkas-bitung	12	-	-	12	-	-

**C. CAPAIAN PRIORITAS NASIONAL**

Capaian priotas Nasional meliputi pengelolaan Posbakum, Sidang Keliling dan Perkara Prodeo yang juga didukung dengan tersedianya anggaran pada DIPA 03 dalam rangka memberikan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu.

**1. POSBAKUM**

Pos Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan memberikan pelayanan pemberian informasi, konsultasi dan nasihat hukum atau membantu pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, serta memberikan referensi mengenai pengacara yang akan mendampingi di persidangan. Pada setiap Pengadilan dibentuk Posbakum Pengadilan dengan menyediakan dan mengelola ruangan dan sarana/prasarana untuk Posbakum. Masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi, hanya perlu menyiapkan dokumen berikut :

1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau KKM/Jamkesmas/Kartu Raskin/PKH/BLT/KPS/ dokumen lain yang memberikan keterangan tidak mampu.
2. Surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh pemohon layanan dan disetujui oleh petugas posbakum.

Pada Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus sebanyak 2.399 perkara yang mendapatkan Pelayanan Posbakum pada tahun 2023. Pada Pengadilan Negeri Serang jumlah masyarakat golongan tertentu yang memperoleh

layanan bantuan hukum selama tahun 2023 adalah sebanyak 728 orang dengan target jumlah Masyarakat golongan tertentu yang memperoleh layanan bantuan hukum sebanyak 155 orang sehingga capaiannya adalah sebesar 469,67% yang artinya secara kuantitas targetnya telah tercapai. Pada Pengadilan Negeri Pandeglang pelaksanaan Posbakum bekerjasama dengan LBH Jatramada dan masyarakat yang memperoleh layanan bantuan hukum sebanyak 66 perkara. Sedangkan pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung pelaksanaan Posbakum sebanyak 54 perkara. Satker di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banten yang mendapatkan alokasi anggaran Posbakum dan realisasinya pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

NO.	SATKER	ANGGARAN POSBAKUM			Jumlah Pencari Keadilan yang dilayani
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	
1.	Pengadilan Negeri Tangerang	33.600.000	33.600.000	100	2.399
2.	Pengadilan Negeri Serang	48.000.000	48.000.000	100	728
3.	Pengadilan Negeri Pandeglang	31.200.000	31.200.000	100	66
4.	Pengadilan Negeri Rangkasbitung	31.200.000	31.200.000	100	54

Kerjasama Posbakum pada PN sewilayah Banten

NO.	SATKER	Nama Lembaga yang bekerjasama
1.	Pengadilan Negeri Tangerang	Yayasan Seyap Bening
2.	Pengadilan Negeri Serang	Pena Keadilan Nusantara
3.	Pengadilan Negeri Pandeglang	Jatramada
4.	Pengadilan Negeri Rangkasbitung	LBH Langit Biru

## 2. SIDANG KELILING/ PELAYANAN TERPADU

Sidang keliling adalah sidang yang dilaksanakan di suatu tempat di luar gedung Pengadilan untuk perkara-perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana. Program ini untuk menjangkau masyarakat yang tinggal di daerah pelosok di mana ada kesulitan untuk menjangkau gedung pengadilan karena hambatan biaya, fisik maupun geografis. Namun demikian, tidak ada alokasi anggaran untuk program tersebut pada satker sewilayah hukum Pengadilan Tinggi



Banten. Pada Pengadilan Negeri Serang, Pengadilan Negeri Pandeglang dan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tidak ada kegiatan sidang keliling selama tahun 2023. Demikian pula pada Pengadilan Negeri Tangerang di tahun 2023 tidak ada melaksanakan sidang keliling / sidang di luar Gedung dikarenakan tidak adanya anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

### 3. PERKARA PRODEO (PEMBEBASAN BIAYA PERKARA)

Berdasarkan Perma No.1 tahun 2014, bahwa layanan pembebasan biaya perkara dilaksanakan melalui pemberian bantuan biaya penanganan perkara yang dibebankan pada anggaran satuan Pengadilan. Program ini ditujukan bagi orang/ sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi. Satker di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banten yang mendapatkan alokasi anggaran Pembebasan Biaya Perkara dan realisasinya pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No.	SATKER	JUMLAH ANGGARAN PERKARA PRODEO (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE (%)	JUMLAH PERKARA PRODEO
1.	Pengadilan Negeri Tangerang	2.010.000	1.360.000	67,66	4
2.	Pengadilan Negeri Serang	1.340.000	-	-	1
3.	Pengadilan Negeri Pandeglang	453.000	202.000	44,59	2
4.	Pengadilan Negeri Rangkasbitung	-	-	-	-

Pada tahun 2023 tidak ada realisasi anggaran perkara prodeo pada Pengadilan Negeri Serang dikarenakan sampai dengan akhir tahun 2023 tidak ada pencari keadilan yang mengajukan perkara dengan pembebasan biaya perkara. Sedangkan jumlah perkara prodeo tahun 2023 pada Pengadilan Negeri Tangerang sebanyak 4 (empat) perkara, yang masuk pada bulan Januari (1 perkara), Maret (1 perkara), Mei (1perkara) dan November (1 perkara). Pada Pengadilan Negeri Pandeglang terdapat 2 perkara prodeo.



### BAB III SUMBER DAYA MANUSIA

Berikut ini rincian komposisi SDM di lingkungan Pengadilan Tinggi Banten berdasarkan kepangkatan, golongan dan pendidikan per Januari 2023.

KETERANGAN		KOMPOSISI SDM SATKER				
		PT BANTEN	PN TANGERANG	PN SERANG	PN PANDEGLANG	PN RANGKAS BITUNG
JUMLAH SDM		98	143	94	37	37
KEPANGKATAN (GOL./RUANG)	Pembina Utama (IV/e)	24	-	-	-	-
	Pembina Utama Madya (IV/d)	1	13	-	-	-
	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	13	4	-	-
	Pembina Tingkat I (IV/b)	2	2	14	-	-
	Pembina (IV/a)	11	15	8	2	2
	Penata Tingkat I (III/d)	22	40	19	9	14
	Penata (III/c)	3	15	8	7	5
	Penata Muda Tingkat I (III/b)	1	10	3	4	2
	Penata Muda (III/a)	4	5	5	3	3
	Pengatur Tingkat I (II/d)	4	2	1	-	-
	Pengatur (II/c)	4	5	4	2	3
	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	-	-	1	-	-
	Pengatur Muda (II/a)	-	-	-	-	-
		Hakim Adhoc	3	-	9	-
	Hakim Yustisial	3	-	-	-	-
	Satpam	4	10	5	3	4
	Pramubakti	11	13	13	7	4
PENDIDIKAN	S3	3	2	2	-	-
	S2	39	49	25	7	7
	S1	32	52	40	15	15
	D3	3	5	4	4	2
	SMA	2	12	3	1	3
	SMP	-	-	1	-	-
	SD	-	-	-	-	-

**1. MUTASI**

**a. Mutasi Masuk**

Mutasi masuk pada Pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banten selama tahun 2023 secara keseluruhan ada 56 orang dengan rincian sebagai berikut :

NO.	SATKER	NAMA	JABATAN	JABATAN SEBELUMNYA (MUTASI DARI)
1.	PT BANTEN	Dr. AHMAD YUNUS, SH, MH	HAKIM TINGGI	HT PT PALEMBANG
2.	PT BANTEN	SYAIFONI, SH, M. HUM.	HAKIM TINGGI	HT PT PADANG
3.	PT BANTEN	ERIS SUDJARWANTO, S.H., M.H.	HAKIM TINGGI	HT PT RIAU
4.	PT BANTEN	BAMBANG SASMITO, S.H.,M.H.	HAKIM TINGGI	HT PT MATARAM
5.	PT BANTEN	GATOT SUSANTO, SH, MH	HAKIM TINGGI	HT PT TANJUNGPINANG
6.	PT BANTEN	PURWONO EDI SANTOSA, S.H., M.H	HAKIM TINGGI	HT PT SUMATERA UTARA
7.	PT BANTEN	BINSAR SIREGAR, S.H., M.Hum.	HAKIM TINGGI	HT PT JAWA BARAT
8.	PT BANTEN	WAHYU PRASETYO WIBOWO, S.H., M.H.	HAKIM TINGGI	HT PT KALIMANTAN TENGAH
9.	PT BANTEN	MUHTAR, S.H.,M.H.	PANITERA	PANITERA PT TANJUNGPINANG
10.	PT BANTEN	BUDI WANTORO, S.H., M.H.	SEKRETARIS	KEPALA BAGIAN
11.	PT BANTEN	AGUS MAULANA, S.H.	PP	PANMUD PERDATA PN RANGKASBITUNG
12.	PT BANTEN	RESYA, S.H., M.H.	PP	PANMUD HUKUM PN PANDEGLANG
13.	PT BANTEN	BOBBY ERTANTO, S.H.	PP	PANMUD PIDANA PN PALANGKARAYA
14.	PT BANTEN	TRI WIDODO, S.H., M.H.	PANMUD PIDANA	PANMUD TIPIKOR PT BANTEN
15.	PT BANTEN	ERWIN EFENDI LOEIS, S.E., S.H., M.H.	PANMUD TIPIKOR	PANITERA PN RANGKASBITUNG
16.	PT BANTEN	HANNY MIRANDA, S.E	ANALIS ORGANISASI	ANALIS PERENCANA PN PANDEGLANG
17.	PN TANGERANG	INDRI MARTINI, S.H., M.H	HAKIM	HAKIM PN BEKASI
18.	PN TANGERANG	BESLIN SIHOMBING, S.H., M.H.	HAKIM	HAKIM PN BEKASI
19.	PN TANGERANG	SANTOSO, S.H., M.H.	HAKIM	HAKIM PN SERANG
20.	PN TANGERANG	ADE KOMARUDIN, S.H.	PP	PP PN JAKARTA BARAT
21.	PN TANGERANG	ETY MEIROHYATI, SH., M.H.	PP	PP PN JAKARTA BARAT
22.	PN TANGERANG	IKHWAN HENDRATO, S.H., M.H.	WKPN	KETUA PN SLEMAN
23.	PN TANGERANG	YANDRI RONI, SH., M.H	HAKIM	HAKIM PN JAMBI
24.	PN TANGERANG	KONY HARTANTO, S.H., M.H.	HAKIM	HAKIM PN DENPASAR
25.	PN TANGERANG	ELI SUSILAWATI, S.H., M.H	JS	PP PN CIKARANG
26.	PN TANGERANG	NURWITA, S.H.	PENGELOLA KEUANGAN	PENGELOLA KEUANGAN PTUN JAKARTA
27.	PN TANGERANG	JONTER SIHOMBING, S.H.,M.H.	PP	PANMUD PERDATA PN GEDONG TATAAN
28.	PN TANGERANG	CANDRA DEWI, S.H.	PP	PP PN KAYUAGUNG
29.	PN TANGERANG	MOUNA CLAUDIA CAMELIA KALIGIS, S.H., M.H	JS	JS PN SULAWESI UTARA
30.	PN TANGERANG	MUHAMMAD YUSUF SALAHUDDIN, S.T., S.H., M.H.	PANMUD HUKUM	PANMUD PERDATA PN DEPOK
31.	PN TANGERANG	HENDRA AZWAR, S.H., M.H	PANMUD PIDANA	PANMUD HUKUM PN BEKASI
32.	PN TANGERANG	MAYANK GANDA SARI, S.H.	APP	APP PT PADANG
33.	PN TANGERANG	IDZNI HAIZANI, A.MD	PENGELOLA PERKARA	PENGELOLA PERKARA PT YOGYAKARTA
34.	PN SERANG	NURHADI, S.H., M.H.	KPN	WK PN SERANG



35.	PN SERANG	RENDRA, S.H., M.H.	HAKIM	HAKIM PN PONTIANAK
36.	PN SERANG	DR. BONY DANIEL, S.H., M.H.	HAKIM	HY MAHKAMAH AGUNG
37.	PN SERANG	EWIRTA LISTA PERTAVIANA, S.H.	HAKIM AD HOC TIPIKOR	HAKIM AD HOC TIPIKOR PN KENDARI
38.	PN SERANG	MARIA SAKURA, S.H.	PP	PP PN PANDEGLANG
39.	PN SERANG	ADANG SUJANA, S.H.	PP	PP PN CIKARANG
40.	PN SERANG	ARI PRASETYO, S.H.	PANMUD HUKUM	PP PN TANGERANG
41.	PN SERANG	RIYANTI DESIWATI, S.H., M.H.	HAKIM	HAKIM NON PALU PT BANDUNG
42.	PN SERANG	MOHAMMAD HOLY ONE NURDIN SINGADIMEDJA, S.H., M.H.	HAKIM AD HOC TIPIKOR	-
43.	PN SERANG	WAHYU WIBAWA, S.H., M.SI	HAKIM AD HOC TIPIKOR	-
44.	PN SERANG	HENDRI IRAWAN, S.H.	HAKIM	HAKIM PN TANJUNGPINANG
45.	PN SERANG	MOCH. ICHWANUDIN, S.H., M.H.	HAKIM	HAKIM PN PONTIANAK
46.	PN SERANG	ASWIN ARIEF, S.H., M.H.	HAKIM	HAKIM PN SABANG
47.	PN SERANG	CUCU MULYANA, S.H.	PP	PP PN KARAWANG
48.	PN PANDEGLANG	AGENG PRIAMBODO PAMUNGKAS, S.H., M.H.	KETUA	WK PN MAJALENGKA
49.	PN PANDEGLANG	AGUS TUNAS SETIAWAN, S.H., M.H.	PANMUD HUKUM	PP PN SERANG
50.	PN PANDEGLANG	FIRDAUS ARYANSYAH, S.H., M.H.	PANMUD PIDANA	PP PN SERANG
51.	PN PANDEGLANG	NUR HIDAYAH, S.H.	PANMUD HUKUM	PP PN SERANG
52.	PN RANGKASBITUNG	AHMAD SYAIROZI, SH.	HAKIM	HAKIM NON PALU PT SULAWESI TENGAH
53.	PN RANGKASBITUNG	HERMAN SIREGAR, S.H., M.H.	WK PN	WK PN KALIANDA
54.	PN RANGKASBITUNG	RAHMAWAN, S.H.	HAKIM	HAKIM PN KUNINGAN
55.	PN RANGKASBITUNG	SANTI INDAH PRATIWI, S.H.	PANMUD PERDATA	PP PN TANGERANG
56.	PN RANGKASBITUNG	AHMAD LETONDOT BASARIN, S.H., M.H.	PANITERA	PANITERA PN LAHAT

#### b. Mutasi Keluar

Mutasi keluar pada Pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banten selama tahun 2023 secara keseluruhan ada 44 orang dengan rincian sebagai berikut :

NO.	SATKER	NAMA	JABATAN	JABATAN BARU (MUTASI KE)
1.	PT BANTEN	VICTOR SELAMAT ZAGOTO, S.H., M.HUM	HAKIM TINGGI	HT PT BANDUNG
2.	PT BANTEN	BINSAR GULTOM SIREGAR, S.H., M.HUM	HAKIM TINGGI	HT PT DKI JAKARTA
3.	PT BANTEN	AGUNG SURADI, S.H.	HAKIM TINGGI	HT PT JAWA TENGAH
4.	PT BANTEN	SUJATMIKO, S.H., M.H.	WAKIL KETUA	KETUA PT PALANGKARAYA
5.	PT BANTEN	Drs. SUTIKNO, M.H.	SEKRETARIS	SEKRETARIS PT KALIMANTAN SELATAN
6.	PT BANTEN	TUTI ALAWIYAH, S.H.	PELAKSANA	KASUBBAG UMUM KEUANGAN PTUN SERANG
7.	PN TANGERANG	ELLY ISTIANAWATI, S.H., M.H.	HAKIM	HAKIM PN JAKARTA BARAT
8.	PN TANGERANG	RUSTIENO, S.H., M.H.	HAKIM	HY PT SEMARANG
9.	PN TANGERANG	ARIE SATRO RANTJOKO, S.H., M.H.	HAKIM	HAKIM PN JAKARTA BARAT
10.	PN TANGERANG	FERDINAND MARCUS LEANDER, S.H., M.H.	HAKIM	HAKIM PN SURABAYA
11.	PN TANGERANG	KHAMIM THOHARI, S.H., M.HUM	WKPN	WKPN PN JAKARTA UTARA
12.	PN TANGERANG	ARIF BUDI CAHYONO, S.H.	HAKIM	HAKIM PN JAKARTA SELATAN



13.	PN TANGERANG	ARI PRASETYO, S.H.	PP	PANMUD HUKUM PN SERANG
14.	PN TANGERANG	SANTI INDAH PRATIWI, S.H.	PP	PANMUD PERDATA PN RANGKASBITUNG
15.	PN TANGERANG	M. TAUFIK, S.H., M.H.	PANMUD PIDANA	PANMUD PIDANA PN JAKARTA TIMUR
16.	PN TANGERANG	MARTIN TURNIP, S.H., M.H.	PANMUD HUKUM	PANMUD TIPIKOR PN JAKARTA PUSAT
17.	PN TANGERANG	IKHWAN HENDRATO, S.H., M.H.	WKPN	WKPN BANDUNG
18.	PN SERANG	DEAH TRI LESTARI, S.H.	HAKIM	HAKIM PN JAKARTA BARAT
19.	PN SERANG	TOTO SAPTO INDARTO, S.H., M.H.	KPN	HT PT BANJARMASIN
20.	PN SERANG	NURHADI, S.H., M.H.	WKPN	KPN SERANG
21.	PN SERANG	SANTOSA, S.H., M.H.	HAKIM	HAKIM PN TANGERANG
22.	PN SERANG	ATEP SOPANDI, S.H., M.H.	HAKIM	HAKIM PN SEMARANG
23.	PN SERANG	SLAMET WIDODO, S.H., M.H.	HAKIM	HAKIM PN JAKARTA UTARA
24.	PN SERANG	AGUS TUNAS SETIAWAN, S.H., M.H.	PP	PANMUD HUKUM PN PANDEGLANG
25.	PN SERANG	ZAMHARI, SH., M.H.	PP	PANMUD HUM PN KAYU AGUNG
26.	PN SERANG	POPOP RIZANTA TIRTA KOESOEMAH, SH, MH	HAKIM	HAKIM PN SRAGEN
27.	PN SERANG	ANTON PRAHARTA, S.H.	PANMUD HUKUM	PANMUD PERDATA PN BOGOR
28.	PN SERANG	DIAH TRI LESTARI, S.H.	HAKIM	HAKIM PN JAKARTA BARAT
29.	PN SERANG	IKHA TINA, S.H., M.HUM.	HAKIM	WAKIL KETUA PN PANGKALAN BUN
30.	PN PANDEGLANG	IDA ADRIANA, S.H.	HAKIM	HAKIM PN KARAWANG
31.	PN PANDEGLANG	AGUNG DARMAWAN, S.H., M.H.	HAKIM	HK YUST MARI
32.	PN PANDEGLANG	ANGGI PRAYURISMAN, S.H.	HAKIM	HK YUST MARI
33.	PN PANDEGLANG	HENDHY EKA CHANDRA, S.H.	HAKIM	HK YUST BAWAS MARI
34.	PN PANDEGLANG	DHITYA KUSUMANING PRAWARNI, S.H., M.H.H	HAKIM	HAKIM PN BANTUL
35.	PN PANDEGLANG	IDIRA PATMI, S.H., M.H.	WAKIL KETUA	KPN PN KAB MADIUN
36.	PN PANDEGLANG	AGUS PRASETYO, S.H., M.H.	PANMUD PERDATA	PANMUD PERDATA PN NGANJUK
37.	PN PANDEGLANG	AGUS TUNAS SETIAWAN, S.H., M.H.	PANMUD HUKUM	PP PT BANTEN
38.	PN PANDEGLANG	INDAH AGUSTINA, S.H., M.H.	PP	PP PN DEPOK
39.	PN PANDEGLANG	RITA SAFITRI, S.H.	PP	PP PN SERANG
40.	PN RANGKASBITUNG	NUR ERVIANTI MELIALA, S.H., M.KN.	WAKIL KETUA	HK YUST BAWAS
41.	PN RANGKASBITUNG	IRIATY KHAIROL UMMAH, S.H.	KETUA	HAKIM PN TANGERANG
42.	PN RANGKASBITUNG	ERWIN EFENDI LOEIS, S.E., S.H., M.H.	PANITERA	PANMUD TIPIKOR PT BANTEN
43.	PN RANGKASBITUNG	AGUS MAULANA, S.H., M.H.	PANMUD PERDATA	PP PT BANTEN
44.	PN RANGKASBITUNG	RETNO TRIHAPSARI, S.H.	PP	PP PN TANGERANG

## 2. PROMOSI

Promosi jabatan SDM pada Pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banten selama tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

NO.	SATKER	NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1.	PT BANTEN	TUTI ALAWIYAH, S.H.	PELAKSANA	KASUBAG UMUM DAN KEUANGAN PTUN SERANG

2.	PN TANGERANG	KHAMIM THOHARI, S.H., M.Hum	WKPN	WKPN PN JAKARTA UTARA
3.	PN TANGERANG	IKHWAN HENDRATO, S.H., M.H	WKPN	WKPN BANDUNG
4.	PN TANGERANG	ARI PRASETYO, S.H	PP	PANMUD HUKUM PN SERANG
5.	PN TANGERANG	SANTI INDAH PRATIWI, S.H	PP	PANMUD PERDATA PN RANGKASBITUNG
6.	PN SERANG	NURHADI, S.H., M.H.	WKPN	KPN SERANG
7.	PN SERANG	AGUS TUNAS SETIAWAN, S.H., M.H.	PP	PANMUD HUKUM PN PANDEGLANG
8.	PN PANDEGLANG	MARIA SAKURA, SH	PP	PP PN SERANG
9.	PN RANGKASBITUNG	NOVA VITRIANIDA, SH	PP	PP PN TANGERANG
10.	PN RANGKASBITUNG	NUR ERVIANTI MELIALA, S.H., M.KN.	WAKIL KETUA	HK YUST BAWAS
11.	PN RANGKASBITUNG	IRIATY KHAIRUL UMMAH, S.H.	KETUA	HAKIM PN TANGERANG
12.	PN RANGKASBITUNG	ERWIN EFENDI LOEIS, S.E., S.H., M.H.	PANITERA	PANMUD TIPIKOR PT BANTEN
13.	PN RANGKASBITUNG	AGUS MAULANA, S.H., M.H	PANMUD PERDATA	PP PT BANTEN
14.	PN RANGKASBITUNG	RETNO TRIHAPSARI, S.H.	PP	PP PN TANGERANG

Selain itu, dapat diinformasikan pula jumlah SDM yang memperoleh kenaikan pangkat selama tahun 2023 pada Pengadilan Tinggi Banten dan Pengadilan Negeri sewilayah Banten adalah sebagai berikut :

➤ **Kenaikan Pangkat :**

NO	SATKER	JUMLAH
1	Pengadilan Tinggi Banten	3 Orang
2	Pengadilan Negeri Tangerang	10 Orang
3	Pengadilan Negeri Serang	11 Orang
4	Pengadilan Negeri Pandeglang	6 Orang
5	Pengadilan Negeri Rangkasbitung	3 Orang

### 3. Pensiun

Data hakim dan pegawai pada Pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banten yang pensiun pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

NO.	SATKER	NAMA	JABATAN	TMT Pensiun	KET.
1.	PT BANTEN	MASRUDDIN CHANIAGO, S.H., M.H.	HAKIM TINGGI	01-01-2023	BUP
2.	PT BANTEN	HASIAMAH DISTIYAWATI, S.H., M.H.	HAKIM TINGGI	01-01-2023	BUP
3.	PT BANTEN	YUNDA HASBI, S.H., M.H.	PANITERA	01-01-2023	BUP
4.	PT BANTEN	BAMBANG IRAWAN, S.H., M.H	HAKIM YUSTISIAL		JANDA/DUDA
5.	PT BANTEN	AGUS GIHARNO	PP	01-08-2023	SENDIRI
6.	PN TANGERANG	KAMARUDDIN SIMANJUNTAK, S.H., M.H.	HAKIM	01-01-2023	BUP



7	PN TANGERANG	AIDA SARASTI, S.H.	PP	01-04-2023	BUP
8	PN TANGERANG	MULYADI, S.H.	JSP	01-04-2023	BUP
9	PN TANGERANG	MARIA THEREIA RETNO	PP	01-05-2023	BUP
10	PN TANGERANG	SUKIMAN, S.H.	PP	01-07-2023	BUP
11	PN TANGERANG	AGUS ISKANDAR, S.H., M.H	HAKIM	01-09-2023	BUP
12	PN TANGERANG	NUNUNG PURWANTI	PENGELOLA PERKARA	01-09-2023	BUP
13	PN TANGERANG	BESTMAN SIMARMATA, S.H.	HAKIM	01-11-2023	BUP
16	PN TANGERANG	BARITA SINAGA, S.H., M.H.	KETUA	01-12-2023	BUP
17	PN TANGERANG	LESTARI NOVINDA GUSTIAH, S.H.	JSP	01-12-2023	BUP
18	PN SERANG	UBADILAH, S.H.	PENGADMINISTRASI	01-12-2023	JANDA/DUDA
19	PN RANGKASBITUNG	NURCAHYO EDI, S.H.	PENGADMINISTRASI PERPUSTAKAAN	01-10-2023	BUP

#### 4. DIKLAT (SDM TEKNIS / NON TEKNIS YANG TELAH MENGIKUTI DIKLAT)

Data hakim dan pegawai di lingkungan Pengadilan Tinggi Banten yang mengikuti diklat teknis dan non teknis selama tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

##### a. Diklat Teknis

NO.	SATKER	NAMA	NAMA DIKLAT
1.	PT BANTEN	RAMLI DARASAH, S.H., M.Hum.	Pelatihan Peningkatan Kompetensi Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Gelombang I
2.	PT BANTEN	KUSRIYANTO, S.H., M.Hum.	Sinergi Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan 2023
3.	PT BANTEN	PURWONO EDI SANTOSA, S.H., M.H.	
4.	PT BANTEN	TRI WIDODO, S.H., M.H	
5.	PT BANTEN	IMAM SUBEKTI, S.H., M.H	
6.	PT BANTEN	MUHTAR, S.H., M.H.	
7.	PT BANTEN	SYAIFONI, SH., M.Hum.	Workshop Manajemen Penanganan Perkara dalam Perspektif KEPPH
8.	PT BANTEN	BAMBANG SASMITO, S.H., M.H.	
9.	PT BANTEN	ERIS SUDJARWANTO, S.H., M.H.	
10.	PT BANTEN	PURWONO EDI SANTOSA, S.H., M.H	
11.	PT BANTEN	GATOT SANTOSO, S.H., M.H.	
12.	PT BANTEN	RAMLI DARASAH, S.H., M.Hum.	
13.	PT BANTEN	LAURENSIUS SIBARANI, S.H.	



14.	PT BANTEN	Dr. AHMAD YUNUS, S.H., M.H.	
15.	PT BANTEN	IRDALINDA, S.H., M.H.	
16.	PT BANTEN	LENDRIATY JANIS, S.H., M.H.	
17.	PT BANTEN	WAHYU PRASETYO WIBOWO, S.H., M.H.	
18.	PN SERANG	LILIK SUGIHARTONO, S.H.	Teknis Sistem Peradilan Anak
19.	PN SERANG	Dr. BONY DANIEL, S.H., M.H.	Pelatihan Tindak Pidana Pajak
20.	PN SERANG	DEDI IRAWAN, S.H.	
21.	PN SERANG	IKHA TINA, S.H., M.Hum.	Sertifikasi Hakim Mediator
22.	PN SERANG	IKHA TINA, S.H., M.Hum.	Sertifikasi Hakim Perselisihan Hubungan Industrial (PHI)
23.	PN SERANG	MOCHAMAD ARIEF ADIKUSUMO, S.H., M.H.	
24.	PN SERANG	NURHADI, S.H., M.H.	Sertifikasi Hakim Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR)
25.	PN SERANG	NELSON ANGKAT, S.H., M.H.	Sertifikasi Hakim Persaingan Usaha
26.	PN SERANG	Dr. BONY DANIEL, S.H., M.H.	
27.	PN SERANG	NURHADI, S.H., M.H.	Pelatihan Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu dan Pilkada
28.	PN SERANG	RIYANTI DESIWANTI, S.H., M.H.	
29.	PN SERANG	NURHADI, S.H., M.H.	Pelatihan Hak Kekayaan Intelektual
30.	PN SERANG	LILIK SUGIHARTONO, S.H.	
31.	PN SERANG	MOCHAMAD ARIEF ADIKUSUMO, S.H., M.H.	
32.	PN SERANG	RENDRA, S.H., M.H.	
33.	PN TANGERANG	BARITA SINAGA	Pleno kelima Kelompok Kerja Penyusunan Penanganan Perkara
34.	PN TANGERANG	ISMAIL HIDAYAT	Pelatihan Teknis Yudisial Perkara Terorisme
35.	PN TANGERANG	AGUNG SUHENDRO	Pelatihan Peningkatan Kopetensi APH dalam Penangan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan
36.	PN TANGERANG	ARI PRASETYO	Pelatihan Peningkatan Kopetensi APH dalam Penangan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan
37.	PN TANGERANG	AHMAD IRFIR ROCHMAN	Pelatihan Sertifikasi Niaga Bidang Kepailitan
38.	PN TANGERANG	KONI HARTANTO	Bimtek Pelayanan Hukum Disabilitas
39.	PN TANGERANG	AHMAD IRFIR ROCHMAN	Sertifikasi Niaga Bidang HAKI

40.	PN TANGERANG	INDRI MURTINI	Pedoman Pemidanaan Penerapan Pasal-Pasal Tertentu dalam UU ITE
41.	PN TANGERANG	MASDUKI	Pedoman Pemidanaan Penerapan Pasal-Pasal Tertentu dalam UU ITE
42.	PN PANDEGLANG	ARLYAN, S.H., M.H	Diklat Pemaknaan Kode Etik dan Pedoman Prilaku Hakim
43.	PN PANDEGLANG	ANGGI PRAYURISMAN, S.H., M.H	Diklat Pemaknaan Kode Etik dan Pedoman Prilaku Hakim
44.	PN PANDEGLANG	ANGGI PRAYURISMAN, S.H., M.H	Bimbingan Teknis Hakim dan Panitera Pengganti
45.	PN PANDEGLANG	PANJI Anowinatha, S.H., M.H	Bimbingan Teknis Hakim dan Panitera Pengganti
46.	PN PANDEGLANG	DITA KUSUMANINGPRAWARNI, S.H., M.H	Bimbingan Teknis Hakim dan Panitera Pengganti
47.	PN PANDEGLANG	SAUDUR DERIT KRISYANNA, S.H., M.H.	Bimbingan Teknis Hakim dan Panitera Pengganti
48.	PN PANDEGLANG	M NANANG GUAWAN	Bimbingan Teknis Hakim dan Panitera Pengganti
49.	PN PANDEGLANG	ARI WAHYUDIANTO	Bimbingan Teknis Hakim dan Panitera Pengganti
50.	PN PANDEGLANG	INDAH AGUSTINA	Bimbingan Teknis Hakim dan Panitera Pengganti
51.	PN PANDEGLANG	DITA KUSUMANINGPRAWARNI, S.H., M.H	Diklat Pemeriksaan Perkara TPPU
52.	PN PANDEGLANG	INDIRA PATMI, S.H., M.H.	Diklat Pemeriksaan Perkara TPPU
53.	PN PANDEGLANG	AGUNG DHARMAWAN, S.H., MH.	Sertifikasi Hakim
54.	PN PANDEGLANG	HENDY EKA CHANDRA, S.H	Diklat Tindak Pidana Pilkada
55.	PN PANDEGLANG	ARLYAN, S.H., M.H	Diklat Tindak Pidana Pilkada
56.	PN RANGKASBITUNG	RANI SURYANI PUSPITASARI, S.H., M.H	Diklat PPA
57.	PN RANGKASBITUNG	DWI NOVITA PURBASARI, S.H.	Diklat PPA
58.	PN RANGKASBITUNG	IRIATY KHAIRUL UMMAH, S.H.	Diklat PPA

**b. Diklat Nonteknis**

NO.	SATKER	NAMA	NAMA DIKLAT
1.	PT BANTEN	NURFITRI, S.KOM.	Pelatihan PJJ PPSPM Angkatan IV
2.	PT BANTEN	HANNY MIRANDA, S.E.	Pelatihan Online Manajemen ASN Angkatan V
3.	PT BANTEN	RIA ANGGARAENI, S.AK	Bimbingan Teknis Aplikasi Catatan atas



4.	PT BANTEN	MONA SOFIA SIBORO, A.Md	Laporan Keuangan (CaLK)
5.	PT BANTEN	NURHAYANI, S.H., M.H.	Pelatihan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Integratif Wilayah di Jakarta, Jawa Tengah, dan Banten Tahun 2023 Angkatan III
6.	PT BANTEN	NURFITRI, S.KOM.	
7.	PT BANTEN	YENI YULIYANI, S.E	
8.	PT BANTEN	NURFITRI, S.KOM.	Bimbingan Teknis/Sosialisasi Kebijakan Pasca Penetapan PMK 210/PMK.05/2022
9.	PT BANTEN	NINIK FAUZIAH, S.SOS	
10.	PT BANTEN	RITA HERMINA TAMARA, S.E	Bimbingan Teknis Implementasi SAKTI terkait Pengelolaan Gaji Web dan E-SKPP
11.	PT BANTEN	NINIK FAUZIAH, S.SOS	
12.	PN SERANG	DILA ANJELIKA, S.E	Kader Bela Negara dan Manajemen Administrasi Peradilan
13.	PN SERANG	DILA ANJELIKA, S.E	Pengadaan Barang dan Jasa
14.	PN TANGERANG	ADHI FIRZIA MIHRAM	Pendampingan pengisian data capaian output belanja K/L Tahunan 2022
15.	PN TANGERANG	M. TAUFAN PUTRA PRATAMA	Pelatihan Pengetahuan Teknis Guna Menghasilkan Laporan Keuangan 2022
16.	PN TANGERANG	DESSY HERLIANI	Pembelajaran Pengendalian Intern Pada Pelaporan Keuangan (PIPK) bagi K/L
17.	PN TANGERANG	DINIARTI MAYACIPTANI	Pembelajaran Pengendalian Intern Pada Pelaporan Keuangan (PIPK) bagi K/L
18.	PN TANGERANG	ZULFIKAR ARIF RAHMAN	Sosialisasi Teknis Penginputan Aplikasi e-Monev Bappenas
19.	PN TANGERANG	ADHI FIRZIA MIHRAM	Sosialisasi Teknis Penginputan Aplikasi e-Monev Bappenas
20.	PN TANGERANG	YUSUF SUSANTO	Sosialisasi Pelayanan Prima
21.	PN TANGERANG	M. TAUFAN PUTRA PRATAMA	Sosialisasi Pengelolaan Jabatan Fungsional
22.	PN TANGERANG	MIRHALIA ANGGRAINI	Elearning Bendahara Penerimaan
23.	PN PANDEGLANG	NITA YUNITA, S.H	Program pembelajaran pengelolaan intern Pelaporan Keuangan
24.	PN PANDEGLANG	IIS SETYAWATI, S.H	Program pembelajaran pengelolaan intern Pelaporan Keuangan
25.	PN PANDEGLANG	SATYA ARI WIBOWO, S.H.	Diklat Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)
26.	PN PANDEGLANG	DINA ULI SAMBOLON, S.H.	Diklat Kepemimpinan Dasar Kader Bela Negara
27.	PN PANDEGLANG	ELVIS REZA ALMANY, S.H., M.H.	Diklat Kepemimpinan Administrator (PKA)



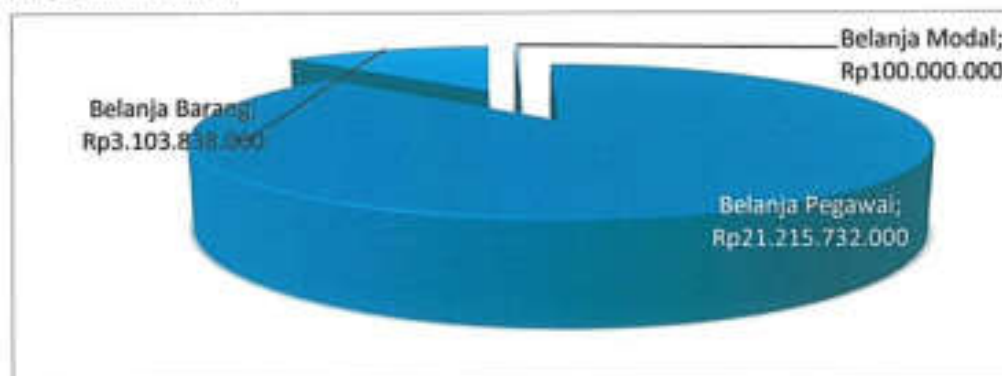
## BAB IV

### PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI

#### A. PENGELOLAAN KEUANGAN

##### 1. Program Dukungan Manajemen

Program Dukungan Manajemen merupakan salah satu program yang ada dalam DIPA 01 (DIPA dari Badan Urusan Administrasi). Komposisi belanja DIPA 01 Pengadilan Tinggi Banten secara keseluruhan pada akhir tahun 2023 dapat dilihat pada grafik berikut.



Pada awal tahun anggaran 2023 Pengadilan Tinggi Banten menerima anggaran dari Badan Urusan Administrasi untuk Program Dukungan Manajemen sebesar Rp24.941.516.000. Adapun perubahan anggaran Program Dukungan Manajemen (DIPA 01) Pengadilan Tinggi Banten selama tahun anggaran 2023 sebagai berikut :

- 1) Pada tanggal 19 Juni 2023 ada revisi antar satker yang dilakukan oleh Mahkamah Agung PT Banten mendapat tambahan anggaran sebesar Rp315.120.000 terdiri dari Belanja Pegawai Tunjangan Hakim Ad Hoc sebesar Rp300.000.000 dan Belanja Sewa sebesar Rp15.120.000 sehingga total anggaran DIPA 01 Pengadilan Tinggi Banten menjadi Rp25.256.636.000
- 2) Pada tanggal 3 September 2023 ada revisi antar satker yang dilakukan oleh Mahkamah Agung PT Banten mendapat pengurangan anggaran sebesar Rp29.716.000 yaitu pengurangan anggaran Bimtek Kesekretariatan oleh Eselon 1 yang sekaligus dengan revisi blokir, sehingga total anggaran DIPA 01 Pengadilan Tinggi Banten menjadi Rp25.226.920.000
- 3) Pada tanggal 23 Oktober 2023 ada revisi antar satker yang dilakukan oleh Mahkamah Agung PT Banten mendapat pengurangan anggaran Belanja Pegawai dan Belanja Barang sebesar Rp814.250.000, sedangkan Belanja Modal mendapat tambahan sebesar Rp100.000.000 sehingga total anggaran DIPA 01 Pengadilan Tinggi Banten menjadi Rp24.412.570.000
- 4) Pada tanggal 27 November 2023 melakukan revisi antar satker berupa tambahan Belanja Barang sebesar Rp7.000.000 sehingga total anggaran DIPA

01 Pengadilan Tinggi Banten menjadi Rp24.419.570.000

- 5) Pada tanggal 7 Desember 2023 melakukan revisi pemutakhiran POK Belanja Pegawai untuk Gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Pada Program Dukungan Manajemen ini terdiri 3 (tiga) macam belanja yaitu :

**a. Belanja Pegawai**

Pada tahun anggaran 2023 pagu untuk belanja pegawai yaitu sebesar Rp21.215.732.000 ( Dua puluh satu milyar dua ratus lima belas juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah). Dan sampai dengan bulan Desember 2023 realisasi sebesar Rp20.777.740.130 ( Dua puluh milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu seratus tiga puluh rupiah) atau sebesar 97,94% dari anggaran dengan sisa sebesar Rp437.991.870 (empat ratus tiga puluh tujuh juta Sembilan ratus Sembilan puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah).



**b. Belanja Barang**

Pada tahun anggaran 2023 pagu untuk belanja barang yaitu sebesar Rp3.103.838.000 (Tiga milyar serratus tiga juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah). Dan sampai dengan bulan Desember 2023 realisasi sebesar Rp3.062.612.951 ( Tiga milyar enam puluh dua juta enam ratus dua belas ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah) atau sebesar 98,67% dari anggaran dengan sisa sebesar Rp41.225.049 (empat puluh satu juta dua ratus dua puluh lima ribu empat puluh sembilan rupiah).





**c. Belanja Modal**

Untuk tahun anggaran 2023, Belanja modal (Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung) pada Pengadilan Tinggi Banten mendapatkan anggaran sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), berupa pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran. Dan sudah direalisasikan sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) atau sebesar 100% dari anggarannya.



Adapun data penyerapan anggaran Program Dukungan Manajemen Mahkamah Agung pada Pengadilan Negeri sewilayah Banten di tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

NO.	SATKER	JENIS BELANJA	JUMLAH (Rp.)			PERSENTASE (%) REALISASI
			PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	SISA (Rp.)	
1.	PN TANGERANG	PEGAWAI	20.281.817.000	20.128.022.730	153.794.270	99,24
		BARANG	3.649.210.000	3.479.584.381	169.625.619	95,35
		MODAL	0	0	0	-
2.	PN SERANG	PEGAWAI	11.873.197.000	11.571.223.308	301.973.692	97,46
		BARANG	2.963.812.000	2.955.292.978	8.519.022	99,71
		MODAL	305.590.000	304.903.800	686.200	99,78
3.	PN PANDEGLANG	PEGAWAI	4.192.720.000	3.855.145.201	337.427.022	91,95
		BARANG	1.468.965.000	1.443.485.569	25.479.431	98,27
		MODAL	0	0	0	-
4.	PN RANGKAS-BITUNG	PEGAWAI	3.035.381.000	2.724.664.821	310.716.179	89,76
		BARANG	1.435.339.000	1.398.908.569	36.430.431	97,46
		MODAL	0	0	0	-

**2. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum**

Pada awal tahun anggaran 2023 Pengadilan Tinggi Banten menerima anggaran dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum untuk Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum sebesar Rp216.444.000,- (Dua ratus enam belas juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang merupakan Belanja Barang.

Sampai dengan bulan Desember 2023 anggaran tersebut sudah terealisasi sebesar Rp213.765.731 (Dua ratus tiga belas juta tujuh ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah) atau sebesar 98,76 % dari anggarannya. Dengan sisa sebesar Rp2.678.269 (dua juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah).



Adapun data penyerapan anggaran Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum pada Pengadilan Negeri sewilayah Banten di tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

NO.	SATKER	JENIS OUTPUT	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE (%) REALISASI
1.	PN TANGERANG	Pos Bantuan Hukum	33.600.000	33.600.000	100
		Perkara hukum perseorangan dan koordinasi	300.000.000	285.655.950	95,22
		Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui pembebasan Biaya Perkara	2.010.000	1.360.000	67,66
2.	PN SERANG	Pos Bantuan Hukum	48.000.000	48.000.000	100
		Perkara hukum perseorangan	502.800.000	473.117.700	94,09
		Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui pembebasan Biaya Perkara	1.340.000	-	0
		Percepatan Penyelesaian Perkara	1.500.000	1.500.000	100
3.	PN PANDEGLANG	Pos Bantuan Hukum	31.200.000	31.200.000	100
		Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui pembebasan Biaya Perkara	453.000	202.000	44,59



4	PN RANG- KASBITUNG	Perkara hukum perseorangan	112.443.000	111.815.000	99,44
		Percepatan Penyelesaian Perkara	1.500.000	1.500.000	100
		Pos Bantuan Hukum	31.200.000	31.200.000	100
		Perkara hukum perseorangan	86.000.000	84.669.500	98,45
		Kimwasmat	1.500.000	1.500.000	100

## B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Pengelolaan sarana dan prasarana Gedung Pengadilan Tinggi Banten meliputi gedung, alat pengolah data dan komunikasi, fasilitas perkantoran, rumah dinas dan kendaraan dinas.

### 1. Sarana dan Prasarana Gedung beserta Fasilitasnya

#### a. Sarana dan Prasarana Gedung

Bahwa gedung kantor Pengadilan Tinggi Banten dibangun pada tahun 2004 dengan beberapa penambahan bangunan pada tahun 2006 dan belum memenuhi bentuk prototype yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung hingga saat ini. Untuk gedung kantor Pengadilan Negeri Serang, Rangkasbitung dan Pandeglang telah memenuhi prototype. Sedangkan untuk gedung kantor Pengadilan Negeri Tangerang masih belum prototype.

Adapun data sarana dan prasarana gedung di lingkungan Pengadilan Tinggi Banten sebagai berikut :

NO.	SARANA/ PRASARANA GEDUNG	SATKER				
		PT BANTEN	PN TANGERANG	PN SERANG	PN PANDEGLANG	PN RANGKAS BITUNG
1.	Ruang Ketua	1	1	1	1	1
2.	Ruang Wakil Ketua	1	1	1	1	1
3.	Ruang Hakim	9	6	9	2	1
4.	Ruang Panitera	1	1	1	1	1
5.	Ruang Sekretaris	1	1	1	1	1
6.	Ruang Kabag	2	1	-	-	-
7.	Ruang Kepaniteraan	4	3	5	3	3
8.	Ruang Kesekretariatan	4	3	3	3	3
9.	Ruang Panitera Pengganti	2	1	3	1	1
10.	Ruang Jurusita	-	1	1	1	1

11.	Ruang Sidang	2	10	7	3	3
12.	Ruang Sidang Anak	-	1	1	1	1
13.	Ruang Arsip	1	3	4	3	2
14.	Ruang Perpustakaan	1	1	1	1	1
15.	Ruang server	1	1	1	1	1
16.	Ruang PTSP	1	1	1	1	1
17.	Ruang Tamu Terbuka	1	5	1	1	1
18.	Pojok E-Court	-	1	1	1	1
19.	Ruang/ Meja Inzage	1	1	1	1	1
20.	Ruang Tunggu Jaksa	-	1	1	1	1
21.	Ruang Tunggu Anak	-	1	1	1	1
22.	Ruang Mediasi	-	4	1	1	1
23.	Ruang Postbakum	-	1	1	1	1
24.	Ruang Tahanan	-	3	1	3	1
25.	Ruang Laktasi	-	1	1	1	1
26.	Ruang Wartawan	-	1	-	-	-
27.	Ruang Barang Bukti	-	-	1	1	-
28.	Ruang Kesehatan	-	1	1	1	1
29.	Lobby	1	1	1	1	1
30.	Mushola	1	3	1	1	1
31.	Gudang	1	9	5	2	1
32.	Pos Jaga	1	2	2	1	1
33.	Pantry	1	-	-	1	-
34.	Ruang Rapat Aula	-	1	-	-	-
35.	Ruang Merokok	-	1	1	-	-

Pengelolaan gedung pada Pengadilan PT Banten di tahun 2023 sebagai berikut :

a. Pengadaan

- Pada tahun 2023 Pengadilan Tinggi Banten tidak terdapat anggaran pengadaan pembangunan gedung. Namun pada tahun berjalan tambahan anggaran belanja modal senilai Rp100.000.000 dari Mahkamah Agung.

b. Pemeliharaan

1. Pengadilan Tinggi Banten

- Selama tahun anggaran 2023 terdapat akun pemeliharaan gedung dan bangunan sebesar Rp527.740.000 (lima ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) telah direalisasikan pemeliharaan gedung dan bangunan dengan nilai sebesar Rp527.656.675 (lima ratus dua puluh tujuh juta enam ratus lima puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh lima Rupiah) dengan persentase sebesar 99,98%;



- Pemeliharaan gedung dan bangunan lainnya dengan nilai sebesar Rp76.600.000 (Tujuh puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) telah direalisasikan pemeliharaan gedung dan bangunan lainnya dengan nilai sebesar Rp76.437.500 (tujuh puluh enam juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan persentase sebesar 99,79%;
2. Pengadilan Negeri Tangerang
- Selama tahun anggaran 2023 terdapat akun pemeliharaan gedung dan bangunan sebesar Rp879.849.000 (delapan ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) telah direalisasikan pemeliharaan gedung dan bangunan dengan nilai sebesar Rp874.250.480 (delapan ratus tujuh puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu empat ratus delapan puluh Rupiah) dengan persentase sebesar 99,36%;
  - Pemeliharaan gedung dan bangunan lainnya dengan nilai sebesar Rp101.800.000 (seartus satu juta delapan ratus ribu rupiah) telah direalisasikan pemeliharaan gedung dan bangunan lainnya dengan nilai sebesar Rp101.760.000 (seartus satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dengan persentase sebesar 99,96%;
3. Pengadilan Negeri Serang
- Selama tahun anggaran 2023 terdapat akun pemeliharaan gedung dan bangunan sebesar Rp937.344.000 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah) telah direalisasikan pemeliharaan gedung dan bangunan dengan nilai sebesar Rp935.278.050 (sembilan ratus tiga puluh lima juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu lima puluh Rupiah) dengan persentase sebesar 99,78%;
  - Pemeliharaan gedung dan bangunan lainnya dengan nilai sebesar Rp75.000.000 telah direalisasikan pemeliharaan gedung dan bangunan lainnya dengan nilai sebesar Rp74.998.890 (tujuh puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) dengan persentase sebesar 99,99%;
4. Pengadilan Negeri Pandeglang
- Selama tahun anggaran 2023 terdapat akun pemeliharaan gedung dan bangunan sebesar Rp361.328.000 (tiga ratus enam puluh satu juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah) telah direalisasikan pemeliharaan gedung dan bangunan dengan nilai sebesar Rp361.308.000 (tiga ratus enam puluh satu juta tiga ratus delapan ribu

- rupiah) dengan persentase sebesar 99,99%;
- Pemeliharaan gedung dan bangunan lainnya dengan nilai sebesar Rp28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah) telah direalisasikan pemeliharaan gedung dan bangunan lainnya dengan nilai sebesar Rp28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah) dengan persentase sebesar 100%;
5. Pengadilan Negeri Rangkasbitung
- Selama tahun anggaran 2023 terdapat akun pemeliharaan gedung dan bangunan sebesar Rp320.236.000 (tiga ratus dua puluh juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) telah direalisasikan pemeliharaan gedung dan bangunan dengan nilai sebesar Rp319.934.660 (tiga ratus Sembilan belas juta Sembilan ratus tiga puluh empat ribu enam ratus enam puluh Rupiah) dengan persentase sebesar 99,91%.
- c. Penghapusan sewilayah banten selama tahun 2023 yaitu :
1. Pengadilan Tinggi Banten usulan penghapusan tahun 2023 telah selesai lelang sebanyak 127 unit, nilai total penghapusan sebesar Rp431.324.183 (empat ratus tiga puluh satu juta tiga ratus dua puluh empat ribu seratus delapan puluh tiga rupiah).
  2. Pengadilan Negeri Tangerang usulan penghapusan tahun 2023 telah selesai lelang sebanyak 127 unit dengan nilai total penghapusan sebesar Rp502.062.740 (lima ratus dua juta enam puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).

**b. Sarana dan Prasarana Alat Pengolah Data dan Komunikasi**

Sarana dan Prasarana alat pengolah data dan komunikasi merupakan alat untuk menunjang kegiatan dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga berjalan lancar. Data sarana dan prasarana alat pengolah data dan komunikasi tersebut dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut:

NO.	SARANA/ PRASARANA ALAT PENGOLAH DATA & KOMUNIKASI	SATKER				
		PT BANTEN	PN TANGERANG	PN SERANG	PN PANDEGLANG	PN RANGKAS BITUNG
1.	Access point	4	4	11	2	-
2.	CCTV	8	9	47	1 (12 titik)	3
3.	Facsimile	1	2	3	1	1
4.	Infocus	1	1	1	1	1
5.	Laptop/note book	40	48	36	25	26
6.	P.C. Unit	40	158	118	74	50



7.	PABX	1	2	-	-	-
8.	Pesawat Telepon	3	-	-	2	1
9.	Printer	43	90	84	30	44
10.	Router	1	1	3	1	1
11.	Scanner	12	26	17	4	1
12.	Server	2	3	4	3	3
13.	Switch hub	2	1	2	12	2
14.	UPS	7	5	4	6	20
15.	Wireless Access Point	1	6	2	8	1
16.	Mesin ketik	-	63	15	2	-

**c. Sarana dan Prasarana Fasilitas Perkantoran**

Sarana dan Prasarana fasilitas perkantoran merupakan sarana dan meubelair baik yang ada di kantor maupun di rumah dinas. Data sarana dan prasarana fasilitas perkantoran tersebut dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut.

NO.	SARANA/ PRASARANA FASILITAS PERKANTORAN	SATKER				
		PT BANTEN	PN TANGERANG	PN SERANG	PN PANDEGLANG	PN RANGKAS BITUNG
1.	A.C. Split	40	58	80	33	38
2.	A.C. Window	-	-	-	-	-
3.	A.C. Central	-	58	11	2	-
4.	A.C. Portable	-	7	-	-	-
5.	Amplifier	-	1	1	-	-
6.	Alat Detektor Barang Terlarang/X- Ray	2	6	1	1	1
7.	Alat Pemotong Kertas	-	3	1	-	-
8.	Alat Pengaman/Sinyal	5	-	-	-	-
9.	Alat rumah tangga lainnya	4	18	-	1	-
10.	Alat Perekam Suara (Voice Pen)	-	-	15	-	-
11.	Bangku Panjang Besi/Metal	5	64	44	17	27
12.	Bangku Panjang Kayu	10	70	118	16	-
13.	Bingkai foto	1	-	-	-	-
14.	Brankas	1	6	5	2	3
15.	Buffet	3	-	8	-	2

16.	Camera Digital	2	1	1	1	2
17.	Digital Keyboard Technics/ Organ	2	-	-	-	-
18.	Dispenser	13	12	2	1	-
19.	Exhaust Fan	2	-	-	-	-
20.	Filing Cabinet Besi	48	39	36	22	20
21.	Gambar Presiden/Wakil Presiden	5	10	-	-	4
22.	Genset	1	2	1	1	1
23.	Gordyn/Kray	5	14	3	1	-
24.	Handycam	-	-	1	-	-
25.	Jam Elektronik	9	-	8	5	-
26.	Jet Pump	2	-	-	-	-
27.	Kaca Hias	19	7	-	-	-
28.	Kasur / Spring bed	12	2	-	-	-
29.	Kipas Angin	5	43	11	2	-
30.	Kompor gas (alat dapur)	4	2	-	-	-
31.	Kursi Besi/Metal	361	1074	610	235	191
32.	Kursi Kayu	13	154	60	34	41
33.	Lambang Garuda Pancasila	7	10	5	3	7
34.	Lambang Instansi	1	238	5	1	1
35.	Layar Film/Proyektor	1	-	-	-	-
36.	LCD Monitor	-	8	1	-	-
37.	Lemari Besi/Metal	43	68	47	52	9
38.	Lemari Es	8	-	7	-	-
39.	Lemari Kayu	77	97	118	19	46
40.	Lensa Kamera	1	1	-	-	-
41.	Loudspeaker	-	8	68	-	1
42.	Meja Kerja Besi/Metal	26	2	32	-	11
43.	Meja Kerja Kayu	110	708	240	114	92
44.	Meja Komputer	23	1	10	7	3
45.	Meja makan kayu	4	7	1	1	-



46.	Meja Rapat	7	22	18	17	-
47.	Meja Resepsionis	4	-	4	-	-
48.	Mesin Absensi	2	1	1	2	2
49.	Mesin Antrian	-	2	3	-	-
50.	Mesin cuci	1	2	-	-	-
51.	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	1	1	1	1
52.	Meubelair lainnya	1	20	-	-	-
53.	Microphone/wireless MIC	2	5	8	8	-
54.	Mimbar/Podium	2	1	-	-	-
55.	Mobile File	-	-	4	-	-
56.	Overhead Projector	1	-	-	-	-
57.	Palu Sidang	1	13	7	-	2
58.	Papan Visual/Papan Nama	11	45	52	9	15
59.	Penyemprot tangan (hand sprayer)	1	-	-	-	-
60.	Pintu Elektrik (akses)	-	5	10	-	-
61.	Rak Besi	16	28	69	19	9
62.	Rak Kayu	10	16	13	11	22
63.	Rak piring alumunium	3	-	-	-	-
64.	Rambu-rambu	1	-	-	-	-
65.	Sice	20	35	31	16	18
66.	Sirine	1	-	-	-	-
67.	Sound System	3	12	6	5	1
68.	Tangki Air	1	-	-	-	2
69.	Tape Recorder	1	4	-	1	-
70.	Televisi	22	25	16	-	-
71.	Tempat tidur kayu	1	1	1	-	-
72.	Tiang Bendera	-	50	15	-	-
73.	Tripod Kamera	1	3	-	-	-
74.	Trolly	1	-	2	-	-
75.	White Board	9	10	13	13	1

76.	Wireless	-	-	24	-	-
-----	----------	---	---	----	---	---

## 2. Rumah Dinas

Berikut ini data rumah dinas Pengadilan Tinggi Banten dan Pengadilan Negeri sewilayah Banten.

NO.	SATKER	RUMAH DINAS	JUMLAH	KONDISI		
				BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT
1.	PT BANTEN	RUMAH DINAS KETUA	1	1	-	-
		RUMAH DINAS WKPT	1	1	-	-
		RUMAH DINAS HAKIM	4	4	-	-
		RUMAH DINAS PANITERA	1	1	-	-
		RUMAH DINAS SEKRETARIS	1	1	-	-
2.	PN TANGERANG	RUMAH DINAS KETUA	1	-	-	-
		RUMAH DINAS WKPN	1	-	-	-
		RUMAH DINAS HAKIM	12	-	1	11
		RUMAH DINAS PANITERA	1	-	1	-
		RUMAH DINAS SEKRETARIS	1	-	1	-
3.	PN SERANG	RUMAH DINAS KETUA	1	1	-	-
		RUMAH DINAS WKPN	1	1	-	-
		RUMAH DINAS HAKIM	7	1	6	-
		RUMAH DINAS PANITERA	1	1	-	-
		RUMAH DINAS SEKRETARIS	-	-	-	-
4.	PN PANDEGLANG	RUMAH DINAS KETUA	1	1	-	-
		RUMAH DINAS WKPN	1	-	-	1
		RUMAH DINAS HAKIM	9	-	-	9
		RUMAH DINAS PANITERA	1	-	-	1
		RUMAH DINAS SEKRETARIS	-	-	-	-
5.	PN RANGKASBITUNG	RUMAH DINAS KETUA	1	1	-	-
		RUMAH DINAS WKPN	1	-	1	-
		RUMAH DINAS HAKIM	5	5	-	-
		RUMAH DINAS PANITERA	1	1	-	-
		RUMAH DINAS SEKRETARIS	-	-	-	-

## 3. Kendaraan Dinas

Berikut ini data kendaraan dinas Pengadilan Tinggi Banten dan Pengadilan Negeri sewilayah Banten.



NO.	SATKER	KENDARAAN DINAS	TAHUN PEROLEHAN	KONDISI				
				BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT		
1.	PT BANTEN	<b>KENDARAAN RODA 4</b>						
		TOYOTA VIOS	2008	✓				
		TOYOTA ALTIS	2005	✓				
		TOYOTA INNOVA	2005	✓				
		TOYOTA INNOVA	2009	✓				
		TOYOTA INNOVA	2011	✓				
		TOYOTA FORTUNER	(SEWA)	✓				
		TOYOTA CAMRY	(SEWA)	✓				
		HIACE	(SEWA)	✓				
		<b>KENDARAAN RODA 2</b>						
		HONDA SUPRA X125	2005	✓				
		HONDA TIGER REVO	2008	✓				
		HONDA TIGER REVO	2008	✓				
		HONDA NEW MEGA PRO CW	2011	✓				
		HONDA WIN	2005	✓				
		2.	PN TANGERANG	<b>KENDARAAN RODA 4</b>				
				TOYOTA FORTUNER	2019	✓		
TOYOTA FORTUNER	2019			✓				
KIJANG INNOVA E	2010			✓				
KIJANG SUPER KF 83 LSX	2003			✓				
TOYOTA FORTUNER	2019			✓				
TOYOTA INNOVA E	2009			✓				
TOYOTA FORTUNER	2019			✓				
<b>KENDARAAN RODA 2</b>								
HONDA GLM II	1997			✓				
HONDA NF 125 SD	2005			✓				
HONDA Megapro	2005			✓				
HONDA NF 125	2004			✓				
HONDA VARIO 125	2022			✓				
HONDA VARIO 125	2022			✓				
HONDA VARIO 125	2022			✓				
HONDA VARIO 125	2022			✓				
HONDA VARIO 125	2023			✓				
HONDA VARIO 125	2023			✓				
HONDA VARIO 125	2023			✓				
HONDA WIN 100 (pinjam pakai dari PEMDA)	1997	✓						
HONDA WIN 100 (pinjam pakai dari PEMDA)	1997	✓						
3.	PN PANDEGLANG	<b>KENDARAAN RODA 4</b>						
		TOYOTA KIJANG LSX	2003	✓				
		TOYOTA INNOVA E	2008	✓				
		TOYOTA FORTUNER (pinjam dari PEMDA)	2019	✓				
		<b>KENDARAAN RODA 2</b>						
		SUZUKI SHOGUN 125 CC	2005			✓		
		SUZUKI SHOGUN 125 CC	2005			✓		
		HONDA SUPRA X 125 CC	2008	✓				
		HONDA MEGA PRO	2007			✓		
HONDA MEGA PRO	2008			✓				

		HONDA MEGA PRO	2008			✓			
		HONDA MEGA PRO	2008			✓			
		HONDA MEGA PRO	2009			✓			
4.	PN SERANG	<b>KENDARAAN RODA 4</b>							
		SEDAN VIOS	2008	✓					
		MINIBUS SUZUKI ESCUDO	2006	✓					
		MINIBUS KIJANG INNOVA	2011	✓					
		MINIBUS ISUZU PANTHER	2002	✓					
		MINIBUS NISSAN XTRAIL (PINJAM PAKAI)	2014	✓					
		MINIBUS INNOVA G (PINJAM PAKAI)	2014	✓					
		PAJERO SPORT (PINJAM PAKAI)	2018	✓					
		MINIBUS INNOVA 2,0 G (PINJAM PAKAI)	2019	✓					
		<b>KENDARAAN RODA 2</b>							
		HONDA NF 125	2005	✓					
		HONDA NF 125	2005	✓					
		SUPRA X 125 R CW	2005	✓					
		SUPRA X 125 R CW	2005	✓					
		HONDA NF 125 D	2005	✓					
		HONDA NF 125	2004	✓					
		HONDA NF 125 SC	2005	✓					
		HONDA MEGA PRO	2011	✓					
		5.	PN RANGKAS-BITUNG	<b>KENDARAAN RODA 4</b>					
				STATION WAGON	2008	✓			
NISSAN XTRAIL	2015			✓					
TOYOTA KIJANG INNOVA	2003			✓					
<b>KENDARAAN RODA 2</b>									
HONDA SUPRA X 125	2009			✓					
HONDA SUPRA X NF125SD	2005			✓					
HONDA SUPRA X NF125SD	2005			✓					
HONDA TIGER	2008								
HONDA MEGA PRO GL	2007			✓					
HONDA MEGA PRO CW	2005								
HONDA KHARISMA X	2004			✓					
HONDA SUPRA NF100	2001								
HONDA WIN MCB	1996								

➤ **Pemeliharaan Sarana dan Prasarana**

Kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana gedung di Pengadilan Tinggi Banten dan Pengadilan Negeri sewilayah Banten di tahun 2023 telah dilaksanakan dengan baik. Adapun kegiatan pemeliharaan gedung, rumah dinas, dan peralatan dan mesin di Pengadilan Tinggi Banten dan Pengadilan Negeri sewilayah Banten selama tahun 2023 dapat terlihat dari realisasi anggaran pada masing-masing akun belanja kegiatan dimaksud sebagaimana tabel berikut:



NO.	SATKER	AKUN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)
1.	PT BANTEN	523111 (pemeliharaan gedung)	527.740.000	246.575.800
		523119 (pemeliharaan rumdin)	76.600.000	62.596.500
		523121 (pem. peralatan/mesin)	328.630.000	213.292.338
2.	PN TANGERANG	523111 (pemeliharaan gedung)	879.849.000	874.250.480
		523119 (pemeliharaan rumdin)	101.800.000	101.760.000
		523121 (pem. peralatan/mesin)	542.009.000	480.632.541
3.	PN SERANG	523111 (pemeliharaan gedung)	937.344.000	935.278.050
		523119 (pemeliharaan rumdin)	75.000.000	74.998.890
		523121 (pem. peralatan/mesin)	366.509.000	365.140.208
4.	PN PANDEGLANG	523111 (pemeliharaan gedung)	361.328.000	361.308.000
		523119 (pemeliharaan rumdin)	28.000.000	28.000.000
		523121 (pem. peralatan/mesin)	144.302.000	144.300.069
5.	PN RANGKAS-BITUNG	523111 (pemeliharaan gedung)	320.236.000	319.934.660
		523119 (pemeliharaan rumdin)	68.880.000	68.805.000
		523121 (pem. peralatan/mesin)	170.824.000	154.301.258

➤ **Pengadaan Sarana dan Prasarana**

Beberapa penambahan sarana dan prasarana di Pengadilan Tinggi Banten dan Pengadilan Negeri Sewilayah Banten tahun 2023 sebagai berikut :

1). Pengadilan Tinggi Banten

Penambahan belanja modal tahun 2023 sebanyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) yaitu lemari toga sebanyak 8 buah dengan nilai Rp24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah), meja kerja kayu sebanyak 8 buah dengan nilai Rp52.000.000 (lima puluh dua juta rupiah), kursi besi/metal sebanyak 8 unit dengan nilai Rp24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah).

2). Pengadilan Negeri Tangerang

Transfer masuk selama tahun 2023 sebanyak Rp39.700.000 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) yaitu Scanner sebanyak 2 Buah dengan nilai Rp39.700.000 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).

Hibah Masuk selama tahun 2023 sebesar Rp5.581.510.800 (lima milyar lima ratus delapan puluh satu juta lima ratus sepuluh tibu delapan ratus rupiah) yaitu:

- Peralatan dan Mesin berupa pompa air sebanyak 1 unit dengan nilai Rp5.068.800 (lima juta enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah), sepeda motor sebanyak 3 unit dengan nilai Rp64.968.000 (enam puluh empat juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah), lemari besi/metal sebanyak 1 unit dengan nilai Rp1.797.000 (satu juta tujuh ratus

- sembilan puluh tujuh ribu rupiah), rak besi sebanyak 2 buah dengan nilai Rp52.640.000 (lima puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah), pintu elektrik (yang memakai akses) sebanyak 2 buah dengan nilai Rp176.000.000 (seratus tujuh puluh enam juta rupiah), meja kerja kayu sebanyak 6 buah dengan nilai Rp32.173.000 (tiga puluh dua juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), A.C. sentral sebanyak 1 buah dengan nilai Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), A.C. split sebanyak 2 buah dengan nilai Rp12.950.000 (dua belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), portable air conditioner (alat pendingin) sebanyak 4 buah dengan nilai Rp114.960.000 (seratus empat belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), televisi sebanyak 1 buah dengan nilai Rp14.650.000 (empat belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), kabel sebanyak 1 buah dengan nilai Rp1.560.000 (satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), bracket standing peralatan sebanyak 1 buah dengan nilai Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah), alat rumah tangga lainnya sebanyak 14 buah dengan nilai Rp54.633.350 (lima puluh empat juta enam ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah), UPS sebanyak 2 buah dengan nilai Rp63.578.900 (enam puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah), camera digital sebanyak 1 buah dengan nilai Rp16.800.000 (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah), P.C unit sebanyak 13 buah dengan nilai Rp188.000.000 (seratus delapan puluh delapan juta rupiah), tablet PC unit sebanyak 1 buah dengan nilai Rp4.000.000 (empat juta rupiah), printer sebanyak 5 buah dengan nilai Rp19.400.000 (sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah), scanner sebanyak 7 buah dengan nilai Rp37.400.000 (tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah), external/portable hardisk sebanyak 3 buah dengan nilai Rp168.333.550 (seratus enam puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah), server sebanyak 1 buah dengan nilai Rp361.284.000 (tiga ratus enam puluh satu juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah), peralatan computer lainnya sebanyak 2 buah dengan nilai Rp8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- Gedung dan bangunan selama tahun 2023 berupa bangunan Gedung kantor permanen sebanyak 1 unit dengan nilai Rp3.930.888.900 (tiga milyar sembilan ratus tiga puluh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah), Gedung pos jaga permanen sebanyak 1 unit dengan nilai Rp48.500.000 (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).



- Lisensi sebanyak 2 buah dengan nilai Rp83.775.000 (delapan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Aset tak berwujud lainnya sebanyak 5 dengan nilai Rp87.649.500 (delapan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

3). Pengadilan Negeri Serang

Penambahan belanja modal tahun 2023 sebanyak Rp304.903.800 (tiga ratus empat juta sembilan ratus tiga ribu delapan ratus rupiah) yaitu Meja kerja kayu sebanyak 6 buah dengan nilai Rp33.759.873 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah), Kursi besi/metal sebanyak 6 buah dengan nilai Rp18.981.000 (delapan belas juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah), Kursi kayu sebanyak 10 buah dengan nilai Rp37.018.722 (tiga puluh tujuh juta delapan belas ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah), partisi sebanyak 1 buah dengan nilai Rp8.436.000 (delapan juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah), Meubelair lainnya sebanyak 2 buah dengan nilai Rp86.708.205 (delapan puluh enam juta tujuh ratus delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah), A.C. Sentral sebanyak 2 buah dengan nilai Rp100.000.000 (seratus juta rupiah), A.C. Split sebanyak 2 buah dengan nilai Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

Transfer masuk selama tahun 2023 sebanyak Rp62.450.000 (enam puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu Laptop sebanyak 1 Buah dengan nilai Rp14.500.000 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah), Printer sebanyak 1 Buah dengan nilai Rp2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), scanner sebanyak 3 Buah dengan nilai Rp45.150.000 (empat puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Hibah Masuk selama tahun 2023 sebesar Rp454.649.990 (empat ratus lima puluh empat juta enam ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) yaitu Mesin fotocopy electronic sebanyak 1 buah dengan nilai Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah), lemari besi/metal sebanyak 6 buah dengan nilai Rp18.000.000 (delapan belas juta rupiah), CCTV sebanyak 1 buah dengan nilai Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah), Meja kerja kayu sebanyak 2 buah dengan nilai Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah), kursi besi/metal sebanyak 2 buah dengan nilai Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah), partisi sebanyak 2 buah dengan nilai Rp43.000.000 (empat puluh tiga juta rupiah), meubelair lainnya sebanyak 4 buah dengan nilai Rp116.999.990 (seratus enam belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah), televisi sebanyak 3 buah dengan nilai

Rp27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah), camera digital sebanyak 2 buah dengan nilai Rp72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah), P.C unit sebanyak 7 buah dengan nilai Rp92.995.000 (sembilan puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), printer sebanyak 8 Buah dengan nilai Rp20.655.000 (dua juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah), scanner sebanyak 1 Buah dengan nilai Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

4). Pengadilan Negeri Pandeglang

Tidak ada belanja modal pada tahun 2023.

5). Pengadilan Negeri Rangkasbitung

Transfer masuk selama tahun 2023 sebanyak Rp24.165.000 (dua puluh empat juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) yaitu CCTV sebanyak 1 Buah dengan nilai Rp4.315.000 (empat juta tiga ratus lima belas ribu rupiah), scanner sebanyak 1 Buah dengan nilai Rp19.850.000 (sembilan belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

> **Penghapusan Sarana dan Prasarana**

Pelaksanaan penghapusan barang milik negara tahun 2023 sebagai berikut:

- a. Pengadilan Tinggi Banten usulan penghapusan tahun 2023 telah selesai lelang sebanyak 127 unit, nilai total penghapusan sebesar Rp431.324.183 (empat ratus tiga puluh satu juta tiga ratus dua puluh empat ribu seratus delapan puluh tiga rupiah), dengan nilai limit sebesar Rp1,673,000 (satu juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), dan risalah lelang nomor 508/22/2023 tanggal 23 agustus 2023 dengan nilai penjualan sebesar Rp5,765,432 (lima juta tujuh ratus enam puluh lima ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah).
- b. Pengadilan Negeri Tangerang usulan penghapusan tahun 2023 telah selesai lelang sebanyak 127 unit, nilai total penghapusan sebesar Rp502.062.740 (lima ratus dua juta enam puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh rupiah). dengan nilai limit sebesar Rp1,673,000 (satu juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), dan risalah lelang nomor 508/22/2023 tanggal 23 agustus 2023 dengan nilai penjualan sebesar Rp5,765,432 (lima juta tujuh ratus enam puluh lima ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah).



## C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Mahkamah Agung telah menerapkan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses peradilan melalui aplikasi e-court dan SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara). Untuk mendukung kelancaran operasional pemanfaatan kedua aplikasi ini, maka Pengadilan Tinggi Banten dan Pengadilan Negeri sewilayah Banten telah menyediakan sarana dan prasarana teknologi informasi yang memadai, yaitu :

NO.	SATKER	SARANA/ PRASARANA PENDUKUNG E-COURT DAN SIPP	JUMLAH (UNIT)
1.	PT BANTEN	<b>PERANGKAT KERAS</b>	
		SERVER	2
		ROUTER	1
		SWITCH	3
		PC (DI PTSP, KEPANITERAAN, PP DAN HAKIM)	29
		LAPTOP (DI PTSP, KEPANITERAAN, PP DAN HAKIM)	27
		<b>PERANGKAT LUNAK</b>	
		CAPOENG NET + 150 MBPS	1
		WEBSITE : <a href="http://pt-banten.go.id/">http://pt-banten.go.id/</a>	1
		2.	PN TANGERANG
SERVER	3		
ROUTER	2		
SWITCH	7		
PC	30		
LAPTOP	20		
<b>PERANGKAT LUNAK</b>			
MORATELINDO + 250 MBPS LOCAL, 50 MBPS INTERNASIONAL, BACK UP RADIO 100 MBPS	1		
WEBSITE : <a href="http://pn-tangerang.go.id/">http://pn-tangerang.go.id/</a>	1		
3.	PN SERANG		
		SERVER	2
		ROUTER	15
		SWITCH	3
		PC	91
		LAPTOP	36
		<b>PERANGKAT LUNAK</b>	
		MILENIUM INTERNET + 100 MBPS	1
		WEBSITE : <a href="http://www.pn-serang.go.id/">http://www.pn-serang.go.id/</a>	1
		4.	PN PANDEGLANG
SERVER	3		
ROUTER	1		
SWITCH	12		
PC	52		

3.	PN RANGKASBITUNG	LAPTOP	18
		<b>PERANGKAT LUNAK</b>	
		PT AWINET GLOBAL MANDIRI (80 MBPS) DEDICATED BANDWITH	1
		WEBSITE : <a href="http://www.pn-pandeglang.go.id/">http://www.pn-pandeglang.go.id/</a>	1
		<b>PERANGKAT KERAS</b>	
		SERVER	3
		ROUTER	1
		SWITCH	2
		PC	52
		LAPTOP	29
<b>PERANGKAT LUNAK</b>			
PT PALAPA MEDIA INDONESIA 100MB DEDICATED	1		
WEBSITE : <a href="http://www.porankasbitung.go.id/">http://www.porankasbitung.go.id/</a>	1		

### 1. Implementasi E-Court

Bahwa untuk mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka Mahkamah Agung telah mengembangkan aplikasi e-court sebagai sarana dalam berperkara di Pengadilan secara elektronik.

E-court adalah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal Pendaftaran Perkara secara online, Taksiran Panjar Biaya secara elektronik, Pembayaran Panjar Biaya secara online, Pemanggilan secara online dan Persidangan secara online mengirim dokumen persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan dan Jawaban). Aplikasi e-Court perkara diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara.

Aplikasi e-court merupakan pelaksanaan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik di Pengadilan. Aplikasi ini, sebagaimana disampaikan Ketua Mahkamah Agung, terdiri dari tiga fitur utama, yakni pendaftaran perkara (e-filing), pembayaran panjar uang perkara (e-payment) dan penyampaian pemberitahuan dan pemanggilan persidangan secara elektronik (e-summons).

Implementasi e-court telah dilaksanakan untuk penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding.

#### a. Implementasi E-Court di Pengadilan Tinggi Banten

Implementasi e-court di Pengadilan Tinggi Banten, yaitu dengan adanya pelayanan verifikasi akun pengguna/ advokat yang mendaftarkan dirinya pada aplikasi e-court. Setiap pengguna/ advokat yang mendaftar untuk mendapatkan akun e-court di wilayah Banten akan diverifikasi oleh Pengadilan Tinggi Banten mengenai keabsahan dokumen yang bersangkutan berupa KTP, KTA organisasi



advokat dan BAS (Berita Acara Sumpah) advokat hingga dinyatakan valid. Berikut data jumlah akun yang sudah terdaftar di e-court wilayah Pengadilan Tinggi Banten :

NO.	URAIAN	JUMLAH S.D. TH 2023 (AKUN PENGGUNA)
1.	Jumlah akun pengguna e-court yang sudah diverifikasi dan valid (terdaftar)	2.346
2.	Jumlah akun yang belum terverifikasi tingkat banding (berkas tidak sesuai)	207

Untuk data perkara banding yang telah di proses melalui e-court di Pengadilan Tinggi Banten selama tahun 2023 ada 32 (tiga puluh dua) perkara, yaitu perkara perdata nomor :

- 1) 29/PDT/2023/PT BTN
- 2) 30/PDT/2023/PT BTN
- 3) 45/PDT/2023/PT BTN
- 4) 49/PDT/2023/PT BTN
- 5) 77/PDT/2023/PT BTN
- 6) 78/PDT/2023/PT BTN
- 7) 109/PDT/2023/PT BTN
- 8) 110/PDT/2023/PT BTN
- 9) 111/PDT/2023/PT BTN
- 10) 138/PDT/2023/PT BTN
- 11) 139/PDT/2023/PT BTN
- 12) 140/PDT/2023/PT BTN
- 13) 182/PDT/2023/PT BTN
- 14) 183/PDT/2023/PT BTN
- 15) 193/PDT/2023/PT BTN
- 16) 215/PDT/2023/PT BTN
- 17) 220/PDT/2023/PT BTN
- 18) 253/PDT/2023/PT BTN
- 19) 257/PDT/2023/PT BTN
- 20) 263/PDT/2023/PT BTN
- 21) 265/PDT/2023/PT BTN
- 22) 266/PDT/2023/PT BTN
- 23) 268/PDT/2023/PT BTN
- 24) 271/PDT/2023/PT BTN
- 25) 282/PDT/2023/PT BTN
- 26) 286/PDT/2023/PT BTN
- 27) 287/PDT/2023/PT BTN
- 28) 291/PDT/2023/PT BTN
- 29) 298/PDT/2023/PT BTN
- 30) 321/PDT/2023/PT BTN
- 31) 325/PDT/2023/PT BTN
- 32) 326/PDT/2023/PT BTN

**b. Implementasi E-Court di Pengadilan Negeri Sewilayah Banten**

Sesuai dengan Perma Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, bahwa untuk perkara perdata di Pengadilan Tingkat Pertama di lingkungan Peradilan Umum sudah dapat dilayani melalui e-court.

Aplikasi ini terdiri dari 4 fitur, yaitu :

- e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan)
- e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online)
- e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online)
- e-Litigation (Persidangan secara online)

**1). Pengadilan Negeri Tangerang**

Aplikasi ini sebagaimana disampaikan Ketua Mahkamah Agung, terdiri dari tiga fitur utama, yakni pendaftaran perkara (e-filing), pembayaran panjar uang perkara (e-payment) dan penyampaian pemberitahuan dan pemanggilan persidangan secara elektronik (e-summons). Berdasarkan Perma diatas, maka ditunjukkan beberapa pengadilan sebagai pilot project pelaksanaan E-Court, salah satunya adalah Pengadilan Negeri Tangerang.

Sampai dengan akhir tahun 2023, jumlah total perkara perdata di Pengadilan Negeri Tangerang yang mendaftar melalui E-Court adalah sebanyak 3.090 perkara dengan jumlah akun pengguna sebagai berikut:

NO.	URAIAN	JUMLAH S.D. TH 2023 (AKUN PENGGUNA)
1.	Jumlah akun pengguna e-court yang sudah diverifikasi dan valid (terdaftar)	4.538
2.	Jumlah akun yang belum valid	0

**2). Pengadilan Negeri Serang**

Seluruh pengadilan tingkat pertama telah dapat mengimplementasikan e-Court hingga e-Litigasi, dan Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA telah dapat mengimplementasikan penggunaan aplikasi tersebut. Untuk perkara gugatan perdata sampai akhir tahun 2023 jumlah pengguna aplikasi e-court internal berjumlah 84 orang. Jumlah pengguna aplikasi e-court eksternal berjumlah 288 pengguna. Adapun jumlah perkara yang sudah mengajukan perkara melalui aplikasi e-court sampai dengan 31 Desember 2023 adalah Gugatan sebanyak 195 perkara, bantahan sebanyak 3 perkara,



Gugatan Sederhana sebanyak 63 perkara, dan permohonan sebanyak 773 perkara dengan jumlah total perkara yang mendaftar melalui ecourt tahun 2023 adalah sebanyak 1034 perkara.

3). Pengadilan Negeri Pandeglang

Pengadilan Negeri Pandeglang telah menerapkan e-Court, hal ini dibuktikan dengan jumlah perkara yang masuk pada tahun 2023 sebanyak 28 (duapuluh delapan) perkara gugatan, 12 (dua belas) perkara gugatan sederhana dan 37 (tiga puluh tujuh) perkara permohonan telah menggunakan e-Court. Di samping itu, untuk mendukung penerapan e-Court pada Pengadilan Negeri Pandeglang, disediakan pula Pojok E-Court yang dapat difungsikan para pencari keadilan untuk keperluan e-Court. Selain terdapat pojok e-Court, penerapan e-Court di Pengadilan Negeri Pandeglang juga didukung oleh petugas yang bersiap untuk membantu jika mengalami kendala dalam mengoperasikan e-Court, serta menjawab informasi e-Court secara keseluruhan.

4). Pengadilan Negeri Rangkasbitung

Pada pengadilan Negeri Rangkasbitung Jumlah perkara yang sudah mengajukan perkara melalui aplikasi *e-court* sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebanyak 100 (seratus) perkara.

Data perkara perdata dari Pengadilan Negeri sewilayah Banten yang mendaftar melalui e-court selama tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

NO.	PERKARA PERDATA MELALUI E-COURT PADA TH. 2022	JUMLAH PERKARA			
		PN TANGERANG	PN SERANG	PN PANDEGLANG	PN RANGKASBITUNG
1.	GUGATAN	1.453	195	23	25
2.	PERMOHONAN	1.478	773	37	71
3.	GUGATAN SEDERHANA	120	63	12	3
4.	BANTAHAN	39	3	-	1
<b>TOTAL</b>		<b>3.090</b>	<b>1.034</b>	<b>72</b>	<b>100</b>

## 2. Implementasi SIPP

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) adalah aplikasi teknologi berbasis web dalam memberikan informasi perkara kepada masyarakat. Selain itu SIPP juga bisa digunakan oleh pimpinan untuk memonitor kinerja hakim di daerah. SIPP dibangun sebagai media kerja yang baik dan efektif bagi internal pengadilan, tertib administrasi, efektif dan efisien, monitoring dan pengawasan dan yang

terpenting adalah media yang memudahkan masyarakat pencari informasi perkara untuk mengupdate informasi perkaranya dengan mudah, cepat dan berbiaya murah.

Aplikasi SIPP versi 4.2.0 pada Pengadilan Negeri sewilayah Banten sudah bisa diakses langsung oleh umum (masyarakat pencari keadilan). Sedangkan untuk aplikasi SIPP versi 4.1.1 pada Pengadilan Tinggi Banten (tingkat banding) baru bisa diakses oleh pihak internal (Pengadilan Tinggi), sehingga bagi masyarakat yang ingin mengetahui data perkara tingkat banding dapat mengajukan permohonan informasi sesuai prosedur yang ada, yaitu melalui pelayanan di meja PTSP.

Pada tanggal 25 April 2018, Ditjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung telah meluncurkan aplikasi MIS SIPP (Aplikasi Monitoring SIPP) untuk memastikan tingkat kepatuhan pengisian data SIPP yang terdiri dari validitas, akurasi dan ketepatan waktu pengisian data SIPP.

Data statistik perkara pada SIPP Pengadilan Tinggi Banten selama Januari s.d Desember 2023 (*terlampir*).

### 3. Implementasi E-Berpadu

Lahirnya aplikasi e-Berpadu tidak terlepas dari Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 239 Tahun 2022. Aplikasi e-Berpadu merupakan perwujudan dari implementasi Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung 239 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Pidana Terpadu Secara Elektronik. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 239 Tahun 2022 merupakan inovasi sekaligus komitmen Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mewujudkan reformasi di dunia peradilan Indonesia yang mensinergikan peran teknologi informasi dengan hukum acara. Kemudahan yang diberikan dalam sistem teknologi canggih sistem pelayanan e-Berpadu menjadi sebuah kebutuhan dalam proses menyelesaikan perkara di pengadilan dengan mobilitas tinggi para pihak berperkara.

e-Berpadu adalah sebuah instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap Kepolisian, Kejaksaan, Rutan (Rumah Tahanan) dan Masyarakat dalam hal pelimpahan berkas perkara pidana secara online, permohonan izin sita secara online, permohonan izin geledah secara online, permohonan perpanjangan penahanan secara online, izin besuk secara online, izin pinjam pakai barang bukti secara online, pembantaran secara online dan diversi secara online.

Penerapan e-Berpadu di Peradilan Umum, terutama di Pengadilan Negeri juga didukung oleh petugas yang bersiap untuk membantu jika mengalami kendala dalam mengoperasikan e-Berpadu, serta menjawab informasi e-Berpadu secara keseluruhan. Adapun data e-Berpadu pada Pengadilan Negeri Tangerang, sejak diberlakukan, sebagai berikut :



No	Jenis layanan	Jumlah Kegiatan			Ket
1	Pelimpahan berkas	21 pelimpahan	2 pengiriman dan perbaikan berkas	2241 perkara terdaftar	
2	Perpanjangan penahanan	16 permohonan	2 Perkara dalam proses	2347 perpanjangan selesai	
3	Penyitaan	38 permohonan	7 perkara dalam proses	4108 perkara selesai	
4	Penggeledahan	31 permohonan	2 Perkara dalam proses	2667 Perkara selesai	
5	Penetapan Diversi	0 permohonan	13 penetapan	1 permohonan ditolak	
6	Izin besuk Tahanan	0 permohonan	0 dalam proses	0 diizinkan	
7	Perpanjangan Penahanan Banding	0 permohonan	0 perbaikan/ dalam proses	14 selesai	
8	Perpanjangan Penahanan MA	0 permohonan	0 perbaikan/dalam proses	0 selesai	

Sedangkan pada Pengadilan Negeri Pandeglang telah menerapkan e-Berpadu, hal ini dibuktikan dengan jumlah penetapan perpanjangan penahanan 335 penetapan yang berhasil, penetapan permohonan izin sita 460 penetapan yang berhasil, penetapan permohonan izin geledah 150 penetapan yang berhasil, penetapan permohonan pembantaran 2 penetapan yang berhasil dan penetapan izin pinjam pakai 12 penetapan yang berhasil selama tahun 2023 (Data Tersebut Per 31 Desember 2023).

## BAB V

### PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

#### A. PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI)

##### a. Zona Integritas Pengadilan Tinggi Banten

Pengadilan Tinggi Banten selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas dan capaian Reformasi Birokrasi, serta Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Pada tahun 2023, Pengadilan Tinggi Banten masuk dalam daftar satuan kerja yang diusulkan WBK oleh Mahkamah Agung melalui surat Plh.Sekretaris Mahkamah Agung nomor 1129/SEK/OT.01.1/6/2023. Meskipun belum bisa meraih WBK, namun pembangunan zona integritas di Pengadilan Tinggi Banten pada tahun 2023 tetap dilaksanakan berdasarkan 6 area yaitu :

1) Manajemen perubahan

Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas melalui SK KPT nomor W29-U/92/KPT/SK/KP.04.5/7/2023 tanggal 7 Juli 2023. Penyusunan rencana dan monev pembangunan ZI, serta pembangunan budaya kerja pelayanan prima.

2) Penataan tata laksana

Pelaksanaan monev SOP (Standar Operasional Prosedur) dan *update* SOP. Pengelolaan SPBE dan keterbukaan informasi publik melalui aplikasi persuratan, E-PPID, website dan sosial media.

3) Penataan system manajemen SDM aparatur

Pelaksanaan penyusunan analisa jabatan, analisa beban kerja, pola mutasi internal untuk pengembangan karir dan pengembangan kompetensi pegawai melalui pengikutsertaan pada diklat. Telah dilakukan penyusunan kinerja individu dan pemberian reward dan punishment yang didasarkan atas penilaian kinerja individu tersebut. Pelaksanaan aturan disiplin telah diimplementasikan untuk semua tingkat jabatan.

4) Penguatan akuntabilitas

Pimpinan terlibat secara langsung pada penyusunan perencanaan. Telah dilakukan upaya perbaikan IKU untuk LKJIP tahun 2023 sehingga IKU telah sesuai dengan indikator kinerja pada SK Sekma Nomor 173 Tahun 2022.



5) Penguatan pengawasan

Dilakukan *public campaign* tentang pengendalian gratifikasi dan anti korupsi pada bulan februari 2023.



Pada Pengadilan Tinggi Banten telah dibangun pengendalian internal, dilakukan *monev* atas pengaduan masyarakat, *whistle blowing system*, dan penanganan benturan kepentingan.

6) Peningkatan kualitas pelayanan publik

Informasi tentang pelayanan di Pengadilan Tinggi Banten mudah diakses

melalui berbagai media. Telah terdapat sistem *reward* dan *punishment* bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar.

#### b. Zona Integritas Negeri Tangerang

Langkah-langkah pembenahan telah dilakukan di PN Tangerang. Sebagai wujud berbagi pengalaman, maka ini mengelompokkan menjadi delapan kegiatan yaitu :

*Pertama* pembinaan/sosialisasi terus menerus. Pembinaan berfungsi memastikan semua hakim dan pegawai bekerja mewujudkan tujuan organisasi. Komitmen pimpinan harus bertransformasi menjadi komitmen bersama. Nilai-nilai pengabdian ditanamkan sehingga merubah budaya kerja (*culture set*) dan pola pikir (*mind set*). Lebih baik pembinaan dilakukan terjadwal, misalnya di PN Tangerang ditentukan Panmud/Kasub melakukan rapat/pembinaan dua kali dalam satu bulan, panitera dan sekretaris sekali dalam satu bulan, rapat bulanan sekali dalam sebulan. Forum khusus pembinaan KPN terhadap pegawai sekali dalam sebulan dan terhadap hakim sebulan dua kali. Tema pembinaan beragam, misalnya tentang moralitas, visi dan misi, renstra, akreditasi, administrasi, ataupun permasalahan hukum. Tentu selaras *quote* "tuliskan apa yang dikerjakan, kerjakan apa yang ditulis" maka semua kegiatan tersebut terdokumentasi.

*Kedua* pembangunan zona integritas. Mengacu Permenpan No. 94 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas, maka pembangunan dimulai dengan penandatanganan piagam pencanangan secara terbuka. Tujuannya agar semua pihak dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan dalam program kegiatan RB, khususnya di bidang pencegahan dan peningkatan pelayanan publik. Seyogyanya penandatanganan piagam disaksikan oleh unsur masyarakat (*perguruan tinggi/LSM*), pihak kepolisian, kejaksaan, dan pihak pemerintah daerah.

*Ketiga* pembenahan sarana pelayanan publik. Pembenahan dapat dimulai dengan menerapkan konsep 5 R (*ringkas, rapi, resik, rawat dan rajin*). Sarana-prasarana harus rapi dan bersih. Sarana yang belum ada diadakan. Tidak harus mewah, tapi cukup membuat nyaman pengguna. Misalnya meja pengaduan, meja informasi, ruang sidang anak, ruang ramah anak, ruang tahanan laki-laki dan perempuan, ruang penuntut umum, ruang advokat, ruang ibu menyusui, ruang mediasi, ruang diversifikasi, ruang kaukus, ruang pengunjung berikut fasilitasnya, ruang



tamu terbuka, ruang Pos Bantuan Hukum, sarana *difable*, tempat parkir pengunjung dan mobil tahanan, serta tempat merokok.

Pembuatan ruangan dapat disiasati dengan memanfaatkan ruang-ruang yang sudah ada. Banner petunjuk pelayanan/penggunaan dan tanda-tanda arah dipajang di tempat yang mudah terlihat. Bila DIPA mengalokasikan, lengkapi dengan televisi di ruang pengunjung, CCTV, tabung pemadam kebakaran ringan (apar) dan genset. Tetapi bila belum, maka segera lakukan perencanaan (*strategic planning*) pengadaannya.

*Keempat* pembenahan administrasi. Acuanya Buku II Pedoman Administrasi Peradilan berikut peraturan-peraturan yang dibuat oleh MA maupun Badilum. Tentu ini telah diterapkan dalam praktek sehari-hari. Misalnya Sema No. 6 Tahun 2014 sering belum diterapkan dan meja informasi tidak sesuai Keputusan Dirjen Badilum No. 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik.

*Kelima* pembuatan dan pengesahan dokumen penjaminan mutu. Dokumen meliputi sasaran mutu, kebijakan mutu, moto, struktur penjaminan mutu, manual mutu, instruksi kerja (IK) manajemen mutu dan SOP tiap unit. Untuk efektifitas maka perlu dibentuk tim penyusun dokumen. Penyusunan SOP berpedoman pada Persekma No. 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan SOP. Pada dasarnya tim penyusun SOP adalah unit yang bersangkutan. Manual mutu atau panduan mutu berisi ruang lingkup sistem manajemen mutu, prosedur terdokumentasi, dan uraian dari interaksi proses-proses (*business process mapping*). Badan peradilan umum telah memberikan contoh manual mutu, sehingga penyusunan tinggal menyesuaikan.

*Keenam* pelaksanaan survei kepuasan masyarakat. Survei Kepuasan Masyarakat merupakan pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan. Pedoman survei terdapat dalam Permenpan No. 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat.

*Ketujuh* audit oleh Pengadilan Tinggi (PT). Sebelum dilakukan audit oleh TAPM-Badilum, maka harus meminta audit oleh PT. Rekomendasi PT harus segera ditindak lanjuti. Apabila PT menganggap pengadilan tingkat pertama memenuhi syarat untuk dilakukan audit akreditasi, maka dapat ditindaklanjuti dengan memohon audit akreditasi TAPM Badilum.

*Kedelapan* audit akreditasi TAPM-Badilum. Semestinya dengan telah dilakukan audit internal dan pre audit PT, maka akan minim ketidaksesuaian. Nilai

A bila mencapai score 700-1000, nilai B score 500-699, nilai C score 300-499 dan nilai D score 0-299.

Lebih lanjut menurut Bapak Hatta Ali, ada lima strategi dalam membangun Zona Integritas, yaitu, pertama komitmen. Pimpinan dan karyawan harus terlibat dalam melaksanakan RB dan menularkan semangat dan visi yang sama. Kedua, kemudahan pelayanan. Semua pihak harus bersemangat dalam memberikan fasilitas yang lebih baik dan meningkatkan hospitality dalam memberikan kepuasan publik, ketiga, ciptakan program yang menyentuh masyarakat. Program-program yang membuat masyarakat lebih dekat dengan lembaga sehingga masyarakat bisa merasakan lembaga tersebut benar-benar hadir. Keempat, monitoring dan evaluasi, dan kelima manajemen media.

Berikut adalah sebagian dari dokumentasi pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Negeri Tangerang :

1. Penandatanganan Pakta Integritas tanggal 9 Januari 2023 Penandatanganan Pakta Integritas ini diikuti oleh seluruh Hakim dan ASN di lingkungan Pengadilan Negeri Tangerang.





2. SK Tim Zona Integritas

Setelah melakukan penandatanganan pakta integritas Langkah selanjutnya adalah membentik Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas. SK pertama Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas adalah No. W29.U4/839/OT.00/1/2023 pada tanggal 21 Januari 2023, kemudian Ketika ada penggantian pimpinan, SK Tim Kembali direvisi yaitu dengan No.W29.U4/5744/OT.01.1.6/2023 tanggal 13 Juni 2023.

3. Public Campaign Zona Integritas 14 Februari 2023

Pada kegiatan ini, Ketua Pengadilan Negeri Tangerang ikut serta dalam Public Campaign dan membagikan stiker Zona Integritas WBK/WBBM.



4. Rapat Monev Pembangunan Zona Integritas pada 27 Januari 2023, 13 Pebruari 2023, 7 Juli 2023

Pengadilan Negeri Tangerang mengadakan rapat monitoring dan evaluasi terhadap Pembangunan Zona Integritas secara berkelanjutan. Unsur pimpinan juga turut serta dalam monitoring dan evaluasi ini



Saat ini Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus telah mempersiapkan berbagai dokumen yang diperlukan terkait dengan 6 (enam) area Zona Integritas. Dokumen-dokumen tersebut telah dikelompokkan pada masing-masing area 1 sampai area 6 yaitu :

1. Manajemen Perubahan

- 1) Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus Nomor W29.U4/839/OT.00/1/2023, tertanggal 21 Januari 2023 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM pada Pengadilan Negeri Tangerang;
- 2) Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus Nomor W29.U4/1297/KP.01.3/10/2023, tertanggal 26 Oktober 2023 tentang Penetapan Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus.

2. Penataan Tata Laksana

- 1) Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus Nomor W29.U4/1048/KP.10.10/8/2023, tertanggal 31 Agustus 2023 tentang Pemberlakuan Standar Operation Procedure (SOP) Kepaniteraan Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 21/DJU/SK/OT.01.3/3/2023 pada Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus;
- 2) Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus Nomor W29.U4/1441/OT.01.3/11/2023, tertanggal 15 Nopember 2023 tentang Struktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus;
- 3) Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus Nomor W29.U4/585/TL.01.3/5/2023, tertanggal 19 Mei 2023 tentang Tata Tertib Pemakaian Seragam Kerja pada Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus.

3. Penataan Sistem Manajemen SDM

- 1) Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus Nomor W29.U4/243/KP.10.10/2/2023, tertanggal 21 pebruari 2023 tentang Penunjukkan Mediator Non Hakim Pada Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus;



- 2) Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus Nomor W29.U4/1411/OT.01.3/11/2023, tertanggal 10 Nopember 2023 tentang Pindahan Pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus;
  - 3) Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus Nomor W29.U4/276/OT.00/02/2023, tertanggal 22 Februari 2023 Tentang Tim Pelaksana Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisa Beban Kerja pada Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus.
4. Penguatan Akuntabilitas
- 1) Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus Nomor W29.U4/460/KP.10.10/4/2023, tertanggal 14 April 2023 tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus Kode Satker 097598;
  - 2) Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus Nomor W29.U4/1422/PS.00/11/2023 tertanggal 10 Nopember 2023 tentang Pembentukan Tim Penerap dan Tim Penilai PIPK pada Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus;
  - 3) Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang kelas 1A Khusus Nomor W29.U4/1646/OT.01.1/12/2023 tanggal 22 Desember 2023 tentang Tim Penyusun Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pengadilan Negeri Tangerang;
  - 4) Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang kelas 1A Khusus Nomor W29.U4/1647/OT.1.2/12/2023 tanggal 22 Desember 2023 tentang Tim Penyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan tahun 2023 pada Pengadilan Negeri Tangerang;
  - 5) Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus Nomor W29.U4/459/KP.10.10/4/2023, tertanggal 14 April 2023 tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus Kode Satker 099077.
5. Penguatan Pengawasan
- 1) Keputusan Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus Nomor W29.U4/1196/KP.10.10/10/2023, tertanggal 6 Oktober 2023

tentang Tim Pelaksanaan Eksekusi dan Kepatuhan Penginputan Data Eksekusi pada Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus;

- 2) Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus Nomor W29.U4/1359/PS.00/11/2023 tertanggal 3 Nopember 2023 tentang Pembentukan Satgas SIPP pada Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus;
- 3) Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang kelas 1A Khusus Nomor W29.U4/1649/PS.00.2/12/2023 tanggal 22 Desember 2023 tentang Penunjukan Tim Penanganan Laporan/ Pengaduan pada Pengadilan Negeri Tangerang;
- 4) Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus Nomor : W29.U4/1384/KP.02.1/11/2023 tertanggal 7 Nopember 2023 tentang Tim Penilai Kinerja Non Pegawai dan Tenaga Kerja Kontrak pada Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus.

#### 6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

- 1) Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus Nomor W29.U4/627/KP.10.10/6/2023, tertanggal 6 Juni 2023 tentang Pemberian Pelayanan Pengadilan negeri Tangerang pada Gedung Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Tangerang Selatan;
- 2) Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus Nomor W29.U4/675/KP.10.10/8/2023, tertanggal 9 Agustus 2023 tentang Pemberlakuan Aplikasi Eksekusi Online Pada Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus;
- 3) Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang kelas 1A Khusus Nomor W29.U4/865/KP.10.10/7/2023 tanggal 20 Juli 2023 tentang Tim Pelaksana dan Penilai Pelayanan Publik pada Pengadilan Negeri Tangerang;
- 4) Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang kelas 1A Khusus Nomor W29.U4/1321/HM.02.1/10/2023 tanggal 31 Oktober 2023 tentang Penunjukan Dewan Pertimbangan, Atasan PPID dan PPID pada Pengadilan Negeri Tangerang;
- 5) Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang kelas 1A Khusus Nomor W29.U4/1441/OT.1.3/11/2023 tanggal 15 Nopember 2023 tentang Struktur pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Tangerang;
- 6) Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang kelas 1A Khusus Nomor W29.U4/1423/PS.00/11/2023 tanggal 10 Nopember 2023 tentang



Pembentukan Tim dan Penetapan Jadwal Briefing pada Petugas Layanan, Kemanan dan Kebersihan pada Pengadilan Negeri Tangerang;

- 7) Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus Nomor W29.U4/458/KP.02.1/4/2023, tertanggal 14 April 2023 tentang Tim Penyusunan Survei Persepsi Korupsi dan Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus.

#### c. Zona Integritas Pengadilan Negeri Serang

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi mempunyai peranan penting dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, berkinerja tinggi, efektif dan efisien, serta pelayanan publik yang berkualitas. Salah satu langkah percepatan Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan adalah melalui Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan instansi pemerintah.

Pengadilan Negeri Serang telah melaksanakan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Pengadilan Negeri Serang telah mengikuti Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas sesuai dengan surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 135/DJU/OT.01.3/1/2023 tanggal 20 Januari 2023, dengan mengisi Lembar Kerja Evaluasi (LKE) ZI sesuai dengan Permenpan Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi.

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1351/SEK/SK.PW1.1.1/12/2023 tentang Penetapan Hasil Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi atau WBK secara Mandiri pada 60 satuan kerja tanggal 4 Desember 2023 tidak terdapat nama Pengadilan Negeri Serang, yang artinya Pengadilan Negeri Serang belum memenuhi kriteria satuan kerja yang memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi di lingkungan Mahkamah Agung RI.

#### d. Pengadilan Negeri Pandeglang

Dalam rangka peningkatan layanan kepada Para Pencari Keadilan Pengadilan Negeri Pandeglang telah dilakukan berbagai upaya peningkatan mutu dan kinerja antara lain dengan pembakuan dan pengembangan Pembangunan Zona Integritas dan upaya perbaikan kinerja yang berkesinambungan baik dalam pelayanan Administrasi Manajemen, Kesekretariatan dan Kepaniteraan.

Pembangunan Zona Integritas merupakan salah satu mekanisme regulasi yang bertujuan untuk mendorong upaya peningkatan mutu dan kinerja pelayanan Pengadilan Negeri. Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Pandeglang, terdapat peran Pengadilan Tinggi Banten sebagai pembina Pengadilan Negeri, peran lembaga independen penyelenggara Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri sebagai penyelenggara Pembangunan Zona Integritas dan peran Pusat sebagai regulator. Penyelenggaraan Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri yang dilakukan oleh lembaga independen tersebut meliputi tahapan Asesmen dan tahapan penetapan Pembangunan Zona Integritas.

Objek dalam pelaksanaan dan penerapan Pembangunan Zona Integritas ini adalah Pengadilan Negeri sesuai dengan Peraturan. Unsur yang dinilai dalam pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri meliputi:

1. Administrasi kepaniteraan,
2. Administrasi kesekretariatan,
3. Administrasi sarana prasarana dan
4. Administrasi manajemen.

Pengadilan Negeri Pandeglang sudah menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas. Tim tersebut sudah melaksanakan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing sesuai dengan standar Pembangunan Zona Integritas. Hasil pelaksanaan tersebut telah dievaluasi dan dimonitoring. Asesmen Internal Pembangunan Zona Integritas dilakukan secara objektif yang didasarkan pada standar dan poin penilaian yang ada pada standar Pembangunan Zona Integritas.

#### **e. Pengadilan Negeri Rangkasbitung**

Dalam rangka peningkatan layanan kepada Para Pencari Keadilan Pengadilan Negeri Rangkasbitung telah dilakukan berbagai upaya peningkatan mutu dan kinerja antara lain dengan pembakuan dan pengembangan Pembangunan Zona Integritas dan upaya perbaikan kinerja yang berkesinambungan baik dalam pelayanan Administrasi Manajemen, Kesekretariatan dan Kepaniteraan.

Pembangunan Zona Integritas merupakan salah satu mekanisme regulasi yang bertujuan untuk mendorong upaya peningkatan mutu dan kinerja pelayanan Pengadilan Negeri. Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Rangkasbitung, terdapat peran Pengadilan Tinggi Banten sebagai pembina Pengadilan Negeri, peran lembaga independen penyelenggara Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri sebagai penyelenggara Pembangunan Zona



Integritas dan peran Pusat sebagai regulator. Penyelenggaraan Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri yang dilakukan oleh lembaga independen tersebut meliputi tahapan Asesmen dan tahapan penetapan Pembangunan Zona Integritas.

Objek dalam pelaksanaan dan penerapan Pembangunan Zona Integritas ini adalah Pengadilan Negeri sesuai dengan Peraturan. Unsur yang dinilai dalam pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri meliputi :

1. Administrasi kepaniteraan,
2. Administrasi kesekretariatan,
3. Administrasi sarana prasarana dan
4. Administrasi manajemen.

Pengadilan Negeri Rangkasbitung sudah menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas. Tim tersebut sudah melaksanakan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing sesuai dengan standar Pembangunan Zona Integritas. Hasil pelaksanaan tersebut telah dievaluasi dan dimonitoring Asesmen Internal Pembangunan Zona Integritas dilakukan secara objektif yang didasarkan pada standar dan poin penilaian yang ada pada standar Pembangunan Zona Integritas

## B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah pelayanan yang dilaksanakan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk layanan pengadilan. Tujuannya mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan dan terukur sesuai standar, serta memberikan pelayanan yang prima, akuntabel dan anti KKN (korupsi, kolusi, nepotisme).

Penerapan PTSP dilaksanakan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri. Selanjutnya diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tanggal 12 November 2019.

Semua pengadilan di lingkungan Peradilan Umum wilayah Banten telah menerapkan PTSP. Adapun tampilan ruang/meja PTSP pada Pengadilan Tinggi Banten dan Pengadilan Negeri sewilayah Banten dapat dilihat pada gambar berikut:

## 1. PTSP PENGADILAN TINGGI BANTEN

Terdapat 3 (tiga) bagian pelayanan, yaitu pelayanan kepaniteraan, pelayanan kesekretariatan dan pelayanan pengaduan. Jumlah surat masuk sebanyak 1.152 surat, jumlah surat keluar sebanyak 998 surat, sedangkan jumlah tamu yang dilayani sebanyak 271 orang.



Setiap senin pagi selalu dilakukan briefing petugas dan penanggungjawab PTSP oleh Hakim Tinggi Pengawas PTSP, Panitera dan Sekretaris.



## 2. PTSP PENGADILAN NEGERI TANGERANG

Terdapat 4 (empat) bagian pelayanan pada PTSP, yaitu pidana, perdata, hukum dan umum. Serta telah disediakan pojok e-court, meja inzage, meja informasi dan pengaduan.

Secara umum Prosedur PTSP dilaksanakan melalui tahapan berikut:

- 1) Pemohon mengambil nomor antrian yang telah disediakan,
- 2) Pemohon wajib memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan untuk setiap layanan peradilan yang dimohonkan dan merupakan dasar untuk pemrosesan serta penyelesaian permohonan layanan,



- 3) Petugas PTSP mencatat, memverifikasi dan meneruskan kelengkapan berkas/dokumen ke backoffice untuk diproses sesuai SOP yang telah ditentukan. Khusus untuk pengadilan-pengadilan dengan jumlah perkara banyak agar menyediakan petugas verifikasi kelengkapan syarat-syarat sebelum diajukan ke meja PTSP.

Pelaksanaan program PTSP ini sangatlah diperlukan komitmen oleh seluruh Pimpinan dan Aparatur Pengadilan secara terintegrasi dalam pelaksanaannya. Oleh sebab itu dalam rangka mewujudkan keberhasilan pelaksanaan PTSP tersebut, maka haruslah terdapat kualifikasi tertentu dalam hal standarisasi pelayanan yang harus dimiliki oleh seluruh petugas PTSP, yang antara lain sebagai berikut:

- 1) Memahami Standar Layanan Pengadilan, prosedur administrasi maupun prosedur beracara di Pengadilan untuk setiap jenis perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri,
- 2) Memahami profil pengadilan seperti struktur organisasi dan persidangan, peraturan, keputusan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum,
- 3) Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer,
- 4) Memiliki kemampuan komunikasi yang baik, bersikap sopan dan ramah, serta berpenampilan rapi.

Adapun pembuatan surat keterangan yang sudah menggunakan ERATERANG pada Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus sebanyak 2.649 surat.



### 3. PTSP PENGADILAN NEGERI SERANG

Terdapat 6 (enam) bagian pelayanan pada PTSP, yaitu Tipikor, PHI, Pidana, Perdata, Hukum dan Umum. Serta telah disediakan pojok e-court, meja inzage, meja informasi dan pengaduan.



Struktur PTSP adalah Ketua Pengadilan Negeri sebagai Atasan Pejabat Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pejabat Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Panitera dan Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Penanggungjawab pelaksanaan pada setiap Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah masing-masing Panitera Muda dan seluruh Kepala Bagian/Sub Bagian pada Kesekretariatan. Sedangkan petugas pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah pegawai atau staf Kepaniteraan Muda Perdata / Pidana yang bertugas pada meja 1, staf Kepaniteraan Muda Hukum dan staf pada Bagian/Sub Bagian Umum dan Keuangan. Pengawas adalah pejabat yang ditunjuk melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya pelayanan pada PTSP, minimal 2 (dua) kali dalam sehari serta membuat laporan hasil pengawasan kepada Ketua Pengadilan setiap bulannya.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA telah menggunakan aplikasi PTSP+ dan Surat Keterangan Elektronik (eraterang) sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA RI Nomor: 44/DJU/SK/HM.02.3/2/2019 tanggal 15 Februari 2019 tentang Pemberlakuan Aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP+) dan Surat Keterangan Elektronik (eraterang) di Lingkungan Peradilan Umum. Jumlah surat masuk tahun 2023 adalah sebanyak 3.818 surat, surat keluar tahun 2023 adalah sebanyak 5.620 surat, surat keterangan sebanyak



1.889 surat dan tamu yang berkunjung menemui pegawai Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA selama tahun 2023 adalah sebanyak 116 orang. Sementara pembuatan surat keterangan dari data sebanyak 1.969 surat yang menggunakan era terang saat pengajuannya adalah sebanyak 1.889 surat. Data tersebut berdasarkan data yang terinput pada aplikasi pelayanan terpadu satu pintu+ pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA per 31 Desember 2023.

Pelayanan meja informasi kepada publik Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA dilaksanakan menyatu pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), sampai dengan 31 Desember 2023 jumlah layanan informasi tahun 2023 adalah sebanyak 61 layanan, dengan status permohonan telah diproses secara keseluruhan.

#### 4. PTSP PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG

Terdapat 4 (empat) bagian pelayanan pada PTSP, yaitu pidana, perdata, hukum, umum. Serta telah disediakan pojok e-court, meja inzage, meja informasi dan pengaduan.



Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pengadilan Negeri Pandeglang terdiri dari empat petugas yang terdiri dari :

1. Petugas Kapaniteraan Muda Pidana, yang memiliki tugas melayani :
  - Menerima pelimpahan berkas perkara pidana biasa, cepat /lalu lintas dari Penuntut Umum / Penyidik
  - Menerima pendaftaran permohonan praperadilan
  - Menerima permohonan perlawanan, banding, kasasi, peninjauan kembali dan grasi
  - Menerima permohonan pencabutan perlawanan, banding, kasasi dan peninjauan kembali

- Menerima permohonan izin/persetujuan penggeledahan dan menyerahkan izin/persetujuan penggeledahan yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan
  - Menerima permohonan izin/persetujuan penyitaan dan menyerahkan izin/persetujuan penyitaan yang sudah ditandatangani oleh Ketua Pengadilan
  - Menerima permohonan perpanjangan penahanan dan menyerahkan penetapan perpanjangan penahanan yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan
  - Menerima permohonan pembantaran dan menyerahkan persetujuan pembantaran yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan
  - Menerima permohonan dan menyerahkan izin berobat bagi Terdakwa yang telah ditandatangani Ketua Pengadilan
  - Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian perkara pidana
2. Petugas Kepaniteraan Muda Perdata, yang memiliki tugas melayani :
- Menerima Pendaftaran perkara gugatan biasa
  - Menerima Pendaftaran perkara gugatan sederhana
  - Menerima pendaftaran perkara perlawanan/bantahan
  - Menerima Pendaftaran verzet atas putusan verstek
  - Menerima Pendaftaran perkara permohonan
  - Menerima Pendaftaran permohonan banding, kasasi dan peninjauan kembali
  - Menerima memori/kontra memori banding, kasasi dan peninjauan kembali
  - Menerima permohonan pengembalian sisa panjar biaya perkara
  - Menerima Permohonan dan pengambilan turunan putusan
  - Menerima Pendaftaran permohonan eksekusi
  - Menerima Pendaftaran permohonan konsinyasi
  - Menerima Permohonan pengambilan uang hasil eksekusi dan uang konsinyasi
  - Menerima Permohonan pencabutan gugatan, permohonan, banding, kasasi, peninjauan kembali dan eksekusi
  - Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian perkara perdata
3. Petugas Kepaniteraan Muda Hukum, yang memiliki tugas melayani :
- Permohonan pendaftaran pendirian CV
  - Permohonan waarmarking surat-surat



- Surat permohonan surat keterangan tidak tersangkut perkara pidana dan perdata
  - Permohonan surat izin yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan untuk melaksanakan penelitian dan riset
  - Permohonan keterangan data perkara dan turunan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap
  - Permohonan pendaftaran surat kuasa
  - Permohonan legalisasi surat
  - Permohonan informasi dan memberikan informasi sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144 Tahun 2022
  - Permohonan informasi kepada pimpinan atau pegawai tertentu apabila diperlukan untuk menyediakan informasi yang diminta pemohon
  - Informasi jadwal persidangan setiap hari kepada para pihak yang berkepentingan
  - Penanganan pengaduan/SIWAS-MARI
  - Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan pelayanan jasa hukum
- Pada Tahun 2023 Pengadilan Negeri Pandeglang sudah menggunakan Aplikasi eraterang, hal ini dibuktikan dari total 897 pembuatan surat keterangan sudah menggunakan Aplikasi eraterang. Petugas Sub Bagian Umum dan Keuangan, yang memiliki tugas menerima dan menyerahkan seluruh surat-surat yang ditujukan dan yang dikeluarkan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Pandeglang

#### 5. PENGADILAN NEGERI SERANG RANGKASBITUNG

Terdapat 4 (empat) bagian pelayanan pada PTSP, yaitu pidana, perdata, hukum, umum. Serta telah disediakan pojok e-court dan meja inzage.



Secara umum Prosedur PTSP dilaksanakan melalui tahapan berikut:

5. Pemohon mengambil nomor antrian yang telah disediakan
6. Pemohon wajib memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan untuk setiap layanan peradilan yang dimohonkan dan merupakan dasar untuk pemrosesan serta penyelesaian permohonan layanan
7. Petugas PTSP mencatat, memverifikasi dan meneruskan kelengkapan berkas/dokumen ke backoffice untuk diproses sesuai SOP yang telah ditentukan. Khusus untuk pengadilan-pengadilan dengan jumlah perkara banyak agar menyediakan petugas verifikasi kelengkapan syarat-syarat sebelum diajukan ke meja PTSP

Pelaksanaan program PTSP ini sangatlah diperlukan komitmen oleh seluruh Pimpinan dan Aparatur Pengadilan secara terintegrasi dalam pelaksanaannya. Oleh sebab itu dalam rangka mewujudkan keberhasilan pelaksanaan PTSP tersebut, maka haruslah terdapat kualifikasi tertentu dalam hal standarisasi pelayanan yang harus dimiliki oleh seluruh petugas PTSP, yang antara lain sebagai berikut:

1. Memahami Standar Layanan Pengadilan, prosedur administrasi maupun prosedur beracara di Pengadilan untuk setiap jenis perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi / Pengadilan Negeri,
2. Memahami profil pengadilan seperti struktur organisasi dan persidangan, peraturan, keputusan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum,
3. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer,
4. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik, bersikap sopan dan ramah, serta berpenampilan rapi.

Untuk Tahun 2023 Pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung total masuk surat keterangan melalui Eraterang adalah 342 surat keterangan.

### C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Inovasi Pelayanan publik menjadi poin penting dalam implementasi program Reformasi Birokrasi (RB) dan Zona Integritas (ZI) dari Pemerintah sebab inovasi diciptakan untuk mempermudah urusan masyarakat dan sebagai tanda majunya suatu bangsa.

#### a. Inovasi Pelayanan Publik pada Pengadilan Tinggi Banten

Pengadilan Tinggi Banten telah membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona



Integritas, terakhir berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banten nomor W29.U/136/KPT/SK/KP.04.5/12/2022 tanggal 19 Desember 2022.

Beberapa inovasi pelayanan publik yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Banten, yaitu:

Bersifat Eksternal :

- Adanya e-PPID sebagai sarana layanan *online* bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Pengadilan Tinggi Banten, adanya meja inzage untuk pihak yang ingin memeriksa/ mempelajari berkas perkara dan telah tersedianya mesin / layar touchscreen IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) yang tersedia di meja PTSP.
- Adanya SIPERAD (Sistem Pendaftaran Penyempahan Advokat). Aplikasi ini mempermudah para calon Advokat yang ingin mengajukan permohonan penyempahan Advokat.
- Adanya Sosial Media berupa Instagram @pt-banten.go.ig, Facebook pengadilan tinggi banten yang menampilkan semua kegiatan yang dilakukan pengadilan Tinggi Banten (seperti pelantikan Advokat dll) untuk persidangan bisa dilihat di website Pengadilan Tinggi Banten [www.pt-banten.go.id](http://www.pt-banten.go.id).
- Adanya E-Library atau SIPUS yaitu Sistem Informasi Perpustakaan Pengadilan Tinggi Banten.
- Adanya SURVEY yaitu untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan Pengadilan Tinggi Banten.
- Adanya siSUPER yaitu Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik yang berisi Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK), Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Survei Harian (SH).
- Adanya E-PERMOHONAN Riset yaitu sarana layanan online bagi publik yang membutuhkan data dari Pengadilan Tinggi Banten untuk keperluan melakukan riset/penelitian.

Bersifat Internal :

- Adanya SI-ANGPAW yaitu Sistem Informasi Pelaksanaan Anggaran Asisten Virtual Berbasis WhatsApp Pengadilan Tinggi Banten. Sistem ini berisi Informasi tentang :
  1. Slip Gaji dan Uang Makan
  2. Remunerasi
  3. Transport Hakim
  4. Realisasi Anggaran

5. Pinjaman BRI
6. Pinjaman Koperasi

Aplikasi ini dibuat oleh Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan Pengadilan Tinggi Banten.

- Adanya PTSP Aplikasi untuk proses pengelolaan surat masuk dan keluar pengadilan tinggi banten, dimulai dari penerimaan di meja PTSP kemudian di input diaplikasi PTSP, yang langsung bisa didisposisikan dalam aplikasi tersebut sampai dengan surat tersebut diterima oleh bagian / pegawai. Aplikasi ini dibuat oleh kantor agar mempermudah proses alur surat masuk dan keluar.

#### **b. Inovasi Pelayanan Publik pada Pengadilan Negeri Tangerang**

Pada hakikatnya Reformasi Birokrasi adalah "Upaya untuk melakukan perubahan dan pembaruan yang mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang menyangkut beberapa aspek". Mahkamah Agung dimulai pada tahun 2003 ketika Mahkamah Agung meluncurkan Cetak Biru pembaruan terdapat beberapa Cetak Biru antara lain:

- Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung.
- Cetak Biru Pembaruan Pendidikan & Latihan Peradilan
- Cetak Biru Pembaruan SDM Peradilan
- Cetak Biru Pembaruan Manajemen Keuangan Peradilan

Pada tahun 2007 Mahkamah Agung ditunjuk sebagai salah satu Lembaga Negara yang melaksanakan Pilot Project Reformasi Birokrasi. Berdasarkan Perpres Nomor 19 Tahun 2008 maka Mahkamah Agung menerima 70% Tunjangan Kinerja, pada tataran implementasinya Perpres tersebut dikelola dengan SK KMA Nomor 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus. Beberapa program Quick Wins RB / Akselerasi Perubahan yang meliputi Transparansi Putusan Peradilan yaitu:

- a. Pengembangan Teknologi Informasi;
- b. Pengelolaan PNBK;
- c. Kode Etik Hakim;
- d. Manajemen SDM.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No.1817/DJU/SK.TI2.1.2/XI/2023 tanggal 30 Nopember 2023 Tentang Penetapan Pemenang Lomba Bagi Satuan Kerja di Lingkungan Peradilan Umum Tahun 2023, Pengadilan Negeri Tangerang memperoleh Piagam penghargaan



Pemenang Lomba Inovasi Tahun 2023 dan Juara Harapan II dalam kategori Lomba Layanan Pengadilan/PTSP.

Inovasi Pengadilan Negeri Tangerang yang mendapat Piagam penghargaan adalah Aplikasi e-laksa. E-laksa adalah layanan yang memungkinkan pihak bisa mengajukan permohonan pelaporan pencatatan sipil rangka penerbitan dokumen kependudukan melalui inovasi Pengadilan Negeri Tangerang. Dengan inovasi ini layanan paripurna bisa diberikan di Pengadilan Negeri Tangerang. Aplikasi ini memfasilitasi jenis pelaporan pencatatan sipil : Pembatalan Perkawinan, Perceraian, Pembatalan Perceraian, Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak, Perubahan Nama

Selain itu, inovasi yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus adalah Si Cuplis dan Si Kentang. SICUPLIS Sistem Cuti Pegawai Lewat Aplikasi, merupakan aplikasi administrasi cuti pegawai berbasis online untuk internal Pengadilan Negeri Tangerang. SIKENTANG Sistem Keuangan Pengadilan Negeri Tangerang, merupakan aplikasi administrasi keuangan berbasis online untuk internal Pengadilan Negeri Tangerang.

#### **c. Inovasi Pelayanan Publik pada Pengadilan Negeri Serang**

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik tahun 2023 Pengadilan Negeri Serang menambah AC Split, AC Central, dan Meubelair Persidangan, hal tersebut juga mendukung meningkatnya kinerja dalam memberikan pelayanan yang prima dan tercapainya tujuan Pengadilan Negeri Serang proses penyelesaian perkara yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Selain pengadaan sarana dan prasarana, tahun 2023 Pengadilan Negeri Serang melanjutkan mengimplementasikan aplikasi e-Berpadu. Aplikasi e-Berpadu merupakan aplikasi yang bertujuan sebagai berikut :

- a. Terwujudnya sistem administrasi penanganan perkara pidana berbasis teknologi informasi;
- b. Memangkas birokrasi dan terciptanya efektivitas dalam layanan acara perkara pidana;
- c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi bagi para aparat penegak hukum, masyarakat pencari keadilan dan Penasihat Hukum ;
- d. Meminimalisir tatap muka dan meminimalisir adanya penyimpangan;
- e. Memudahkan koordinasi antar aparat penegak hukum, kerja sama antar aparat penegak hukum dalam menjalankan kegiatan yang berkaitan dengan teknis operasional pelayanan publik dan/atau pendukung pelayanan publik.

Aplikasi e-Berpadu disosialisasikan pada tanggal 27 September 2022 kepada seluruh aparat penegak hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Serang, dan diimplementasikan pada tanggal 5 Desember 2022, sampai dengan 31 Desember 2023 aplikasi e-Berpadu telah mengimplementasikan seluruh fitur yang terdapat dalam aplikasi e-Berpadu. Sejak implementasi sampai dengan 31 Desember 2023 jumlah pelimpahan berkas sebanyak 730 perkara, jumlah perpanjangan penahanan sebanyak 1.042 berkas, jumlah ijin penyitaan sebanyak 1.676 surat, jumlah ijin pengeledahan yang diproses sebanyak 606 surat, izin besuk yang di proses sebanyak 2 surat, permohonan pembantaran tahanan sebanyak 0 perkara, diversifikasi sebanyak 10 penetapan, ijin perpanjangan penahanan tingkat banding sebanyak 101 surat penetapan, permohonan izin pinjam pakai sebanyak 1 surat, laporan berkas pra peradilan sebanyak 5 surat, permohonan penangguhan penahanan sebanyak 0 dan fitur pengalihan penahan sebanyak 1 surat.

Pengadilan Negeri Serang berkomitmen akan terus berupaya menciptakan inovasi baik yang sifatnya sebagai turunan dari inovasi atau kebijakan pimpinan maupun inovasi yang sifatnya murni

#### d. Inovasi Pelayanan Publik pada Pengadilan Negeri Pandeglang

Dimulai Pada Tanggal 03 Januari 2023 Pengadilan Negeri Pandeglang Mengembangkan Beberapa Aplikasi Inovasi Untuk Pelayanan Publik Pengadilan Negeri Pandeglang diantaranya adalah :

1. Aplikasi Nomor Layanan SIKAT (Komunikasi Dan Informasi Masyarakat)

**bangga melayani bangsa**

**PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG**

**BerAKHLAK**  
BerAKHLAK adalah komitmen dan tanggung jawab kami dalam melayani masyarakat.

Halo Sobat Pengadilan,  
Pengadilan Negeri Pandeglang saat ini telah memiliki layanan terbaru, yaitu Layanan SIKAT. Apa itu Layanan SIKAT?  
Layanan SIKAT adalah Nomor Layanan Komunikasi dan Informasi Masyarakat. Nomor layanan SIKAT dapat dipergunakan untuk melakukan aktivitas percakapan (chatting), panggilan telepon maupun panggilan video (video call) guna keperluan penyampaian informasi Pengadilan kepada Masyarakat, termasuk penyampaian informasi Perkara dari Panitera Pengganti kepada pihak berperkara atas perintah Hakim/Majelis Hakim. Layanan SIKAT hadir sebagai wujud komitmen Pengadilan Negeri Pandeglang untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, mudah, transparan, terukur, terjangkau dan untuk mencegah segala bentuk penyalahgunaan yang melanggar kode etik dan hukum serta terjadinya miskomunikasi maupun misinformasi.  
Ayo hubungi kami dalam Nomor Layanan 0852 1620 4443 kami siap membantu memberikan layanan yang prima.

Nomor Layanan SIKAT  
Komunikasi dan Informasi Masyarakat  
**0852 1620 4443**  
Kami Siap Membantu Memberikan Layanan Yang Prima

**f** Pengadilan Negeri Pandeglang **ig** pnPandeglang **whatsapp** 0852-1620-4443 **globe** pn-pandeglang.go.id



## 2. Aplikasi Qr Code E-Brosur Kepaniteraan

Aplikasi QR Code E-Brosur Yaitu Bertujuan Untuk Mempermudah Para Pencari Keadilan Mencari Informasi Tentang Proses Administrasi Kepaniteraan Pidana, Prosedur & Persyaratan Pengajuan Permohonan Perdata, Panjar Biaya Perkara Perdata, Biaya Perkara Perdata Upaya Hukum Dan Proses Administrasi Kepaniteraan Hukum. Untuk Lebih Lanjut Silahkan Scan QR Code E-Brosur Yang Tercantum Di Bawah.



### e. Inovasi Pelayanan Publik pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung

Beberapa inovasi pelayanan publik pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, yaitu inovasi Pembayaran Biaya Perkara melalui kerjasama dengan BTN (Bank Tabungan Negara) dengan adanya fasilitas *mobile bank vehicle* yang tersedia di lingkungan gedung Pengadilan Negeri Rangkasbitung sehingga lebih hemat waktu dan tenaga, proses menjadi lebih cepat karena sebelumnya setiap pembayaran biaya perkara selalu dilakukan penyetoran langsung ke bank yang berjarak paling dekat 2km.

Lalu adanya inovasi SMS Sistem Informasi Perkara, layanan ini ditujukan kepada seluruh lapisan masyarakat, saat ini umumnya setiap orang telah memiliki atau menggunakan telepon seluler (ponsel) sehingga dengan adanya layanan ini setiap orang, kapan dan dimanapun berada dapat mengakses informasi tentang perkara. Layanan SMS ini dibuat guna mendukung aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), SIPP hanya dapat diakses masyarakat melalui jaringan internet, sehingga bagi masyarakat yang tidak memiliki akses internet dapat menggunakan layanan SMS ini untuk mengetahui informasi tentang parapihak, tanggal register, status terakhir, jadwal sidang dan juga biaya perkara.

## BAB VI PENGAWASAN

Pengawasan yaitu suatu upaya sistematis manajemen untuk melakukan perbandingan kinerja standar, rencana atau tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya untuk menetapkan apakah kinerja sejalan dengan standar tersebut dan untuk memutuskan tindakan perbaikan dibutuhkan untuk melihat bahwa sumber daya manusia dimanfaatkan dengan seefektif dan seefisien mungkin di dalam mencapai tujuan. Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok dari Mahkamah Agung.

Fungsi Pengawasan Mahkamah Agung adalah sebuah fungsi dimana Mahkamah Agung punya peran dan juga fungsi sebagai pengawas dan melakukan proses supervisi segala bentuk peradilan yang berjalan di Indonesia. Baik dari sisi putusan hakim, berbagai macam kasus dan juga segala bentuk proses peradilan di Indonesia.

### Tujuan Pengawasan

Tujuan dari pengawasan di lingkungan Peradilan Umum adalah sebagai berikut:

- Untuk menjaga terselenggaranya manajemen peradilan yang baik dan benar.
- Untuk menjaga terwujudnya tertib administrasi peradilan, dan tercapainya target yang telah ditetapkan sesuai program kerja.
- Untuk menjaga citra lembaga peradilan yang bermartabat dan terhormat.
- Untuk menjaga citra aparat peradilan yang profesional, bersih dan berwibawa.
- Untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik, disiplin dan prestasi kerja, guna pencapaian pelaksanaan tugas yang optimal.
- Untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang.

### A. INTERNAL

Sebagai satuan kerja di lingkungan Badan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Tinggi Banten selain bertugas sebagai *voorproost* (kawal depan) bagi Pengadilan Negeri di wilayah hukumnya dengan melaksanakan pengawasan juga melakukan pengawasan internal di lingkungan kantor Pengadilan Tinggi Banten. Pengawasan internal di Pengadilan Tinggi Banten dilaksanakan setiap bulan oleh masing-masing Hakim Pengawas Bidang yang selanjutnya dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banten melalui Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sebagai koordinator Hakim Pengawas Bidang. Hakim Pengawas Bidang di Pengadilan Tinggi Banten ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banten.



Pengawasan rutin oleh Pengadilan Tinggi Banten juga dilakukan terhadap Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banten. Kegiatan Pengawasan ke Pengadilan Negeri sewilayah Banten dilakukan 2 kali dalam setahun sebagai berikut :

No	Satuan Kerja	Pengawasan Pertama	Pengawasan Kedua
1	Pengadilan Negeri Pandeglang	7 s.d. 8 Juni 2023	30 s.d. 31 Oktober 2023
2	Pengadilan Negeri Rangkasbitung	12 s.d. 13 Juni 2023	6 s.d. 7 November 2023
3	Pengadilan Negeri Serang	19 s.d. 20 Juni 2023	8 s.d. 9 November 2023
4	Pengadilan Negeri Tangerang	14 s.d. 15 Juni 2023	1 s.d 2 November 2023

Pelaksanaan pengawasan ini berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banten. Yang di dalamnya menunjuk Hakim Tinggi Pengawas Daerah dengan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sebagai koordinator Hakim Tinggi Pengawas Daerah.

Selain pelaksanaan pengawasan internal di Pengadilan Tinggi Banten, Pelaksanaan pengawasan internal di Pengadilan Negeri sewilayah Banten juga telah berjalan dengan baik. Berikut ini dipaparkan pelaksanaan pengawasan internal di Pengadilan Negeri sewilayah Banten :

#### a. Pengawasan Internal di Pengadilan Negeri Tangerang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas dan disiplin di berbagai bidang khususnya para pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Tangerang, telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Menegakkan Disiplin Kerja, dengan tujuan meningkatnya disiplin dan kualitas kerja aparat peradilan, terwujudnya aparat peradilan yang mampu mendukung kelancaran pelaksanaan tugas peradilan dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*, bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, terciptanya pelayanan prima terhadap masyarakat pencari keadilan sesuai asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

Dalam rangka mewujudkan aparatur Pengadilan Negeri Tangerang yang berdisiplin, Ketua Pengadilan Negeri Tangerang telah memperkuat pelaksanaannya dengan menerbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor W29-U4/1279/KP.02.1/10/2022 tentang Pembentukan Tim Pemantauan Disiplin pada Pengadilan Negeri Tangerang yang mempunyai tugas dan tanggungjawab berupa:

- a. Memantau kedisiplinan Hakim dan Pegawai melalui absensi;

- b. Membuat laporan hasil pemantauan disiplin Hakim dan Pegawai;
  - c. Melaporkan hasil pemantauan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang setiap bulannya.
2. Pengawasan dan pembinaan atasan langsung
- Dalam rangka mengimplementasikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan atasan langsung melalui sarana Rapat koordinasi pada Pengadilan Negeri Tangerang yang dilaksanakan secara berjenjang dan terjadwal. Adapun Rapat Koordinasi Pengadilan Negeri Tangerang terdiri dari Rapat koordinasi Hakim, seluruh Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan Pegawai yang tersusun dalam jadwal rapat bulanan sebagaimana Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor W29-U4/471/KP.02.1/4./2002 tanggal 14 April 2022 tentang Mekanisme Rapat Bulanan pada Pengadilan Negeri Tangerang.
3. Pelaksanaan Hakim Pengawas Bidang
- Dalam melaksanakan pengawasan internal Pengadilan Negeri Tangerang telah membentuk Hakim Pengawas Bidang dengan Surat Keputusan Nomor No. W29.U4/4894/PS.01/5/2023 tanggal 17 Mei 2023 tentang Penunjukkan Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Negeri Tangerang.
- Dalam pelaksanaannya Hakim Pengawas Bidang melaksanakan tugasnya setiap bulan dan melaporkan hasil pengawasan kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang selaku Koordinator Pengawas yang merangkum hasil pengawasan dan melaporkannya kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang.
- Dari hasil pengawasan hakim pengawas bidang akan dibahas secara pleno pada rapat bulanan yang dihadiri oleh seluruh Hakim dan ASN Pengadilan Negeri Tangerang untuk ditindaklanjuti sebagaimana rekomendasi dari Hakim pengawas bidang.

**b. Pengawasan Internal di Pengadilan Negeri Serang**

Assesmen internal pada tanggal 12-16 Juni 2023. Semua hasil asesmen tersebut telah ditindaklanjuti.

Tim Hakim Pengawas Daerah Pengadilan Tinggi Banten pada tanggal 19-20 Juni 2023 telah melaksanakan kegiatan pengawasan daerah pada Pengadilan Negeri Serang. Dan semua temuan hasil pengawasan telah ditindaklanjuti. Demikian pula temuan Hasil Pemeriksaan Badan Pengawasan MA RI semua temuan telah ditindaklanjuti.



**c. Pengawasan Internal di Pengadilan Negeri Pandeglang**

Pengadilan Negeri Pandeglang melaksanakan pengawasan melekat dan fungsional yang telah dilakukan oleh Ketua dan Wakil Ketua serta Panitera dan Sekretaris. Untuk hakim-hakim pelaksanaan pengawasan melekat pada Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang, sedangkan pada pejabat Kepaniteraan, pejabat struktural maupun tenaga fungsional lainnya dilakukan oleh Panitera dan Sekretaris. Untuk staf dilakukan oleh masing-masing pejabat kepaniteraan maupun pejabat strukturalnya, sedangkan untuk Pengawas bidang telah ditunjuk Hakim Pengawas Bidang berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Pada Pengadilan Negeri Pandeglang. Hakim Pengawas Bidang ini telah melaksanakan tugasnya dengan membuat laporan pengawasan secara berkala yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan melalui Wakil Ketua Pengadilan.

Dalam melaksanakan pengawasan internal, Pengadilan Negeri Pandeglang telah melaksanakan pengawasan internal antara lain :

1. Melaksanakan rapat bulanan secara rutin yang membahas antara lain :
  - Evaluasi kinerja dan penyampaian hasil temuan dari masing-masing hakim pengawas bidang disertai rekomendasi dan tindak lanjut
  - Mengumumkan bila ada peraturan, kebijakan baru serta informasi penting baik yang berasal dari Pimpinan Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi ataupun yang berasal dari instansi lain yang perlu disampaikan kepada seluruh hakim dan pegawai
  - Laporan minutası perkara termasuk pengecekan pelaksanaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)
2. Secara berkala dilakukan rapat khusus Hakim, Pejabat Struktural, Panitera Pengganti serta rapat khusus Jusrita / Jusrita Pengganti untuk membahas permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing bagian dalam pelaksanaan tugas Pokok dan Fungsinya serta mencari solusi pemecahannya
3. Secara berkala melakukan pemeriksaan / peninjauan langsung tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing
4. Pengawasan kedisiplinan dilakukan pengecekan rutin terhadap absensi Hakim dan Pegawai
5. Secara berkala dilakukan pemeriksaan uang kas bendahara pengeluaran, serta pembukuan dan penatalaksanaan arsipnya.

**d. Pengawasan Internal di Pengadilan Negeri Rangkasbitung**

Pengawasan melekat dalam organisasi Mahkamah Agung dan Lembaga Peradilan di bawahnya adalah pengawasan secara struktural yang melekat dalam suatu organisasi, sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pedoman Umum Angka 1 huruf a Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 Tentang Pedoman Pengawasan Melekat. Dengan pedoman aturan tersebut kantor Pengadilan Negeri Rangkasbitung telah melaksanakan secara terus-menerus. Dalam rangka menegakkan disiplin pegawai Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II dalam kesempatan apel pagi pembina apel selalu mengingatkan Penegakan Disiplin Kerja Pegawai pada Pengadilan Negeri Kelas II. Hal tersebut sesuai dengan pelaksanaan Perma No. 7,8,9 Tahun 2016 mengenai kedisiplinan. Adapun tugas tim pengawasan penegakan disiplin kerja pegawai adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pengawasan perilaku kepada pegawai akan ketaatan terhadap disiplin kerja yang telah ditetapkan.
2. Menentukan dan melaksanakan tindak lanjut yang sesuai dalam hal menemukan pegawai tidak memenuhi kewajiban dan larangan yang ditetapkan dalam ketentuan mengenai disiplin kerja dan kode etik dan pedoman perilaku yang berlaku.
3. Melakukan pengawasan terhadap Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 071/KMS/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Hakim dan tunjangan kinerja Pegawai pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
4. Memberikan rekomendasi tindaklanjut kepada atasan secara berjenjang dalam hal tindak lanjut yang diperlukan tentang pengawasan yang dilaksanakan oleh Hakim Pengawas Bidang maka Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung menunjuk hakim-hakim untuk mengawasi bagian-bagian dengan Surat Keputusan nomor : W29-U3/1752/KOT.00.08/VII/2023 tanggal 1 Desember 2023 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang:
  1. Nur Ervianti Mellala, SH.MKn. Koordinator pengawas bidang
  2. Rani Suryani Pustikasari, SH.MH. Hakim Pengawas Perdata, Pidana , Wasmat dan Hukum dan Arsip.
  3. Dwi Novita Purbasari, SH. Hakim Pengawas PTIP, Kepegawaian dan Ortala dan Umum / Keuangan.



Dari pelaksanaan pengawasan yang telah dilakukan di lingkungan kantor Pengadilan Tinggi Banten dan Pengadilan Negeri sewilayah Banten, didapatkan hasil terkait informasi dan pengaduan sebagai berikut:

**Tabel Pengaduan pada Pengadilan Tinggi Banten Tahun 2023**

No.	Rekapitulasi	Jumlah
1	Sisa pengaduan Tahun 2022	-
2	Pengaduan yang diterima selama Tahun 2023	18
3	Pengaduan yang diteruskan ke Badan Pengawasan MARI	18
4	Pengaduan yang sedang ditangani oleh Pengadilan Tinggi dengan membentuk Tim Pemeriksa	0
5	Pengaduan yang didelegasikan kepada Pengadilan Tingkat Pertama	0
6	Pengaduan yang tidak ditindaklanjuti dengan LHP ke Badan Pengawasan MARI tetapi sudah selesai pada tingkat Pengadilan Tinggi	0
7	Pengaduan yang telah selesai ditangani, LHP disampaikan ke Badan Pengawasan MARI	0
8	Sisa pengaduan yang belum selesai Tahun 2023	1
9	Jumlah Hakim dan Pegawai Non-Hakim yang dijatuhi hukuman disiplin	0

**Tabel Rekapitulasi Data Pelayanan Informasi dan Pengaduan pada Pengadilan Tinggi Banten dan Pengadilan Negeri Sewilayah Banten Tahun 2023**

No.	Satker	Jumlah Layanan Informasi	Jumlah Layanan Pengaduan
1	PT Banten	60	0
2	PN Tangerang	125	17
3	PN Serang	61	3
4	PN Pandeglang	53	0
5	PN Rangkasbitung	79	0
<b>Jumlah</b>		<b>378</b>	<b>20</b>

## B. EVALUASI

Seluruh hasil dan temuan terhadap pemeriksaan dan pengawasan yang telah dilakukan oleh para hakim pengawas bidang pada Pengadilan Tinggi Banten dan Pengadilan Negeri sewilayah Banten baik dengan pelaksanaan tugas pokok di lingkungan kepaniteraan maupun kesekretariatan serta evaluasi atas penyelenggaraan manajemen peradilan, kinerja lembaga peradilan dan kualitas pelayanan publik,

dituangkan dalam bentuk laporan tertulis dengan susunan dan format yang sistematis, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Ketua Pengadilan.

Terhadap temuan-temuan atau hasil pengawasan yang memerlukan tindak lanjut para hakim pengawas merekomendasikan kepada Ketua Pengadilan atau para pejabat yang berkompeten untuk segera menindak lanjuti hasil temuan tersebut, sehingga pada tahun - tahun berikutnya dapat disusun program kerja secara cermat dan tepat serta kendala-kendala yang ada dapat segera diselesaikan, sehingga tidak muncul lagi pada pelaksanaan tugas tahun anggaran berikutnya.

#### **1. Pengadilan Tinggi Banten**

Adapun hal-hal yang ditindaklanjuti sudah dilaksanakan, seperti setiap bulan membuat laporan Monitoring dan Evaluasi verifikasi pengguna e-court, monitoring anonimisasi, evaluasi keakuratan data dan ketepatan waktu pengisian SIPP, setiap rapat bulanan membahas teknis pengelolaan ASN, evaluasi pengelolaan barang persediaan dan DBR, monev SOP dan mengoptimalkan pelaksanaan 5R.

#### **2. Pengadilan Negeri Tangerang**

Seluruh hasil dan temuan terhadap pemeriksaan dan pengawasan yang telah dilakukan oleh para hakim pengawas bidang pada Pengadilan Negeri Tangerang baik dengan pelaksanaan tugas pokok di lingkungan kepaniteraan maupun kesekretariatan serta evaluasi atas penyelenggaraan manajemen peradilan, kinerja lembaga peradilan dan kualitas pelayanan publik, dituangkan dalam bentuk laporan tertulis atau berita acara pemeriksaan dengan susunan dan format yang sistematis, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang.

Terhadap temuan-temuan atau hasil pengawasan yang memerlukan tindak lanjut para hakim pengawas merekomendasikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang atau para pejabat yang berkompeten untuk segera menindak lanjuti hasil temuan tersebut, sehingga pada tahun - tahun berikutnya dapat disusun program kerja secara cermat dan tepat serta kendala-kendala yang ada dapat segera diselesaikan, sehingga tidak muncul lagi pada pelaksanaan tugas tahun anggaran berikutnya

#### **3. Pengadilan Negeri Serang**

Berdasarkan hasil assesmen internal dan tindak lanjut atas temuan assesmen internal temuan dari manajemen terdahulu yang belum dapat ditindaklanjuti adalah sebagai berikut :



- Lahan Parkir
- Tambahan Genset
- Ruang *Back Office* Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Temuan tersebut diatas belum bisa ditindaklanjuti karena terkait dengan ketersediaan anggaran dan keterbatasan ruangan pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA.

#### 4. Pengadilan Negeri Pandeglang

Pada umumnya pengawasan di Pengadilan Negeri Pandeglang telah berjalan dengan baik, karena Pengawasan melekat telah berjalan dan dilaksanakan oleh pimpinan dan pejabat yang bertanggung jawab. Pengawasan oleh Hakim Pengawas Bidang juga telah dilaksanakan dan berjalan dengan baik, karena Pengawas Bidang telah menjalankan tugasnya untuk memberikan pengawasan dan arahan-arahan, selanjutnya membuat laporan kepada Ketua Pengadilan Negeri melalui Wakil Ketua Pengadilan setiap bulan. Selain pengawasan yang dilakukan oleh hakim pengawas bidang, pimpinan juga melakukan evaluasi melalui forum rapat bulanan yang membahas kinerja melalui aplikasi-aplikasi pendukung baik di bagian Kepaniteraan maupun di bagian Kesekretariatan.

Hasil evaluasi dan pengawasan internal pada masing-masing bagian, masih ditemukan permasalahan dan hambatan-hambatan sebagai berikut :

1. Masih banyaknya Panitera Pengganti yang diperbantukan di Kepaniteraan Pidana, Kepaniteraan Perdata dan Kepaniteraan Hukum, hal ini disebabkan karena kurangnya pegawai pada Pengadilan Negeri Pandeglang
2. Masih banyak rumah dinas yang rusak berat dan harus segera diperbaiki
3. DIPA yang akan datang agar lebih ditingkatkan lagi, sehingga dana operasional kegiatan kantor bisa tercukupi.

#### 5. Pengadilan Negeri Rangkasbitung

Dari hasil pengawasan yang telah dilaksanakan baik Hakim Pengawas Bidang maupun Hakim Pengawas dan Pengamat telah dilaksanakan evaluasi yang dilaksanakan sekaligus bersamaan dengan Rapat bulanan secara rutin minimal 1 kali dalam 1 bulan. Yang dimulai dengan rapat berjenjang dari yang paling bawah pada minggu ke 2 hasil Temuan-temuan dan permasalahan dari hasil pengawasan sudah hampir semua dibenahi dan dilaksanakan sesuai arahan Hakim Pengawas Bidang dan dari hasil evaluasi.

## BAB VII PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Dari uraian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 sebagaimana disampaikan di depan dapat memberikan gambaran secara umum tentang keadaan dari masing- masing satuan kerja yang ada dalam wilayah Pengadilan Banten di tahun 2023, dari laporan tersebut disimpulkan bahwa Pengadilan Tinggi Banten dan Pengadilan Negeri sewilayah Banten telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, yaitu antara lain :

1. Secara umum bahwa Pengadilan Tinggi Banten dan Pengadilan Negeri Sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Banten telah melaksanakan pengelolaan Administrasi Perkara dan Adminsitrasi Umum dengan baik sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, dan telah melaksanakan program Akreditasi Penjaminan Mutu, namun demikian masih banyak yang perlu dibenahi dan perlu ditingkatkan lagi, terutama menyangkut peningkatan kinerja para pegawai dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Mahkamah Agung RI.
2. Implementasi e-court, SIPP dan e-Berpadu di Pengadilan Tinggi Banten dan Pengadilan Negeri sewilayah Banten telah berjalan baik dan didukung oleh sarana teknologi informasi yang cukup memadai, namun masih perlu peningkatan kinerja untuk meningkatkan nilai kepatuhan pengisian data SIPP yang termonitoring melalui aplikasi MIS (Aplikasi Monitoring Implementasi SIPP) dan EIS.
3. Pelaksanaan program Akreditasi Penjaminan Mutu berusaha untuk terus dipertahankan dan ditingkatkan demi peningkatan pelayanan publik. Program ini menjadi pendukung pelaksanaan pengawasan di lingkungan Peradilan, baik internal satuan kerja maupun pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Banten terhadap Pengadilan Negeri sewilayah Banten.
4. Baik Pengadilan Tinggi Banten dan Pengadilan Negeri sewilayah Pengadilan Tinggi Banten telah melaksanakan Pembangunan Zona Integritas dan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
5. Program Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai wujud transparansi, efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan pelayanan peradilan menjadi perhatian utama semua satuan kerja Peradilan Umum sewilayah Banten. Program ini selalu disempurnakan dengan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang ada.



Pengembangan inovasi pelayanan publik menjadi nilai tambah masing-masing Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum sewilayah Banten dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat pencari keadilan. Setiap satuan kerja berlomba memberikan dedikasinya dalam pengembangan inovasi pelayanan publik.

## B. REKOMENDASI

Dalam rangka peningkatan kinerja di Pengadilan Tinggi Banten dan Pengadilan Negeri sewilayah Banten sehingga dapat melaksanakan fungsi peradilan dan pelayanan publik yang terbaik, maka rekomendasi yang ditujukan kepada pimpinan Mahkamah Agung sebagai berikut :

1. Penambahan tenaga pelaksana/ staf administrasi bagi Pengadilan tingkat pertama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banten mendesak untuk dipenuhi, beberapa diantaranya untuk kebutuhan staf administrasi perkara, arsiparis, pustakawan dan penata laporan.
2. Perlunya pembinaan sumber daya manusia dalam berbagai bentuk kegiatan bimbingan atau pendidikan atau pelatihan agar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat berjalan dengan baik dan mampu memberikan pelayanan yang terbaik.
3. Penambahan alokasi anggaran untuk memenuhi sarana dan prasarana, diantaranya untuk renovasi gedung Pengadilan (penambahan Aula untuk Pengadilan Tinggi Banten), renovasi rumah dinas hakim untuk Pengadilan Tinggi Banten dan Pengadilan Negeri sewilayah Banten, lahan parkir untuk gedung Pengadilan Negeri Serang karena area parkir yang ada sekarang tidak mencukupi sehingga tidak tertata rapi dan pengadaan sarana / prasarana terutama yang menunjang pelayanan publik dalam hal PTSP, E-court dan SIPP.

Melalui laporan pelaksanaan kegiatan tahun 2023 Pengadilan Tinggi Banten ini, semoga segala kekurangan dan kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Tinggi Banten dan Pengadilan Negeri sewilayah Banten dapat segera teratasi dengan adanya tindaklanjut dari mahkamah Agung.

**LAMPIRAN :**

1. Laporan Keadaan Perkara Perdata Pengadilan Tinggi Banten
2. Laporan Keadaan Perkara Pidana Pengadilan Tinggi Banten
3. Laporan Keadaan Perkara Tipikor Pengadilan Tinggi Banten
4. Data Statistik Perkara SIPP Pengadilan Tinggi banten



**PENGADILAN TINGGI BANTEN**  
Jalan Raya Pandeleng Km. 6,5 Serang

**LAPORAN TAHUNAN 2023**  
**PENGADILAN TINGGI BANTEN**

NO.	PERKARA MASUK	MAJELIS HAKIM		TANGGAL	PUTUSAN	SISA AKHIR BIJAN			KETERANGAN
		MAJELIS HAKIM PANITIA PENGACARA	PEMERIKAN			PERURUKAN MAJELIS HAKIM	BELEM DIBAGI	BELEM DIPUTUS	
1									
1	198/Pdt.G/2023/PT.81N 115/Pdt.G/2023/PN.Trg Perbuatan Melawan Hukum	C19.C3.C9.018	24.11.2023	24.11.2022	11.01.2023 Diperbaiki				
2	305/Pdt.G/2022/PT.81N 285/Pdt.81N/2022/PN.Trg Perbuatan Melawan Hukum	C1.C21.C7.019	09.12.2022	09.12.2022	11.01.2023 Dikuatkan				
3	306/Pdt.G/2022/PT.81N 10/Pdt.G/2022/PN.Bib Perbuatan Melawan Hukum	C9.C1.C10.09	09.12.2022	09.12.2022	04.01.2023 Dikuatkan				
4	307/Pdt.G/2023/PT.81N 750/Pdt.G/2022/PN.Trg Wangprestasi	C19.C2.C9.018	16.12.2022	16.12.2022	04.01.2023 Dikuatkan				
5	308/Pdt.G/2023/PT.81N 935/Pdt.G/2020/PN.Trg Perbuatan Melawan Hukum	C8.C5.C10.013	16.12.2022	16.12.2022	12.01.2023 Dikuatkan				
6	309/Pdt.G/2023/PT.81N 521/Pdt.G/2021/PN.Trg Perbuatan Melawan Hukum	B.C19.C11.04	16.12.2022	16.12.2022	11.01.2023 Dikuatkan				
7	310/Pdt.G/2022/PT.81N 342/Pdt.81N/2022/PN.Trg Lain-Lain	C4.C23.C12.07	16.12.2022	16.12.2022	11.01.2023 Dikuatkan				
8	311/Pdt.G/2023/PT.81N 1262/Pdt.G/2021/PN.Trg Perbuatan Melawan Hukum	C31.C1.C7.022	16.12.2022	16.12.2022	04.01.2023 Dikuatkan				
9	312/Pdt.G/2023/PT.81N 491/Pdt.G/2022/PN.Trg Lain-Lain	C1.C21.C7.019	16.12.2022	16.12.2022	04.01.2023 Dikuatkan				
10	313/Pdt.G/2023/PT.81N 76/Pdt.G/2022/PN.Trg Perbuatan Melawan Hukum	C7.C3.C21.017	19.12.2022	19.12.2022	01.02.2023 Dikuatkan				
11	315/Pdt.G/2022/PT.81N 930/Pdt.G/2021/PN.Trg Perbuatan Melawan Hukum	C7.C1.C21.017	19.12.2022	19.12.2022	10.01.2023 Dikuatkan				
12	316/Pdt.G/2022/PT.81N 454/Pdt.G/2020/PN.Trg 454/Pdt.G/2020/PN.Trg	C3.C9.C10.02	16.12.2022	19.12.2022	12.01.2023 Dikuatkan				
13	317/Pdt.G/2022/PT.81N 1343/Pdt.G/2022/PN.Trg Wangprestasi	C7.C1.C21.017	19.12.2022	19.12.2022	18.01.2023 Dikuatkan				
14	1/Pdt.G/2023/PT.81N 142/Pdt.G/2022/PN.Trg Perbuatan Melawan Hukum	C10.C3.C8.02	02.01.2023	02.01.2023	18.01.2023 Dikuatkan				
15	2/Pdt.G/2023/PT.81N 935/Pdt.81N/2021/PN.Trg Lain-Lain	C22.C4.C23.06	02.01.2023	02.01.2023	16.01.2023 Dikuatkan				
16	3/Pdt.G/2023/PT.81N 311/Pdt.G/2022/PN.Trg Wangprestasi	C10.C5.C8.011	02.01.2023	02.01.2023	24.01.2024 Dikuatkan				

Ketua :  
Dr. ANDRIANI MURDIN, SH., MH

Wakil Ketua :  
SUWATMIKO, SH., MH

1. MASRUDDIN CARIAGO, S.H., MH
2. LAURENCIUS SIBRANI, SH., MH
3. KUSRIYANTO, SH., MH
4. M. TUCHATUL ANAM, SH., MH
5. SOLAHUDDIN, SH., MH
6. POSMAN BAKARA, SH., MH
7. AGUNG SURADI, SH.
8. IMANUEL SEMBRING, SH.
9. EFFENDI PASARIBU, SH., MH
10. VICTOR SELAMAT ZAGOTO, SH., MH
11. BARNI DARASAH, SH., MH
12. HASANAH DISTIYAWATI, SH., MH
13. SUPRIONO, SH., MH
14. DR. BINSAR GUSTOM, SH., SE., MH
15. DR. STI SURYATI, SH., MH, MM
16. ENNIS HASANUDDIN, SH., CN., MH
17. BODALINDA, SH., MH
18. NATHAN LAMBE, SH., MH
19. AHMAD RIVAL, SH., MH
20. LENORIATY JANS, SH., MH
21. ENCEP YULIADI, SH., MH
22. I GDE KOMANG ADY NATHA, SH., MH
23. PURWONO EDI SANTOSA, SH., MH

Panitera :

- YUNDA HASBI, SH., MH
1. DEDE MUJTAKIR, SH., MH
  2. CHRISTANTO PUJIDONO, SH., MH
  3. FRI WOODO, SH., MH
  4. ITALDA LAMTIUR P. SH.
  5. GIBIS AWALUDDIN, SH., MH
  6. WILAN WITARSHI, SH.
  7. SITI SUSILAWATI, SH.
  8. HURFIAD, SH.
  9. FEBI ARDIANSYA, SH., MH
  10. AHMAD BAEDOWI, SH.
  11. YANI IRRAWATI, SH.
  12. NITA YULIANA, SH.
  13. TURASHI, SH.
  14. KOSASIH, SH.
  15. SUDIRMAN, SH.
  16. MARUKA, SH.

17	4/PD/2023/PT BTH 812/Pdt.G/2023/PN Tng Wanprestasi	CLC10.C5.D16	02.01.2023	02.01.2023	02.01.2023	07.02.2023	Dikuskan	17.	YETTI NINGSIH, SH	017
18	5/PD/2023/PT BTH 1066/Pdt.G/2023/PN Tng Objek Sengketa Tanah	C13.C6.C8.D16	02.01.2023	02.01.2023	02.01.2023	25.01.2023	Dikuskan	18.	AF SAFUDALLAH, SH, AMH	018
19	6/PD/2023/PT BTH 124/Pdt.G/2022/PN Tng Perbuatan Melawan Hukum	C11.C15.C23.D15	02.01.2023	02.01.2023	02.01.2023	19.01.2023	Dipertahili	19.	AGUS CHAMNO, SH	019
20	7/PD/2023/PT BTH 134/Pdt.G/2022/PN Tng Wanprestasi	C15.C11.C23.D21	02.01.2023	02.01.2023	02.01.2023	24.01.2023	Dipertahili	20.	IMAM SUBEKTI, SH	020
21	8/PD/2023/PT BTH 20/Pdt.G/2022/PN Sg Perbuatan Melawan Hukum	C17.C71.C7.D19	02.01.2023	02.01.2023	02.01.2023	25.01.2023	Dikuskan	21.	ARIF MUSTADIM, SH	021
22	9/PD/2023/PT BTH 759/Pdt.G/2021/PN Tng Perbuatan Melawan Hukum	C3.C18.C20.D20	06.01.2023	06.01.2023	06.01.2023	01.02.2023	Dikuskan			
23	10/PD/2023/PT BTH 44/Pdt.G/2022/PN Tng Perbuatan Melawan Hukum	C2.C9.C19.D4	06.01.2023	06.01.2023	06.01.2023	01.02.2023	Dikuskan			
24	11/PD/2023/PT BTH 252/Pdt.G/2022/PN Tng Lain-Lain	C5.C510.C8.D7	06.01.2023	06.01.2023	06.01.2023	15.02.2023	Dikuskan			
25	12/PD/2023/PT BTH 217/Pdt.G/2023/PN Tng Wanprestasi	C4.C23.C23.D8	06.01.2023	06.01.2023	06.01.2023	31.01.2023	Dikuskan			
26	13/PD/2023/PT BTH 858/Pdt.G/2020/PN Tng Wanprestasi	C9.C6.C13.D9	06.01.2023	06.01.2023	06.01.2023	06.02.2023	Dikuskan			
27	14/PD/2023/PT BTH 849/Pdt.G/2020/PN Tng Wanprestasi	C21.C17.C7.D10	06.01.2023	06.01.2023	06.01.2023	25.01.2023	Dikuskan			
28	15/PD/2023/PT BTH 690/Pdt.G/2021/PN Tng Perbuatan Melawan Hukum	C18.C3.C20.D14	09.01.2023	09.01.2023	09.01.2023	31.01.2023	Dikuskan			
29	16/PD/2023/PT BTH 9/Pdt.G/2022/PN Bab Perbuatan Melawan Hukum	C9.C2.C19.D12	09.01.2023	09.01.2023	09.01.2023	01.02.2023	Dikuskan			
30	17/PD/2023/PT BTH 357/Pdt.G/2022/PN Tng Perbuatan Melawan Hukum	C19.C2.C9.D13	10.01.2023	10.01.2023	10.01.2023	01.02.2023	Dikuskan			
31	18/PD/2023/PT BTH 263/Pdt.G/2017/PN Tng Perbuatan Melawan Hukum	C23.C11.C15.D17	10.01.2023	10.01.2023	10.01.2023	06.02.2023	Tidak Diterima			
32	19/PD/2023/PT BTH 380/Pdt.G/2022/PN Tng Hak Asuh Anak	C6.C9.C13.D2	10.01.2023	10.01.2023	10.01.2023	11.02.2023	Dikuskan			
33	20/PD/2023/PT BTH 135/Pdt.G/2022/PN Tng Perbuatan Melawan Hukum	8.C20.C3.D1	10.01.2023	10.01.2023	10.01.2023	01.02.2023	Dipertahili			
34	21/PD/2023/PT BTH 76/Pdt.G/2022/PN Sg Perbuatan Melawan Hukum	C7.C17.C21.D3	10.01.2023	10.01.2023	10.01.2023	25.01.2023	Dikuskan			
35	22/PD/2023/PT BTH	C20.C3.C18.D6	11.01.2023	11.01.2023	11.01.2023	02.02.2023	Dikuskan			





54	Perbuatan Melawan Hukum 40/Pdt./2023/PT BTN	05.C13.C17.D9	02.02.2023	02.02.2023	20.02.2023 [Dibatal]	SUATRIKO, SH.,MH 1 LAURENSIUS SIBARANI, SH.,MH 2 KUSIBYAKTO, SH.,MHUM	C1
55	Perbuatan Melawan Hukum 63/Pdt. G./2022/PH Srg	C19.C10.C12.D5	02.02.2023	02.02.2023	23.02.2023 [Dibatal]	3 M. TUCHATUL ANAM, SH.,MH 4 SOLAHUDDIN, SH.,MH	C2
56	Perbuatan Melawan Hukum 64/Pdt. G./2022/PH Srg	C5.C8.C11.D4	02.02.2023	02.02.2023	09.03.2023 [Dibatalkan]	5 POSMAN BAKAMA, SH.,MH 6 AGUNG SURADI, SH	C3
57	Perbuatan Melawan Hukum 65/Pdt. G./2022/PH Tng	C18.C3.C19.D6	02.02.2023	02.02.2023	10.02.2023 [Dibatalkan]	7 IMANUEL SEMBING, SH 8 EFFENDI PASARIBU, SH.,MH	C4
58	Perbuatan Melawan Hukum 66/Pdt. G./2022/PH Tng	C1.C8.C15.D7	02.02.2023	02.02.2023	16.02.2023 [Dibatalkan]	9 VICTOR SELAMAT ZAGOTO, SH.,MHUM 10 RAMLI DARASAH, SH.,MHUM	C5
59	Perbuatan Melawan Hukum 69/Pdt. G./2021/PH Tng	C7.C4.C9.D7	02.02.2023	02.02.2023	02.03.2023 Dikatakan	11 SUPREYONO, SH.,MHUM 12 DR. RITI SUKATIL, SH.,MH.,MM	C6
60	Perbuatan Melawan Hukum 73/Pdt. G./2022/PH Tng	C10.C12.C5.D11	02.02.2023	02.02.2023	07.02.2023 Dikatakan	13 IRDALINDA, SH.,MH 14 NATHAN LAMBE, SH.,MH	C7
61	Perbuatan Melawan Hukum 75/Pdt. G./2022/PH Tng	C13.C17.C6.D13	02.02.2023	02.02.2023	07.02.2023 Dikatakan	15 AHMAD RIVAL, SH.,MH 16. LENDIRATY JANIS, SH.,MH	C8
62	Perbuatan Melawan Hukum 73/Pdt. G./2022/PH Tng	C11.C8.C5.D12	02.02.2023	02.02.2023	07.02.2023 Dikatakan	17 ENCEP YULIADI, SH.,MH 18 I GEDÉ KOMANG ADY BATHA, SH.,MHUM	C9
63	Perbuatan Melawan Hukum 75/Pdt. G./2021/PH Tng	C16.C2.C14.D17	02.02.2023	02.02.2023	22.02.2023 [Dibatalkan]	19 PURWONO EGI SANTOSA, SH.,MH	C10
64	Perbuatan Melawan Hukum 76/Pdt. G./2022/PH Tng	C10.C12.C18.D15	08.02.2023	08.02.2023	01.03.2023 Dikatakan	DEDE MUTAQQIN, SH.,MHUM	D
65	Perbuatan Melawan Hukum 703/Pdt. G./2017/PH Tng	C11.C8.C5.D16	08.02.2023	08.02.2023	01.03.2023 Dikatakan	1 DEDE MUTTARIK, SH.,MHUM 2 CHRISTANTO FUDIONO, SH., MH	D1
66	Perbuatan Melawan Hukum 77/Pdt. G./2022/PH Srg	C5.C4.C7.D23	09.02.2023	09.02.2023	01.03.2023 Dikatakan	3 TRI WOODO, SH.,MH 4 ITALDA LAKHTIUR P, SH	D2
67	Perbuatan Melawan Hukum 787/Pdt. G./2020/PH Tng	C12.C10.C19.D21	09.02.2023	09.02.2023	26.02.2023 Dikatakan	5 WILAN WITARSH, SH. 6 SITI SUSULAWATI, SH	D3
68	Perbuatan Melawan Hukum 803/Pdt. G./2022/PH Tng	C2.C14.C16.D17	09.02.2023	09.02.2023	01.03.2023 Dikatakan	7 NURFUAD, SH 8 FEBI ARDIANSYA, SH.,MH	D4
69	Perbuatan Melawan Hukum 831/Pdt. G./2022/PH Tng	C4.C5.C7.D10	13.02.2023	13.02.2023	08.02.2023 Dikatakan	9 AHMAD BAELOWI, SH 10 YANI IRRAWATI, SH	D5
70	Perbuatan Melawan Hukum 849/Pdt. G./2020/PH Tng	C3.C18.C19.D9	13.02.2023	13.02.2023	11.03.2023 Dikatakan	11 MEITA YULIANA, SH 12 FURASMI, SH	D6
71	Perbuatan Melawan Hukum 858/Pdt. G./2020/PH Tng	C8.C11.C17.B11	13.02.2023	13.02.2023	11.03.2023 Dikatakan	13 KOSASAH, SH 14 SUDIRMAN, SH	D7
						15 MARIANA, SH 16 YETTI NINGSIH, SH	D8
						17. AUF SAUFUDAUILLAH, SH.,MH 18. AGUS GIHARNO, SH	D9
						19. IMAM SUBEKTI, SH 20. ARIEF MUSTAQIMA, SH	D10
						21. AGUS GIHARNO, SH 22. IMAM SUBEKTI, SH	D11
						23. ARIEF MUSTAQIMA, SH 24. ARIEF MUSTAQIMA, SH	D12
						25. IMAM SUBEKTI, SH 26. ARIEF MUSTAQIMA, SH	D13
						27. ARIEF MUSTAQIMA, SH 28. ARIEF MUSTAQIMA, SH	D14
						29. IMAM SUBEKTI, SH 30. ARIEF MUSTAQIMA, SH	D15
						31. ARIEF MUSTAQIMA, SH 32. ARIEF MUSTAQIMA, SH	D16
						33. ARIEF MUSTAQIMA, SH 34. ARIEF MUSTAQIMA, SH	D17
						35. ARIEF MUSTAQIMA, SH 36. ARIEF MUSTAQIMA, SH	D18
						37. ARIEF MUSTAQIMA, SH 38. ARIEF MUSTAQIMA, SH	D19
						39. ARIEF MUSTAQIMA, SH 40. ARIEF MUSTAQIMA, SH	D20
						41. ARIEF MUSTAQIMA, SH 42. ARIEF MUSTAQIMA, SH	D21
						43. ARIEF MUSTAQIMA, SH 44. ARIEF MUSTAQIMA, SH	D22
						45. ARIEF MUSTAQIMA, SH 46. ARIEF MUSTAQIMA, SH	D23



72	58/Pdt.G/2022/PN Tng Wangpretati	C17.C13.C6.D5	13.02.2023	13.02.2023	07.03.2023	Dikuatkan
73	59/Pdt.G/2022/PN Bbb Wangpretati	C14.C2.C16.D6	13.02.2023	13.02.2023	06.03.2023	Dikuatkan
74	60/Pdt.G/2021/PN Tng 912/Pdt.G/2021/PN Tng Wangpretati	C6.C13.C17.D7	13.02.2023	13.02.2023	27.02.2023 (Dikuatkan)	
75	61/Pdt.G/2022/PN Tng 93/Pdt.G/2022/PN Tng Wangpretati	C15.C10.C12.D8	13.02.2023	13.02.2023	07.03.2023 (Dikuatkan)	
76	62/Pdt.G/2021/PN Tng 935/Pdt.G/2021/PN Tng Wangpretati	C8.C1.C15.D13	14.02.2023	14.02.2023	08.03.2023	Dikuatkan
77	63/Pdt.G/2021/PN Tng 935/Pdt.G/2020/PN Tng Wangpretati	C5.C8.C11.D12	14.02.2023	14.02.2023	08.03.2023	Dikuatkan
78	64/Pdt.G/2021/PN Tng 939/Pdt.G/2021/PN Tng Wangpretati	C16.C2.C14.D15	15.02.2023	15.02.2023	14.03.2023	Dikuatkan
79	65/Pdt.G/2021/PN Tng 918/Pdt.G/2022/PN Tng Wangpretati	C3.C18.C19.D16	15.02.2023	15.02.2023	16.03.2023	Dikuatkan
80	66/Pdt.G/2021/PN Tng 99/Pdt.G/2019/PN Tng Wangpretati	C12.C10.C18.D03	15.02.2023	15.02.2023	09.03.2023	Dibuatkan
81	67/Pdt.G/2021/PN Tng eCourt 109/Pdt.G/2022/PN S-r Wangpretati	B.C5.C18.D18	15.02.2023	15.02.2023	09.03.2023	Dikuatkan
82	68/Pdt.G/2021/PN Tng 30/Pdt.G/2022/PN S-r Wangpretati	C18.C3.C19.D22	21.02.2023	21.02.2023	21.03.2023	Dikuatkan
83	69/Pdt.G/2021/PN Tng 429/Pdt.G/2022/PN Tng Perconsul	C15.C1.C8.D04	21.02.2023	21.02.2023	21.03.2023	Diperbaiki
84	70/Pdt.G/2021/PN Tng 179/Pdt.G/2022/PN Tng Wangpretati	C1.C8.C15.D5	21.02.2023	21.02.2023	21.03.2023	Dikuatkan
85	71/Pdt.G/2021/PN Tng 477/Pdt.G/2022/PN Tng Perbusan Melawan Hakim	C7.C4.C9.D6	21.02.2023	21.02.2023	20.03.2023	Dikuatkan
86	72/Pdt.G/2021/PN Tng 1210/Pdt.G/2021/PN Tng Wangpretati	C13.C17.C5.D9	21.02.2023	21.02.2023	15.03.2023	Dikuatkan
87	73/Pdt.G/2021/PN Tng 813/Pdt.G/2022/PN Tng Perbusan Melawan Hakim	C11.C8.C3.D10	21.02.2023	21.02.2023	28.03.2023	Dikuatkan
88	74/Pdt.G/2021/PN Tng 440/Pdt.G/2022/PN Tng Wangpretati	C8.C5.C11.D11	21.02.2023	21.02.2023	15.03.2023	Dikuatkan
89	75/Pdt.G/2021/PN Tng 919/Pdt.G/2021/PN Tng Perbusan Melawan Hakim	C17.C13.C6.D13	21.02.2023	21.02.2023	15.03.2023	Dikuatkan

90	76/Pdt/2023/PT BTN 118/Pdt.G/2022/PN Tng Perbuatan Melawan Hukum	C4, C5, C7, D15	21.02.2023	21.02.2023	21.02.2023	21.02.2023	21.02.2023	Dikatakan
91	77/Pdt/2023/PT BTN Perbuatan Melawan Hukum	C1, C14, C16, D6	21.02.2023	21.02.2023	21.02.2023	21.02.2023	21.02.2023	Dikatakan
92	78/Pdt/2023/PT BTN eCourt 79/Pdt.G/2023/PN Srg Perbuatan Melawan Hukum	C14, C2, C16, D7	21.02.2023	21.02.2023	21.02.2023	21.02.2023	21.02.2023	Dikatakan
93	79/Pdt/2023/PT BTN 550/Pdt.G/2022/PN Tng Percecahan	C10, C12, C19, D4	27.02.2023	27.02.2023	27.02.2023	27.02.2023	27.02.2023	Dikatakan
94	80/Pdt/2023/PT BTN 535/Pdt.G/2023/PN Tng Perbuatan Melawan Hukum	C6, C13, C17, D12	27.02.2023	27.02.2023	27.02.2023	27.02.2023	27.02.2023	Dikatakan
95	81/Pdt/2023/PT BTN 8/Pdt.G/2022/PN Pdt Perbuatan Melawan Hukum	C5, C8, C11, D17	27.02.2023	27.02.2023	27.02.2023	27.02.2023	27.02.2023	Dikatakan
96	82/Pdt/2023/PT BTN 1045/Pdt.G/2021/PN Tng Perbuatan Melawan Hukum	C19, C10, C12, D16	27.02.2023	27.02.2023	27.02.2023	27.02.2023	27.02.2023	Tidak diterima
97	83/Pdt/2023/PT BTN 272/Pdt.G/2023/PN Tng Perbuatan Melawan Hukum	C16, C7, C14, D23	27.02.2023	27.02.2023	27.02.2023	27.02.2023	27.02.2023	Dikatakan
98	84/Pdt/2023/PT BTN 603/Pdt.G/2022/PN Tng Perbuatan Melawan Hukum	C12, C10, C19, D18	27.02.2023	27.02.2023	27.02.2023	27.02.2023	27.02.2023	Dikatakan
99	85/Pdt/2023/PT BTN 50/Pdt.G/2021/PN Tng 50/Pdt.G/2021/PN Tng 86/Pdt/2023/PT BTN 860/Pdt.G/2022/PN Tng Percecahan	C15, C1, C8, D19	27.02.2023	27.02.2023	27.02.2023	27.02.2023	27.02.2023	Dikatakan
100	86/Pdt/2023/PT BTN 28/Pdt.G/2022/PN Tng Perbuatan Melawan Hukum	C8, C1, C15, D14	27.02.2023	27.02.2023	27.02.2023	27.02.2023	27.02.2023	Dikatakan
101	87/Pdt/2023/PT BTN Perbuatan Melawan Hukum	C1, C8, C15, D4	27.02.2023	27.02.2023	27.02.2023	27.02.2023	27.02.2023	Dikatakan
102	88/Pdt/2023/PT BTN 156/Pdt.G/2015/PN Tng Perbuatan Melawan Hukum	C7, C4, C9, D2	27.02.2023	27.02.2023	27.02.2023	27.02.2023	27.02.2023	Dikatakan
103	89/Pdt/2023/PT BTN 933/Pdt.G/2022/PN Tng Wangprestasi	C8, C5, C11, D19	03.02.2023	03.02.2023	03.02.2023	03.02.2023	03.02.2023	Dikatakan
104	90/Pdt/2023/PT BTN 843/Pdt.G/2022/PN Tng Percecahan	C1, C18, C19, D21	03.02.2023	03.02.2023	03.02.2023	03.02.2023	03.02.2023	Dikatakan
105	91/Pdt/2023/PT BTN 582/Pdt.G/2022/PN Tng Percecahan	C18, C1, C19, D23	03.02.2023	03.02.2023	03.02.2023	03.02.2023	03.02.2023	Dikatakan
106	92/Pdt/2023/PT BTN 418/Pdt.G/2022/PN Tng Perbuatan Melawan Hukum	C13, C17, C5, D16	03.02.2023	03.02.2023	03.02.2023	03.02.2023	03.02.2023	Dikatakan
107	93/Pdt/2023/PT BTN 51/Pdt.G/2022/PN Tng Perbuatan Melawan Hukum	C17, C13, C5, D15	03.02.2023	03.02.2023	03.02.2023	03.02.2023	03.02.2023	Diperbaiki
108	94/Pdt/2023/PT BTN Perbuatan Melawan Hukum	C1, C8, C11, D17	03.02.2023	03.02.2023	03.02.2023	03.02.2023	03.02.2023	Dikatakan



109	1158/Pdt. G./2021/PN Tng Perbuatan Melawan Hukum 95/Pdt/2021/PT BTH 305/Pdt. Bth/2022/PN Tng Lain-Lain	C7, C14, C16, D13	03.07.2023	03.07.2023	03.07.2023	Dikuatkan
110	96/Pdt/2021/PT BTH 339/Pdt. G./2021/PN Tng Perbuatan Melawan Hukum	C14, C7, C16, D13	03.02.2023	03.02.2023	03.02.2023	Dikuatkan
111	97/Pdt/2021/PT BTH 1234/Pdt. G./2021/PN Tng Perbuatan Melawan Hukum	C4, C8, C7, D11	03.02.2023	03.02.2023	03.02.2023	Diperbaiki
112	98/Pdt/2021/PT BTH 134/Pdt. G./2022/PN Sg Perbuatan Melawan Hukum	C10, C12, C19, D10	03.02.2023	03.02.2023	03.02.2023	Dikuatkan
113	99/Pdt/2021/PT BTH 119/Pdt. G./2021/PN Sg Perbuatan Melawan Hukum	C6, C13, C17, D9	03.02.2023	03.02.2023	03.02.2023	Dikuatkan
114	100/Pdt/2021/PT BTH 538/Pdt. G./2021/PN Tng Perbuatan Melawan Hukum	C13, C17, C6, D13	09.03.2023	09.03.2023	09.03.2023	Dibatalakan
115	101/Pdt/2021/PT BTH 720/Pdt. G./2021/PN Tng Wanprestasi	C18, C10, C12, D8	09.03.2023	09.03.2023	09.03.2023	Dibatalakan
116	102/Pdt/2021/PT BTH 684/Pdt. G./2021/PN Tng Percecahan	C11, C8, C5, D7	09.03.2023	09.03.2023	09.03.2023	Dikuatkan
117	103/Pdt/2021/PT BTH 519/Pdt. G./2021/PN Tng Perbuatan Melawan Hukum	C16, C7, C14, D6	09.03.2023	09.03.2023	09.03.2023	Dikuatkan
118	104/Pdt/2021/PT BTH 443/Pdt. G./2021/PN Tng Perbuatan Melawan Hukum	C15, C1, C8, D4	13.03.2024	13.03.2024	13.03.2024	Diperbaiki
119	105/Pdt/2021/PT BTH 484/Pdt. G./2021/PN Tng Perbuatan Melawan Hukum	C6, C13, C17, D5	13.03.2024	13.03.2024	13.03.2024	Dikuatkan
120	106/Pdt/2021/PT BTH 32/Pdt. G./2022/PN Tng Perbuatan Melawan Hukum	C18, C3, C19, D22	13.03.2024	13.03.2024	13.03.2024	Dikuatkan
121	107/Pdt/2021/PT BTH 653/Pdt. G./2021/PN Tng Wanprestasi	C5, C8, C11, D73	13.03.2024	13.03.2024	13.03.2024	Dibatalakan
122	108/Pdt/2021/PT BTH 487/Pdt. G./2021/PN Tng Wanprestasi	C7, C14, C15, D23	13.03.2024	13.03.2024	13.03.2024	Dikuatkan
123	109/Pdt/2021/PT BTH eCourt 805/Pdt. G./2021/PN Tng Perbuatan Melawan Hukum	C17, C13, C6, D16	13.03.2024	13.03.2024	13.03.2024	Diperbaiki
124	110/Pdt/2021/PT BTH eCourt 621/Pdt. G./2021/PN Tng Perbuatan Melawan Hukum	C18, C19, C12, D55	13.03.2024	13.03.2024	13.03.2024	Dikuatkan
125	111/Pdt/2021/PT BTH eCourt 1347/Pdt. G./2021/PN Tng Percecahan	C14, C2, C16, D17	13.03.2024	13.03.2024	13.03.2024	Dikuatkan
126	112/Pdt/2021/PT BTH 951/Pdt. G./2021/PN Tng	C13, C19, C19, D14	14.03.2023	14.03.2023	14.03.2023	Diperbaiki

127	Perbuatan Melawan Hukum 113/Pdt/2023/Pt B/N Penceraian	C1.C18.C19.012	14.03.2023	14.03.2023	05.04.2023	Dikatakan	
128	114/Pdt/2023/Pt B/N Warisan/Wasiat	C7.C4.C9.011	14.03.2023	14.03.2023	11.04.2023	Dikatakan	
129	115/Pdt/2023/Pt B/N 715/Pdt.G/2022/PN Tng Lain-lain	C4.C9.C7.010	14.03.2023	14.03.2023	12.04.2023	Dikatakan	
130	116/Pdt/2023/Pt B/N 216/Pdt.G/2022/PN Tng Perbuatan Melawan Hukum	C1.C8.C15.09	14.03.2023	14.03.2023	12.04.2023	Dikatakan	
131	117/Pdt/2023/Pt B/N 174/Pdt.G/2022/PN Tng Lain-lain	C11.C8.C5.08	14.03.2023	14.03.2023	14.04.2023	Dikatakan	
132	118/Pdt/2023/Pt B/N 1017/Pdt.G/2021/PN Tng Perbuatan Melawan Hukum	C7.C4.C9.07	24.03.2023	24.03.2023	07.05.2023	Dikatakan	
133	119/Pdt/2023/Pt B/N 565/Pdt.G/2022/PN Tng Penceraian	C15.C1.C13.06	24.03.2023	24.03.2023	04.05.2023	Dikatakan	
134	120/Pdt/2023/Pt B/N 521/Pdt.G/2022/PN Tng Perbuatan Melawan Hukum	C16.C3.C14.01	24.03.2023	24.03.2023	16.04.2023	Dibatalan	
135	121/Pdt/2023/Pt B/N 1080/Pdt.G/2022/PN Tng Penceraian	C7.C14.C16.04	24.03.2023	24.03.2023	19.04.2023	Dikatakan	
136	122/Pdt/2023/Pt B/N 96/Pdt.G/2022/PN Tng Perbuatan Melawan Hukum	C17.C13.C6.05	24.03.2023	24.03.2023	05.05.2023	Dibatalan	
137	123/Pdt/2023/Pt B/N 831/Pdt.G/2020/PN Tng Perbuatan Melawan Hukum	C15.C1.C8.013	24.03.2023	24.03.2023	09.05.2023	Dikatakan	
138	124/Pdt/2023/Pt B/N 385/Pdt.G/2022/PN Tng Perbuatan Melawan Hukum	C6.C13.C14.014	03.04.2023	03.04.2023	10.05.2023	Dikatakan	
139	125/Pdt/2023/Pt B/N 1071/Pdt.G/2022/PN Tng Perbuatan Melawan Hukum	C3.C6.C19.015	06.04.2023	06.04.2023	04.05.2023	Dikatakan	
140	126/Pdt/2023/Pt B/N 197/Pdt.G/2022/PN Tng Wangpustasi	C5.C15.C20.016	06.04.2023	06.04.2023	04.05.2023	Dikatakan	
141	127/Pdt/2023/Pt B/N 1423/Pdt.G/2021/PN Tng Perbuatan Melawan Hukum	C15.C5.C20.020	06.04.2023	06.04.2023	04.05.2023	Dikatakan	
142	128/Pdt/2023/Pt B/N 845/Pdt.G/2022/PN Tng Perbuatan Melawan Hukum	C16.C1.C22.013	06.04.2023	06.04.2023	04.05.2023	Dikatakan	
143	129/Pdt/2023/Pt B/N 719/Pdt.G/2022/PN Tng Penceraian	C6.C2.C19.018	06.04.2023	06.04.2023	08.05.2023	Dikatakan	
144	130/Pdt/2023/Pt B/N 115/Pdt.G/2022/PN Tng Perbuatan Melawan Hukum	C22.C1.C16.01	06.04.2023	06.04.2023	04.05.2023	Dikatakan	

Ketua :

Dr. ANDHARI RURDIN, SH., MH

Wakil Ketua :

1. SUJATMIRO, SH., MH
2. KUSRIYANTO, SH., MHUM
3. LAURENSIUS DIRAANI, SH
4. SOLAHUDDIN, SH., MH
5. M. TUCHFATUL ANAM, SH., MH
6. RAMLI DARAJAH, SH., M.Hum
7. EFFENDI PASARIBU, SH., MH
8. VICTOR SELAMAT ZAGOTO, SH., MHum
9. IRDALINDA, SH., MH
10. ENCEP YUJADI, SH., MH
11. I GEDE KOMANG ADY NATHA, SH., M.Num
12. AGUNG SURADI, SH
13. IMANUEL SEMBIRING, SH
14. POSMAN SARARA, SH., MH
15. SUPRIYONO, SH., M.Hum
16. Dr. NI. SITI SURYATI, SH., MH, MM
17. NATHAN LAMBE, SH., MH

A

B

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

C12

C13

C14

C15

C16



145	131/POT/2023/PT BTH 427/Pdt. BTh/2022/PTN Trg Perbuatan Melawan Hukum	06.04.2023	06.04.2023	15.05.2023	Dikuatkan	37	BAMBANG SASMITO, SH., MH	C17
146	133/POT/2023/PT BTH 847/Pdt. G/2022/PTN Trg Perbuatan Melawan Hukum	06.04.2023	06.04.2023	15.05.2023	Dikuatkan	38	ERIS SUDJAWANTO, SH., MH	C18
147	133/POT/2023/PT BTH 858/Pdt. G/2022/PTN Trg Lain-lain	13.04.2023	13.04.2023	09.05.2023	Dikuatkan	39	AHMAD RIWAL, SH., MH	C19
148	134/POT/2023/PT BTH 827/Pdt. G/2020/PTN Trg Wanprestasi	13.04.2023	13.04.2023	11.05.2023	Diperbaiki	20.	PURWICHO EDI SANTOSA, SH., MH	C20
149	135/POT/2023/PT BTH 794/Pdt. G/2022/PTN Trg Wanprestasi	13.04.2023	13.04.2023	16.05.2023	Dibatalan	21	WIATU PRASETYO WISOWO, SH., MH	C21
150	136/POT/2023/PT BTH 818/Pdt. G/2022/PTN Trg Wanprestasi	13.04.2023	13.04.2023	15.05.2023	Dikuatkan	22	LENDRIATY JANGS, SH., MH	C22
151	137/POT/2023/PT BTH 448/Pdt. G/2022/PTN Trg Perbuatan Melawan Hukum	14.04.2023	14.04.2023	25.05.2023	Dibatalan	22	LENDRIATY JANGS, SH., MH	C22
152	138/POT/2023/PT BTH 16/Pdt. G/2022/PTN Trg Perbuatan Melawan Hukum	14.04.2023	14.04.2023	15.05.2023	Dikuatkan	1	DEDE MUTTAKIN, SH., MHUM	D
153	139/POT/2023/PT BTH 1295/Pdt. G/2021/PTN Trg Perbuatan Melawan Hukum	17.04.2023	17.04.2023	30.05.2023	Dikuatkan	2	CHRISTANTO PUJIONO, SH., MH	D1
154	140/POT/2023/PT BTH 164/Pdt. G/2022/PTN Trg Perbuatan Melawan Hukum	18.04.2023	18.04.2023	17.05.2023	Dikuatkan	3	TNI WIDODO, SH., MH	D2
155	141/POT/2023/PT BTH 104/Pdt. G/2022/PTN Trg Perbuatan Melawan Hukum	03.05.2023	03.05.2023	29.05.2023	Dikuatkan	4	ITAUDA LAMTIUR P, SH	D3
156	142/POT/2023/PT BTH 1140/Pdt. G/2019/PTN Trg Wanprestasi	11.05.2023	11.05.2023	30.05.2023	Dikuatkan	5	WILAN WITARSH, SH.	D4
157	143/POT/2023/PT BTH 2/Pdt. G/2023/PTN Trg Percecaraan	11.05.2023	11.05.2023	24.05.2023	Dibatalan	6	SITI FUSLAWATI, SH	D5
158	144/POT/2023/PT BTH 202/Pdt. G/2022/PTN Trg Tunah	11.05.2023	11.05.2023	10.05.2023	Dikuatkan	7	MURTUAD, SH	D6
159	145/POT/2023/PT BTH 600/Pdt. G/2022/PTN Trg Perbuatan Melawan Hukum	11.05.2023	11.05.2023	31.05.2023	Dikuatkan	8	FEBI ANDIANSYA, SH., MH	D7
160	146/POT/2023/PT BTH 1195/Pdt. G/2022/PTN Trg Perbuatan Melawan Hukum	11.05.2023	11.05.2023	27.05.2023	Dikuatkan	9	AHMAD BALDOOWL, SH	D8
161	147/POT/2023/PT BTH 707/Pdt. G/2022/PTN Trg Jual Beli	11.05.2023	11.05.2023	31.05.2023	Dikuatkan	10	YANI IRAWATI, SH	D9
162	148/POT/2023/PT BTH 169/Pdt. G/2022/PTN Trg Perbuatan Melawan Hukum	11.05.2023	11.05.2023	05.05.2023	Diperbaiki	11	AGUS GIHARNO, SH	D10
163	149/POT/2023/PT BTH	19.05.2023	19.05.2023	21.05.2023		12	TURASIH, SH	D11
						13	KOSASIH, SH	D12
						14	SUDIRMAN, SH	D13
						15	MARJAKA, SH	D14
						16	YETTI WINGSIH, SH	D15
						17	AIF SAIFUDDIN, SH., MH	D16
						18	AGUS GIHARNO, SH	D17
						19	IMAM SUBEKTI, SH	D18
						20	ARIEF MUSTAQIM, SH	D19
						21	AGUS GIHARNO, SH	D20
						22	IMAM SUBEKTI, SH	D21
						23	ARIEF MUSTAQIM, SH	D22
								D23
								A
								B
								C1
								C2
								C3
								C4
								C5
								C6
								C7
								C8
								C9
								C10
								C11
								C12
								C13
								C14
								C15
								C16
								C17

Ketua :

Dr. ANDRIANI NURDIH, SH., MH

Wakil Ketua :

1 KUSRIYANTO, SH., MHUM

2 LAURENSIUS SIRABANI, SH

3 SOLAHUDDIN, SH., MH

4 M. TUCHAFATUL AHAM, SH., MH

5 RAMLI DARASAM, SH., M.Hum

6 EFFENDI PASARIBU, SH., MH

7 VICTOR SELAMAT JAGOTO, SH., MHUM

8 IRDALINDA, SH., MH

9 ENCEP YULIADI, SH., MH

10 I GEGE KOMANG ADY NATHA, SH., M.Hum

11 AGUNG SURADI, SH

12 IMANUEL SEMBRING, SH

13 POSMAN BARAKA, SH., MH

14 SUPRIYONO, SH., M.Hum

15 Dr. H. STI SURYATI, SH., MH., MM

16 NATHAN LAMBE, SH., MH

17 DAMBANG SASMITO, SH., MH





182	Jual Beli 111/Pele.G/2022/PH-Sg Tengah	C18,C7,C8,D4	05.05.2023	05.05.2023	05.05.2023	26.05.2023	Diperbaiki	Wakil Ketua : SUJATMIRO, SH.,MH	9
183	165/Pele.G/2023/PT BTH 122/Pele.G/2023/PH-Sg Walis	C12,C5,C16,D34 C7,C8,C10,D22	05.05.2023	05.05.2023	05.05.2023	06.07.2023	Dikuatkan	1 KUSRIYANTO, SH.,MHUM 2 LAURENSIUS SIMBARANI, SH 3 SOLAHUDDIN, SH.,MH 4 M. TUCHFATUL ANAM, SH., MH 5 RAMU DARAGAN, SH., MHUM 6 EFFENDI PASARIBU, SH., MH 7 IRDALINGDA, SH., MH 8 ENCP YULIADI, SH., MH 9 I GEGE KOMANG ADY NATHA, SH., MHUM 10 AGUNG SURADI, SH 11 IMANUEL SEMBRING, SH 12 POSMAN BAKARA, SH., MH 13 SUPRIYONO, SH., MHUM 14 Dr. H. SITI SURYATI, SH., MH., MM 15 NATHAN LAMBE, SH., MH 16 DAMIANG SASMITO, SH., MH 17 ERIS SUJARWANTO, SH., MH 18 AHMAD RIVAL, SH., MH 19 PURWONO EDI SANTOSA, SH., MH 20 WAHYU PRASETYO WIDOWO, SH., MH 21 LENDRIATY JANIS, SH., MH 22 Dr. AHMAD YURUS, SH.,MH 23 SYAFONI, SH., MHUM	CI
184	170/Pele.G/2023/PT BTH 173/Pele.G/2023/PH-Sg Tengah	C6,C12,C16,D30	12.05.2023	12.05.2023	17.05.2023	10.07.2023	Dikuatkan		CI
185	1142/Pele.G/2022/PH Tng Wanprestasi	C18,C2,C20,D19	12.05.2023	12.05.2023	12.05.2023	11.07.2023	Dikuatkan		CI
186	663/Pele.G/2022/PH Tng Perbuatan Melawan Hukum	C4,C9,C19,D21	12.05.2023	12.05.2023	12.05.2023	17.07.2023	Dikuatkan		CI
187	969/Pele.G/2022/PH Tng Goreng Gali	C13,C5,C14,D17	12.05.2023	12.05.2023	12.05.2023	05.07.2023	Dikuatkan		CI
188	174/Pele.G/2023/PT BTH 256/Pele.G/2023/PH Tng	C16,C5,C12,D16	12.05.2023	12.05.2023	12.05.2023	26.07.2023	Dikuatkan		CI
189	175/Pele.G/2023/PT BTH 123/Pele.G/2022/PH-Sg Wanprestasi	C21,C1,C15,D15	12.05.2023	12.05.2023	12.05.2023	05.07.2023	Dikuatkan		CI
190	176/Pele.G/2023/PT BTH 874/Pele.G/2022/PH Tng Lain-lain	C11,C3,C17,D38	12.05.2023	12.05.2023	12.05.2023	16.07.2023	Dikuatkan	Partera : MUNTAR, SH., M.K.	CI
191	177/Pele.G/2022/PH Tng Jual Beli	C9,C4,C19,D13	12.05.2023	12.05.2023	12.05.2023	06.07.2023	Dikuatkan		CI
192	178/Pele.G/2023/PT BTH 516/Pele.G/2022/PH Tng Ekskusi Tanah	C5,C13,C14,D12	12.05.2023	12.05.2023	12.05.2023	12.07.2023	Dikuatkan		CI
193	179/Pele.G/2023/PT BTH 138/Pele.G/2022/PH Tng Perbuatan Melawan Hukum	C19,C4,C9,D11	14.06.2023	14.06.2023	14.06.2023	25.07.2023	Dikuatkan		CI
194	180/Pele.G/2023/PT BTH 830/Pele.G/2022/PH Tng Wanprestasi	C17,C3,C11,D10	14.06.2023	14.06.2023	14.06.2023	05.07.2023	Dikuatkan		CI
195	181/Pele.G/2023/PT BTH 705/Pele.G/2022/PH Tng Wanprestasi	C15,C1,C7,D9	21.06.2023	21.06.2023	21.06.2023	12.07.2023	Diperbaiki		CI
196	182/Pele.G/2022/PH Tng 187/Pele.G/2022/PH Tng Perbuatan Melawan Hukum	C14,C5,C13,D8	21.06.2023	21.06.2023	21.06.2023	12.07.2023	Dikuatkan		CI
197	183/Pele.G/2023/PT BTH 769/Pele.G/2022/PH Tng Wanprestasi	C32,C8,C23,D7	21.06.2023	21.06.2023	21.06.2023	15.07.2023	Dikuatkan		CI
198	184/Pele.G/2023/PT BTH 914/Pele.G/2022/PH Tng Perbuatan Melawan Hukum	C31,C8,C37,D5	21.06.2023	21.06.2023	21.06.2023	25.07.2023	Dikuatkan		CI
199	185/Pele.G/2023/PT BTH 1055/Pele.G/2022/PH Tng Wanprestasi								CI
200									CI
201									CI
202									CI
203									CI
204									CI
205									CI
206									CI
207									CI
208									CI
209									CI
210									CI
211									CI
212									CI
213									CI
214									CI
215									CI
216									CI
217									CI
218									CI
219									CI
220									CI
221									CI
222									CI
223									CI
224									CI
225									CI
226									CI
227									CI
228									CI
229									CI
230									CI
231									CI
232									CI
233									CI
234									CI
235									CI
236									CI
237									CI
238									CI
239									CI
240									CI
241									CI
242									CI
243									CI
244									CI
245									CI
246									CI
247									CI
248									CI
249									CI
250									CI
251									CI
252									CI
253									CI
254									CI
255									CI
256									CI
257									CI
258									CI
259									CI
260									CI
261									CI
262									CI
263									CI
264									CI
265									CI
266									CI
267									CI
268									CI
269									CI
270									CI
271									CI
272									CI
273									CI
274									CI
275									CI
276									CI
277									CI
278									CI
279									CI
280									CI
281									CI
282									CI
283									CI
284									CI
285									CI
286									CI
287									CI
288									CI
289									CI
290									CI
291									CI
292									CI
293									CI
294									CI
295									CI
296									CI
297									CI
298									CI
299									CI
300									CI
301									CI
302									CI
303									CI
304									CI
305									CI
306									CI
307									CI
308									CI
309									CI
310									CI
311									CI
312									CI
313									CI
314									CI
315									CI
316									CI
317									CI
318									CI
319									CI
320									CI
321									CI
322									CI
323									CI
324									CI
325									CI
326									CI
327									CI
328									CI
329									CI
330									CI
331									CI
332									CI
333									CI
334									CI
335									CI
336									CI
337									CI
338									CI
339									CI
340									CI
341									CI
342									CI
343									CI
344									CI
345									CI
346									







237	Perubahan Melawan Hukum 400/Pdt.G./2022/PN THg Tanah	C4,C5,C19,D21	01.08.2023	01.08.2023	01.08.2023	07.09.2023 Dikawatirkan
238	234/Pdt/2023/Pt BTH 100/Pdt.G./2022/PN THg Perkawinan	C16,C6,C12,D22	01.08.2023	01.08.2023	01.08.2023	30.08.2023 Dibatalakan
239	235/Pdt/2023/Pt BTH 1347/Pdt.Bth/2022/PN THg Lain-lain	C15,C1,C71,D24	01.08.2023	01.08.2023	01.08.2023	07.09.2023 Dikawatirkan
240	236/Pdt/2023/Pt BTH 65/Pdt.G./2023/PN THg Lain-lain	C1,C18,C10,D10	11.08.2023	11.08.2023	11.08.2023	31.08.2023 Dikawatirkan
241	237/Pdt/2023/Pt BTH 232/Pdt.G./2022/PN THg Lain-lain	C8,C23,C22,D10	14.08.2023	14.08.2023	14.08.2023	04.09.2023 Dibatalakan
242	238/Pdt/2023/Pt BTH 1078/Pdt.G./2022/PN THg Tanah	C22,C8,C21,D12	14.08.2023	14.08.2023	14.08.2023	14.09.2023 Dikawatirkan
243	239/Pdt/2023/Pt BTH 176/Pdt.G./2022/PN THg Perubahan Melawan Hukum	C5,C13,C14,D22	16.08.2023	16.08.2023	16.08.2023	07.09.2023 Dikawatirkan
244	230/Pdt/2023/Pt BTH 1280/Pdt.G./2022/PN THg Wangprestasi	C13,C8,C12,D13	21.08.2023	21.08.2023	21.08.2023	14.09.2023 Dikawatirkan
245	231/Pdt/2023/Pt BTH 703/Pdt.G./2022/PN THg Tanah	C14,C5,C13,D17	21.08.2023	21.08.2023	21.08.2023	14.09.2023 Dikawatirkan
246	232/Pdt/2023/Pt BTH 1185/Pdt.G./2022/PN THg Perubahan Melawan Hukum	C10,C7,C8,D4	21.08.2023	21.08.2023	21.08.2023	31.08.2023 Dikawatirkan
247	233/Pdt/2023/Pt BTH 908/Pdt.G./2022/PN THg Jual Beli	C6,C12,C16,D	28.08.2023	28.08.2023	28.08.2023	19.09.2023 Dikawatirkan
248	234/Pdt/2023/Pt BTH 159/Pdt.G./2022/PN THg Harta Bersama	C19,C4,C9,D	28.08.2023	28.08.2023	28.08.2023	25.09.2023 Dikawatirkan
249	235/Pdt/2023/Pt BTH 294/Pdt.G./2022/PN THg Wangprestasi	C12,C6,C16,D9	28.08.2023	28.08.2023	28.08.2023	20.09.2023 Dikawatirkan
250	236/Pdt/2023/Pt BTH 1117/Pdt.G./2022/PN THg Wangprestasi	C7,C8,C10,D18	28.08.2023	28.08.2023	28.08.2023	14.09.2023 Dibatalakan
251	237/Pdt/2023/Pt BTH 1121/Pdt.Bth/2022/PN THg Lain-lain	C20,C7,C18,D11	28.08.2023	28.08.2023	28.08.2023	21.09.2023 Dibatalakan
252	238/Pdt/2023/Pt BTH 918/Pdt.G./2022/PN THg Tanah	C17,C1,C11,D3	29.08.2023	29.08.2023	29.08.2023	19.09.2023 Dikawatirkan
253	239/Pdt/2023/Pt BTH 390/Pdt.Phw/2020/PN THg Perubahan Melawan Hukum	C11,C1,C15,D3	29.08.2023	29.08.2023	29.08.2023	19.09.2023 Dikawatirkan
254	240/Pdt/2023/Pt BTH 306/Pdt.G./2022/PN THg Perubahan Melawan Hukum	C9,C4,C19,D1	30.08.2023	30.08.2023	30.08.2023	16.10.2023 Dibatalakan



255	241/Pdt/2023/Pt BTH 157/Pdt.G/2022/PN Srg Perubahan Melawan Hukum	C1,C15,C21,D13	31.08.2023	31.08.2023	30.09.2023	Dikuatkan
256	242/Pdt/2023/Pt BTH 84/Pdt.G/2023/PN Tng Penceraian	C4,C5,C19,D00	01.09.2023	01.09.2023	21.09.2023	Dikuatkan
257	243/Pdt/2023/Pt BTH 957/Pdt.Bth/2022/PN Tng Lain-lain	C16,C12,C4,D21	01.09.2023	01.09.2023	21.09.2023	Dikuatkan
258	244/Pdt/2023/Pt BTH 149/Pdt.G/2023/PN TNG	C18,C3,C20,D23	04.09.2023	04.09.2023	26.09.2023	Diperbaiki
259	245/Pdt/2023/Pt BTH 1129/Pdt.G/2022/PN TNG Waspriatelj	C13,C5,C14,D25	08.09.2023	08.09.2023	08.10.2023	Diperbaiki
260	246/Pdt/2023/Pt BTH 286/Pdt.G/2023/PN TNG Perubahan Melawan Hukum	C7,C18,C20,D7	08.09.2023	08.09.2023	04.10.2023	Dikuatkan
261	247/Pdt/2023/Pt BTH 665/Pdt.G/2022/PN TNG Waspriatelj	C8,C73,C22,D10	08.09.2023	08.09.2023	04.10.2023	Dikuatkan
262	248/Pdt/2023/Pt BTH 219/Pdt.G/2023/PN TNG Penceraian	C1,C11,C17,D12	08.09.2023	08.09.2023	16.10.2023	Dibatalkan
263	249/Pdt/2023/Pt BTH 889/Pdt.G/2022/PN TNG Perubahan Melawan Hukum	C11,C3,C17,D8	08.09.2023	08.09.2023	16.10.2023	Dikuatkan
264	250/Pdt/2023/Pt BTH 921/Pdt.G/2022/PN TNG Perubahan Melawan Hukum	C10,C7,C8,D16	08.09.2023	08.09.2023	20.09.2023	Dikuatkan
265	251/Pdt/2023/Pt BTH 1146/Pdt.G/2022/PN TNG Perubahan Melawan Hukum	C5,C13,C14,D22	08.09.2023	08.09.2023	02.10.2023	Dibatalkan
266	252/Pdt/2023/Pt BTH 1082/Pdt.G/2022/PN TNG Perubahan Melawan Hukum	C15,C1,C21,D04	08.09.2023	08.09.2023	26.09.2023	Dikuatkan
267	253/Pdt/2023/Pt BTH 25/Pdt.G/2022/PN PDL Perubahan Melawan Hukum	C22,C8,C23,D5	13.09.2023	13.09.2023	09.10.2023	Dikuatkan
268	254/Pdt/2023/Pt BTH 117/Pdt.G/2022/PN SrgS Perubahan Melawan Hukum	C23,C8,C22,D6	13.09.2023	13.09.2023	17.10.2023	Dibatalkan
269	255/Pdt/2023/Pt BTH 1349/Pdt.G/2022/PN TNG Penceraian	C6,C12,C16,D17	19.09.2023	19.09.2023	17.10.2023	Dikuatkan
270	256/Pdt/2023/Pt BTH 512/Pdt.G/2022/PN TNG Perubahan Melawan Hukum	C12,C5,C16,C18	22.09.2023	22.09.2023	16.10.2023	Dikuatkan
271	257/Pdt/2023/Pt BTH 2/Pdt.G/2023/PN Srg Perubahan Melawan Hukum	C20,C1,C18,D14	22.09.2023	22.09.2023	10.10.2023	Dibatalkan
272	258/Pdt/2023/Pt BTH 329/Pdt.G/2022/PN TNG Perubahan Melawan Hukum	C16,C12,C4,D0	25.09.2023	25.09.2023	17.10.2023	Dikuatkan
273	259/Pdt/2023/Pt BTH	C4,C9,C19,D11	25.09.2023	25.09.2023	17.10.2023	Dikuatkan







310	296/P05/2023/PT BTN 1316/Pdt. G/2022/PN Trg Perbuatan Melawan Hukum	C1,C15,C17,D14	07.11.2023	07.11.2023	14.12.2023	Dikuatkan	30	AGUNG SUBADI, SH	C10
311	297/P05/2023/PT BTN 714/Pdt. G/2019/PT BTM	C7,C8,C17,D13	07.11.2023	07.11.2023	14.12.2023	Diperbaiki	31	IMANUEL SEMBRING, SH	C11
312	298/P05/2023/PT BTN 9/Pdt. G/2023/PTN Pdt	C16,C18,C19,D22	10.11.2023	10.11.2023	29/11/2023	Dikuatkan	32	POKMAN BAKARA, SH, MH	C12
313	299/P05/2023/PT BTN 51/Pdt. G/2023/PTN Trg	C1,C11,C17,D18	13.11.2023	13.11.2023	04.12.2023	Dibatalakan	33	SUPRIYONO, SH, M.Hum	C13
314	300/P05/2023/PT BTN 15/Pdt. G/2023/PTN Trg	C8,C23,C22,D19	13.11.2023	13.11.2023	13.12.2023	Dibatalakan	34	Dr. H. STI SURYATI, SH., MH., MM	C14
315	301/P05/2023/PT BTN 1077/Pdt. G/2022/PTN Trg	C6,C12,C16,D21	13.11.2023	13.11.2023	05.12.2023	Dikuatkan	35	MATHAN LAMBE, SH., MH	C15
316	302/P05/2023/PT BTN 837/Pdt. G/2019/PTN Trg	C12,C6,C16,D2	15.11.2023	15.11.2023	06.12.2023	Dikuatkan	36	BAMBANG SASMITO, SH., MH	C16
317	303/P05/2023/PT BTN 1273/Pdt. G/2022/PTN Trg	C20,C2,C18,D8	15.11.2023	15.11.2023	19.12.2023	Dikuatkan	37	ERIS SUDIARWANTO, SH., MH	C17
318	304/P05/2023/PT BTN 1297/Pdt. G/2022/PTN Trg	C4,C9,C19,D03	15.11.2023	15.11.2023	13.12.2023	Dikuatkan	38	AHMAD RIVAL, SH., MH	C18
319	305/P05/2023/PT BTN 218/Pdt. G/2023/PTN Trg	C13,C5,C14,D3	15.11.2023	15.11.2023	12.12.2023	Dikuatkan	39	PURWONO EDI SANTOSA, SH., MH	C19
320	306/P05/2023/PT BTN 472/Pdt. G/2023/PTN Trg	C17,C3,C11,D6	15.11.2023	15.11.2023	07.12.2023	Dikuatkan	40	WAHYU PRASETYO WIBOWO, SH., MH	C20
321	307/P05/2023/PT BTN 146/Pdt. G/2023/PTN Trg	C5,C13,C14,D5	15.11.2023	15.11.2023	15.12.2023	Dikuatkan	41	LENDRIATY JANIS, SH., MH	C21
322	308/P05/2023/PT BTN 92/Pdt. G/2023/PTN Trg	C13,C5,C14,D3	15.11.2023	15.11.2023	12.12.2023	Dikuatkan	42	Dr. AHMAD YUNUS, SH.,MH	C22
323	309/P05/2023/PT BTN 12/Pdt. G/2023/PTN Trg	C17,C3,C11,D6	15.11.2023	15.11.2023	07.12.2023	Dikuatkan	43	SYAIFONI, SH., M.Hum	C23
324	310/P05/2023/PT BTN 646/Pdt. G/2023/PTN Trg	C38,C2,C20,D10	17.11.2023	17.11.2023	15.12.2023	Dibatalakan	44	BENSAR SIREGAR, SH., M.Hum	C24
325	311/P05/2023/PT BTN 645/Pdt. G/2022/PTN Trg	C9,C4,C19,D24	20.11.2023	20.11.2023	14.12.2023	Dibatalakan	45	MUHTAR, SH., M.H.	D
326	312/P05/2023/PT BTN 183/Pdt. G/2022/PTN Srg	C14,C5,C13,D10	20.11.2023	20.11.2023	14.12.2023	Dikuatkan	1	DEDE MUTTAKIR, SH.,MHUM	D1
327	313/P05/2023/PT BTN 6/Pdt. G/2019/PT BTN	C51,C3,C17,D11	27.11.2023	27.11.2023	11.12.2023	Dikuatkan	2	CHRISTANTO FUDJONO, SH., MH	D2
328	314/P05/2023/PT BTN	C19,C4,C9,D12	27.11.2023	27.11.2023	19.12.2023	Dikuatkan	3	TRI WIGODO, SH.,MH	D3
							4	ERWIN EFFENDI LODES, SE., SH.,MH	D4
							5	REIDA LAMTIJUR P, SH	D5
							6	WILAN WITARSIK, SH.	D6
							7	SITI SUSULAWATI, SH	D7
							8	NUBULAD, SH	D8
							9	FERI ANDIANASTYA, SH.,MH	D9
							10	AHMAD BAEDOWS, SH	D10
							11	YANI IRRAWATI, SH	D11
							12	MERTA YULIANA, SH	D12
							13	TURASHI, SH	D13
							14	KOSASIH, SH	D14
							15	SUDIRMAN, SH	D15
							16	MARJUMA, SH	D16
							17	YETTI NINGSIH, SH	D17
							18	AUF SAIFUDALILAH, SH.,MH	D18
							19	IMAM SURIKTI, SH	D19
							20	AREP MUSTAQIMA, SH	D20
							21	REYA, SH., MH	D21
							22	BOBSY ERTANTO, SH	D22
							23	AGUS MAULANA, SH	D23
							24	RESAL, SH., MH	D24

307/P05/2023/PT BTN



















LAPORAN KEADAAN PERKARA PIDANA KIRUSUS ANAK  
BULAN : JANUARI-DISEMBER TAHUN : 2023

NO.	NOMOR PERKARA YANG BELUM DIPUTUS	NAMA HAJAH / MAJELIS	T A N G G A L					SSA AKHIR BULAN			KETERANGAN
			PEMERIKSAAN	MEMORI MAJELIS	PUTUSAN	BELUM DIBACI	BELUM DIPUTUS	BELUM DIMUNGKIR			
1	14. PG. S. S. ANAK. 2023. PT. B. TN	C1. 019	09.01.2023	09.01.2023	12.01.2023					<p>REVISI 1</p> <p>Dr. ANDRIANI PURDANI, S.H., M.H.</p> <p>Wahid Barakat</p> <p>SUGANTORO, S.H., M.H.</p> <p>Nahim Tinggi 1</p> <p>1. SOLIMUDDIN, S.H., M.H.</p> <p>2. VIKTOR SILAMAT DAGOTO, S.H., M.H.</p> <p>3. ROSMANI BARAKA, S.H.</p> <p>4. Dr. JETI SURWATI, S.H., M.H., M.P.</p> <p>5. MURNI ARIANSYAH, S.H.</p> <p>6. SITI SULAIMAN, S.H.</p> <p>7. HAZA JAMRI, S.H.</p> <p>8. NURUL HUDA, S.H.</p> <p>9. FENI AGUSRIYAH, S.H.</p> <p>10. ANINDY BUDON, S.H.</p> <p>11. MURNI RIJAKA, S.H.</p> <p>12. YUSUF KAMAL, S.H.</p> <p>13. FALSAFA, S.H.</p> <p>14. NUSQUAH, S.H.</p> <p>15. ARIYATI, S.H.</p> <p>16. SUCIRMAN, S.H.</p> <p>17. MALLAMA, S.H.</p> <p>18. VETRI NUGEN, S.H.</p> <p>19. ADEL NUSYALZUM, S.H.</p> <p>20. MAM ILIYATI, S.H.</p> <p>21. ROSEP BINTARIZ, S.H.</p> <p>22. KASZ MALLAMA, S.H.</p> <p>23. SITIYAS, S.H.</p> <p>24. M. RIFA, S.H.</p>	
2	15. PG. S. S. ANAK. 2023. PT. B. TN	C1. 012	10.01.2023	10.01.2023	15.01.2023						
3	2. PG. S. S. ANAK. 2023. PT. B. TN	C1. 013	17.01.2023	17.01.2023	24.01.2023						
4	3. PG. S. S. ANAK. 2023. PT. B. TN	C1. 014	24.01.2023	24.01.2023	31.01.2023						
5	4. PG. S. S. ANAK. 2023. PT. B. TN	C1. 015	24.01.2023	24.01.2023	31.01.2023						
6	5. PG. S. S. ANAK. 2023. PT. B. TN	C1. 016	31.01.2023	31.01.2023	07.02.2023						
7	6. PG. S. S. ANAK. 2023. PT. B. TN	C1. 017	07.02.2023	07.02.2023	14.02.2023						
8	7. PG. S. S. ANAK. 2023. PT. B. TN	C1. 018	07.02.2023	07.02.2023	14.02.2023						
9	8. PG. S. S. ANAK. 2023. PT. B. TN	C1. 019	21.05.2023	21.05.2023	26.05.2023						
10	9. PG. S. S. ANAK. 2023. PT. B. TN	C1. 020	23.05.2023	23.05.2023	28.05.2023						
11	10. PG. S. S. ANAK. 2023. PT. B. TN	C1. 021	31.07.2023	31.07.2023	04.08.2023						
12	11. PG. S. S. ANAK. 2023. PT. B. TN	C1. 022	04.10.2023	04.10.2023	12.10.2023						
13	12. PG. S. S. ANAK. 2023. PT. B. TN	C1. 023	12.10.2023	12.10.2023	17.10.2023						
14	13. PG. S. S. ANAK. 2023. PT. B. TN	C1. 024	12.10.2023	12.10.2023	19.10.2023						
15	14. PG. S. S. ANAK. 2023. PT. B. TN	C1. 025	12.10.2023	12.10.2023	17.10.2023						
16	15. PG. S. S. ANAK. 2023. PT. B. TN	C1. 026	28.12.2023	28.12.2023	17.01.2024						

Mengaplikasi :  
PANTERA MUDA PIDANA

*[Signature]*  
THE WIRJONO, S.H., M.H.  
NIP. 19660608 199203 1 007

Seorang, 31 Desember 2023  
PETUGAS PEMBIAT LAPORAN

*[Signature]*  
ARIFIANILAHMI  
NIP. 19811218 200904 1 004

Revisi 1  
1. Sita Tahir 2023  
2. Peharizulhaq Tahir 2023  
3. Peharizulhaq Tahir 2023  
4. Peharizulhaq Tahir 2023  
5. Sita Tahir 2023  
6. Peharizulhaq Tahir 2023  
7. Sita Tahir 2023  
8. Peharizulhaq Tahir 2023  
9. Peharizulhaq Tahir 2023  
10. Peharizulhaq Tahir 2023  
11. Peharizulhaq Tahir 2023  
12. Peharizulhaq Tahir 2023  
13. Peharizulhaq Tahir 2023  
14. Peharizulhaq Tahir 2023  
15. Peharizulhaq Tahir 2023  
16. Peharizulhaq Tahir 2023  
17. Peharizulhaq Tahir 2023  
18. Peharizulhaq Tahir 2023  
19. Peharizulhaq Tahir 2023  
20. Peharizulhaq Tahir 2023  
21. Peharizulhaq Tahir 2023  
22. Peharizulhaq Tahir 2023  
23. Peharizulhaq Tahir 2023  
24. Peharizulhaq Tahir 2023

LAPORAN TAHUNAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI  
BULAN : JANUARI - DESEMBER TAHUN : 2023

PEMAJALAN TINGGI BAKHTI  
Jalan Raya Perintis JKM 5,6  
Serang Banten 42128

NO.	NOMOR PERKARA YANG BELUM DIPUTUS	NAMA HAKIM / MAJELIS	TANGGAL			SISA AKHIR BULAN			KETERANGAN
			PENERIMAAN	REKUNJUKKAN HAKIM / MAJELIS	PUTUSAN	BELUM DIBAGI	BELUM DIPUTUS	BELUM DIMINUTIR	
1	25/PID.SUS-TPK/2023/PT.BTN (L-1)	C4.C5.C9.D9	14.12.2022	15.12.2022	4.1.2023 (Mengusulkan)			Sasaran Majelis Hakim <u>Per 20 September 2022</u> : Ketua : Dr. ANDRIANI NURDAN, S.H.,M.H. Wakil Ketua : SUATMIKO, S.H.,M.H. Hakim Anggota : 1. DR. BUNGAR GULTOM, S.H.,S.E.,M.H. 2. M. TUCHFATUL ANAM, S.H.,M.H. 3. IMANUEL SEMBRINO, S.H. 4. VICTOR SELAMAT ZAGOTO, S.H.,M.Hum. 5. AGUNG SURADI, S.K. 6. LAURENSIUS SIBARANI, S.H. 7. EFENDI PASARIBU, S.H. 8. SUPRIYONO, S.H.,M.Hum. 9. UJUNG SUMARONANA, S.H.,M.H.	
2	24/PID.SUS-TPK/2023/PT.BTN (L-1)	C5.C4.C9.D13	14.12.2022	15.12.2022	4.1.2023 (Mengusulkan)			Majelis tanggal : 4.1.2023	
3	25/PID.SUS-TPK/2023/PT.BTN (L-1)	C4.C5.C9.D10	14.12.2022	15.12.2022	4.1.2023 (Mengusulkan)			Majelis tanggal : 5.1.2023	
4	26/PID.SUS-TPK/2023/PT.BTN (L-1)	C8.C3.C9.D22	14.12.2022	15.12.2022	5.1.2023 (Mengusulkan)			Majelis tanggal : 5.1.2023	
5	27/PID.SUS-TPK/2023/PT.BTN (P-1)	C8.C3.C9.D21	14.12.2022	15.12.2022	8.1.2023 (Mengusulkan)			Majelis tanggal : 5.1.2023 Perilaku Perogant : YUNDA HASBI, S.H.,M.H. 1. H. SUNYANTO, S.H.,M.H. 2. DEDE MUTAKIN, S.H.,M.Hum. 3. TRI WIDODO, S.H.,M.H. 4. CHRISTANTO PUJONO, S.H.,M.H. 5. ITAIDA LAMTUR PANGARBIAN, S.H. 6. WILAN WITARSHI, S.H.,M.H. 7. SITI SUSILAWATI, S.H. 8. KURRUTAO, S.H.	
6	1/PID.SUS-TPK/2023/PT.BTN (L-1)	C5.C1.C7.D4	18.1.2023	19.1.2023	16.2.2023 (Mengusulkan)			Majelis : 16.2.2023	
7	2/PID.SUS-TPK/2023/PT.BTN (L-1)	C1.C5.C7.D5	19.1.2023	19.1.2023	16.2.2023 (Mengusulkan)			Majelis : 16.2.2023	
8	3/PID.SUS-TPK/2023/PT.BTN (L-1)	C3.C4.C7.D6	19.1.2023	19.1.2023	16.2.2023 (Mengusulkan)			Majelis : 16.2.2023	
9	4/PID.SUS-TPK/2023/PT.BTN (L-1)	C4.C5.C7.D7	19.1.2023	19.1.2023	16.2.2023 (Mengusulkan)			Majelis : 16.2.2023	
10	5/PID.SUS-TPK/2023/PT.BTN (L-1)	C2.C6.C7.D8	19.1.2023	19.1.2023	16.2.2023 (Mengusulkan)			Majelis : 16.2.2023	
11	6/PID.SUS-TPK/2023/PT.BTN (L-1)	C8.C2.C7.D9	19.1.2023	19.1.2023	15.2.2023 (Mengusulkan)			Majelis : 15.2.2023	
12	7/PID.SUS-TPK/2023/PT.BTN (L-1)	C2.C6.C7.D10	31.1.2023	31.1.2023	8.3.2023 (Mengusulkan)			Majelis tanggal : 8.3.2023	
13	8/PID.SUS-TPK/2023/PT.BTN (L-1)	C8.C2.C7.D11	31.1.2023	31.1.2023	21.2.2023 (Mengusulkan)			Majelis tanggal : 21.2.2023	
14	9/PID.SUS-TPK/2023/PT.BTN (L-1)	C5.C1.C7.D12	9.2.2023	9.2.2023	9.3.2023 (Mengusulkan)			Majelis tanggal : 9.3.2023	
15	10/PID.SUS-TPK/2023/PT.BTN (P-1)	C1.C5.C7.D13	9.2.2023	9.2.2023	9.3.2023 (Mengusulkan)			Majelis tanggal : 9.3.2023 Sasaran Majelis Hakim <u>Per 2 Januari 2023</u> : Ketua : Dr. ANDRIANI NURDAN, S.H.,M.H. Wakil Ketua : SUATMIKO, S.H.,M.H. Hakim Anggota : 1. M. TUCHFATUL ANAM, S.H.,M.H. 2. IMANUEL SEMBRINO, S.H. 3. VICTOR SELAMAT ZAGOTO, S.H.,M.Hum. 4. AGUNG SURADI, S.H.	







